



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan pada Tahun Anggaran (TA) 2014 adalah sebesar Rp1.710.966.445.735,00 atau mencapai 104,18 persen dari target APBD Perubahan TA 2014 sebesar Rp1.642.386.125.000,00. Realisasi Pendapatan TA 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp161.347.108.688,00 atau 10,41 persen jika dibandingkan dengan realisasi TA 2013. Realisasi Pendapatan Daerah TA 2014 berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp235.295.346.622,00; Pendapatan Transfer sebesar Rp1.432.450.681.331,00; dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp43.220.417.782,00.

Realisasi Belanja Daerah pada TA 2014 adalah sebesar Rp1.645.804.824.542,00 atau 92,03 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan TA 2014 sebesar Rp1.788.253.908.250,00. Realisasi Belanja Daerah TA 2014 mengalami kenaikan Rp137.855.622.125,00 atau 9,14 persen jika dibandingkan dengan TA 2013. Realisasi Belanja Daerah TA 2014 terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp1.345.282.641.875,00; Belanja Modal sebesar Rp300.522.182.667,00; Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer bagi hasil pajak ke desa tidak direalisasikan.

Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp1.710.966.445.735,00 dan realisasi Belanja Daerah sebesar Rp1.645.804.824.542,00; maka terjadi Surplus Anggaran pada TA 2014 sebesar Rp65.161.621.193,00. Sementara itu, realisasi Pembiayaan (Netto) pada TA 2014 adalah sebesar Rp144.444.121.238,00 yang berasal dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp166.127.016.838,00 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp21.682.895.600,00. Terjadinya Surplus Anggaran dan realisasi Pembiayaan Netto mengakibatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) TA 2014 sebesar Rp209.605.742.431,00.

Laporan realisasi anggaran yang terdiri atas akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Uraian selengkapnya masing-masing akun laporan realisasi anggaran adalah sebagai berikut:

A. PENDAPATAN Rp1.710.966.445.735,00

Realisasi Pendapatan TA 2014 adalah sebesar Rp1.710.966.445.735,00 yang berarti mencapai 104,18 persen dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp1.642.386.125.000,00. Pendapatan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam TA 2014 serta realisasi TA 2013 adalah sebagai berikut:



	Tahun 2014		Tahun 2013
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1 Pendapatan Asli Daerah	197.093.376.000,00	235.295.346.622,00	143.586.365.567,00
2 Pendapatan Transfer	1.408.160.406.000,00	1.432.450.681.331,00	1.367.441.754.385,00
3 Lain-lain Pendapatan yang Sah	37.132.343.000,00	43.220.417.782,00	38.680.985.165,00
	1.642.386.125.000,00	1.710.966.445.735,00	1.549.709.105.117,00

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) **Rp235.295.346.622,00**

Realisasi PAD pada TA 2014 adalah sebesar Rp235.295.346.622,00 atau mencapai 119,42 persen dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp197.093.376.000,00. PAD terdiri atas Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Perbandingan realisasi PAD dengan anggaran TA 2014 serta realisasi TA 2013 adalah sebagai berikut:

	2014		2013
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Asli Daerah:			
Pendapatan Pajak Daerah	41.314.678.000,00	45.528.787.888,00	42.622.520.501,00
Pendapatan Retribusi Daerah	27.075.486.000,00	28.028.552.159,00	13.579.062.514,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.783.749.000,00	10.886.504.006,00	11.471.523.229,00
Lain-lain PAD yang Sah	117.919.463.000,00	150.851.502.569,00	75.913.259.323,00
	197.093.376.000,00	235.295.346.622,00	143.586.365.567,00

a. Pendapatan Pajak Daerah..... **Rp45.528.787.888,00**

Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Grobogan dikelola oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2014 yang tercapai sebesar Rp45.528.787.888,00 atau mencapai 110,20 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp41.314.678.000,00. Hal ini berarti realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2014 lebih besar Rp2.906.267.387,00 atau 6,82 persen jika dibandingkan dengan realisasi TA 2013. Perbandingan realisasi Pajak Daerah dengan anggaran TA 2014 serta realisasi TA 2013 adalah sebagai berikut:



	2014		2013
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah:			
Pajak Hotel	177.905.800,00	217.262.300,00	170.500.100,00
Pajak Restoran	922.020.920,00	1.222.630.182,00	997.299.900,00
Pajak Hiburan	315.686.750,00	304.133.400,00	329.741.750,00
Pajak Reklame	106.000.000,00	101.466.350,00	105.199.050,00
Pajak Penerangan Jalan	18.000.000.000,00	19.827.823.092,00	17.418.355.256,00
Pajak pengambilan bahan galian golongan C	-	-	1.502.938.640,00
Pajak Parkir	120.000.000,00	103.437.832,00	126.018.400,00
Pajak Air Bawah Tanah	71.953.930,00	77.539.280,00	65.255.200,00
Pajak Sarang Burung Walet	20.699.550,00	40.801.000,00	55.837.500,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	264.059.351,00	437.303.405,00	-
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	18.816.351.699,00	19.901.035.772,00	18.502.196.935,00
Pajak Daerah Lainnya	-	-	3.349.177.770,00
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	2.500.000.000,00	3.295.355.275,00	-
	41.314.678.000,00	45.528.787.888,00	42.622.520.501,00

b. Pendapatan Retribusi Daerah..... Rp28.028.552.159,00

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Pendapatan Retribusi Daerah dikelola oleh masing-masing SKPD penghasil.

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2014 adalah sebesar Rp28.028.552.159,00 atau mencapai 103,52 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp27.075.486.000,00. Hal ini berarti realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2014 lebih tinggi Rp14.449.489.645,00 atau 106,41 persen jika dibandingkan dengan realisasi TA 2013.

Pendapatan Retribusi Daerah terdiri atas Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Anggaran dan realisasi pada TA 2014 untuk masing-masing jenis retribusi serta perbandingannya dengan realisasi pada TA 2013 adalah sebagai berikut:

	2014		2013
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Hasil Retribusi Daerah:			
Retribusi Jasa Umum			
Retribusi Pelayanan Kesehatan	18.717.873.000,00	19.278.827.330,00	4.769.789.459,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	441.890.000,00	363.751.000,00	418.394.500,00
Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	251.785.000,00	251.785.000,00	1.031.965.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	280.000.000,00	287.190.000,00	293.910.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	1.982.747.140,00	2.005.920.420,00	1.962.782.073,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	555.340.000,00	619.811.500,00	596.070.000,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	777.593.000,00	1.103.217.410,00	-
Retribusi Kebersihan Terminal	108.780.000,00	110.206.500,00	108.260.000,00
	23.116.008.140,00	24.020.709.160,00	9.181.171.032,00



	2014		2013
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Hasil Retribusi Daerah:			
Retribusi Jasa Usaha			
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	769.132.000,00	714.455.225,00	735.542.915,00
Retribusi Terminal	438.194.000,00	448.388.100,00	432.781.700,00
Retribusi Tempat Parkir Khusus	240.000.000,00	294.875.000,00	249.160.000,00
Retribusi Penyedotan Kakus	15.700.000,00	770.000,00	9.790.000,00
Retribusi Rumah Potong Hewan	95.000.000,00	95.520.000,00	95.026.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	62.500.000,00	60.114.000,00	69.132.700,00
Retribusi Sewa Laboratorium Kesehatan Hewan	71.193.485,00	76.923.000,00	76.012.000,00
Retribusi Sewa Timbangan Ternak	84.600.000,00	87.268.750,00	86.180.000,00
Retribusi Sewa Kontainer Inseminasi Buatan	215.000.000,00	294.800.000,00	264.400.000,00
Retribusi Sewa Kios/Los Pasar Agro Hortikultura	384.000.000,00	285.255.000,00	492.845.000,00
Retribusi Sewa Mobil Klinik Hewan Keliling	52.500.000,00	52.500.000,00	-
	2.427.819.485,00	2.410.869.075,00	2.510.870.315,00
Retribusi Perizinan Tertentu			
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.000.000.000,00	1.055.781.061,00	1.379.314.879,00
Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	519.833.375,00	529.211.463,00	495.845.088,00
Retribusi Izin Trayek	11.825.000,00	11.981.400,00	11.861.200,00
	1.531.658.375,00	1.596.973.924,00	1.887.021.167,00
Jumlah Hasil Retribusi Daerah	27.075.486.000,00	28.028.552.159,00	13.579.062.514,00

Pendapatan Retribusi Daerah TA 2014 terealisasi sebesar Rp28.028.552.159,00, jika dibandingkan dengan realisasi pada TA 2013 yaitu sebesar Rp13.579.062.514,00, maka mengalami peningkatan sebesar 106,41 persen. Sedangkan untuk retribusi daerah yang mengalami kenaikan adalah retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebesar 141,88 persen; retribusi sewa kontainer inseminasi buatan sebesar 137,12 persen; retribusi tempat khusus parkir sebesar 122,86 persen; retribusi pengujian kendaraan bermotor sebesar 111,61 persen; retribusi sewa laboratorium kesehatan hewan sebesar 108,05 persen; retribusi sewa timbangan ternak sebesar 103,15 persen; retribusi pelayanan kesehatan sebesar 103,00 persen; retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar 102,57 persen; retribusi terminal sebesar 102,33 persen; retribusi kebersihan terminal sebesar 101,31 persen; retribusi pelayanan pasar sebesar 101,17 persen; dan retribusi rumah potong hewan sebesar 100,55 persen.

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang DipisahkanRp10.886.504.006,00

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, merupakan penerimaan PAD yang berasal dari hasil penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan berupa bagian laba dari Badan Usaha Milik Daerah, lembaga keuangan bank dan bukan bank.

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2014 adalah sebesar Rp10.886.504.006,00 atau mencapai 100,95 persen



dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp10.783.749.000,00. Hal ini berarti realisasi TA 2014 lebih kecil (Rp585.019.223,00) atau (5,10) persen dibandingkan dengan realisasi TA 2013.

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dicatat berdasarkan basis kas, yakni diakui seluruhnya sebagai pendapatan atas semua penerimaan ke Kas Daerah pada tahun 2014. Realisasi tersebut berasal dari obyek investasi sebagai berikut:

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:	2014		2013
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
<i>Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD</i>			
Perusda Purwa Aksara	235.000.000,00	270.715.500,00	233.066.500,00
BPR Purwa Artha	903.000.000,00	929.013.200,00	902.805.800,00
BPR BKK	4.061.455.000,00	4.061.455.456,00	3.214.475.881,00
Deviden Bank Jateng	5.061.004.000,00	5.061.004.225,00	3.198.679.498,00
Sharing AMU dan Sharing Cadangan Tujuan dari Bank BPD	-	-	3.766.000.000,00
Deviden PDAM	500.000.000,00	528.491.125,00	-
	10.760.459.000,00	10.850.679.506,00	11.315.027.679,00
<i>Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta</i>			
Bunga PER Koperasi	5.125.000,00	10.625.000,00	12.250.000,00
Bagi Hasil Kredit Ketahanan Pangan	-	-	126.600.000,00
Bunga PER Perindag	18.165.000,00	25.199.500,00	17.645.550,00
	23.290.000,00	35.824.500,00	156.495.550,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10.783.749.000,00	10.886.504.006,00	11.471.523.229,00

d. Lain-lain PAD yang Sah Rp150.851.502.569,00

Lain-lain PAD yang Sah merupakan PAD dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2014 adalah sebesar Rp150.851.502.569,00 atau mencapai 127,92 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp117.919.463.000,00. Hal ini berarti realisasi TA 2014 lebih besar Rp74.937.865.226,00 atau meningkat sebesar 98,76 persen jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2013. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2014 terdiri atas pendapatan sebagai berikut:



	2014		2013
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Lain-lain PAD yang Sah:			
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	1.875.587.000,00	2.181.606.000,00	2.011.764.600,00
Penerimaan Jasa Giro	2.000.000.000,00	3.529.921.372,00	2.537.146.774,00
Penerimaan Bunga Deposito	13.252.542.200,00	20.766.027.116,00	15.016.472.578,00
Tuntutan Ganti Rugi Daerah	-	5.650.000,00	6.650.000,00
Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	-	155.785.800,00	-
Pendapatan dari Pengembalian	-	1.654.698.046,00	1.674.510.777,00
Pendapatan Angsuran/Cicilan Penjualan	765.425.800,00	361.842.750,00	322.657.447,00
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	126.600.000,00	126.600.000,00	-
Pendapatan BLUD	66.282.961.000,00	87.703.601.502,00	54.344.057.147,00
Pendapatan JKN	33.616.347.000,00	34.365.769.983,00	-
	117.919.463.000,00	150.851.502.569,00	75.913.259.323,00

- 1) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp2.181.606.000,00 terdiri atas:
 - a) penjualan kendaraan dinas roda dua sebesar Rp3.660.000,00
 - b) penjualan kendaraan dinas roda empat sebesar Rp46.600.000,00
 - c) penjualan bahan bekas bangunan sebesar Rp69.717.000,00
 - d) penjualan hasil pertanian sebesar Rp75.560.000,00
 - e) penjualan hasil peternakan sebesar Rp94.510.000,00
 - f) penjualan lelangan eks bondo desa sebesar Rp1.806.059.000,00
 - g) penyewaan tanah aset pemerintah kabupaten sebesar Rp85.500.000,00
- 2) Penerimaan jasa giro sebesar Rp3.529.921.372,00 terdiri atas penerimaan jasa giro dan bunga deposito sebagai berikut:
 - a) Jasa giro kas daerah sebesar Rp3.529.921.372,00
 - b) Jasa giro atas rekening bendahara pengeluaran sebesar Rp0,00.
Hal tersebut telah sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dengan PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purwodadi
Nomor 900/03/I/2013
Nomor 041B/HT.01.04/I/2013 tentang Pengelolaan Uang Daerah, yang diantaranya mengatur mekanisme seluruh penerimaan uang daerah yang ada pada rekening giro selanjutnya di debet ke rekening giro kas penerimaan dalam setiap hari kerja.
- 3) Pendapatan dari bunga deposito sebesar Rp20.766.027.116,00 merupakan pendapatan dari penempatan Kas Daerah pada deposito dengan jangka waktu satu bulan. Penempatan dana Kas Daerah dalam bentuk deposito merupakan bagian dari manajemen Kas Daerah yang bertujuan memperoleh hasil maksimal atas kas menganggur (*idle cash*).
- 4) Pendapatan Tuntutan Ganti Rugi Daerah sebesar Rp5.650.000,00 merupakan penerimaan atas kewajiban penyetoran kembali ke Kas Daerah berupa ganti kerugian barang.



- 5) Pendapatan dari pengembalian sebesar Rp1.654.698.046,00 terdiri atas:
- a) penerimaan pengembalian dari PT Taspen sebesar Rp118.041.537,00;
 - b) pendapatan dari pengembalian lainnya sebesar Rp1.536.656.509,00 adalah merupakan realisasi dari penerimaan pendapatan atas temuan pemeriksaan BPK, Inspektorat, klaim denda keterlambatan, setoran atas kelebihan pembayaran belanja tahun sebelumnya, dan pendapatan dari pemindahan rekening PFK (retensi pemeliharaan yang tidak dilaksanakan oleh pihak ketiga sebesar Rp205.209.725,00 dan pemindahan rekening PFK atas Askes Puskesmas sebesar Rp112.187.500,00).
- 6) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan sebesar Rp361.842.750,00 merupakan angsuran biaya konstruksi kios pasar.
- 7) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebesar Rp126.600.000,00 merupakan bagi hasil kredit ketahanan pangan.
- 8) Pendapatan BLUD sebesar Rp87.703.601.502,00 merupakan pendapatan layanan pada RSUD dr. R.Soedjati Purwodadi.
- 9) Pendapatan JKN sebesar Rp34.365.769.983,00 merupakan pendapatan layanan pada Puskesmas sesuai Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah daerah.

2. Pendapatan Transfer Rp1.432.450.681.331,00

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2014 adalah sebesar Rp1.432.450.681.331,00 yang berarti mencapai 101,72 persen dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp1.408.160.406.000,00. Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Pemerintah Provinsi.

Realisasi pendapatan transfer TA 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

	2014		2013
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Transfer			
Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan	1.108.079.641.000,00	1.130.745.214.336,00	1.074.895.578.793,00
Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya	221.326.331.000,00	221.326.331.000,00	217.919.024.000,00
Transfer Pemerintah Provinsi	78.754.434.000,00	80.379.135.995,00	74.627.151.592,00
Jumlah	1.408.160.406.000,00	1.432.450.681.331,00	1.367.441.754.385,00

**a. Dana Perimbangan Rp1.130.745.214.336,00**

Dana Perimbangan terdiri atas Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus dengan rincian sebagai berikut:

	2014		2013
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan:			
Dana Bagi Hasil Pajak	35.674.534.183,00	58.209.904.563,00	62.390.180.431,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	8.890.904.817,00	9.021.107.773,00	1.534.593.362,00
Dana Alokasi Umum	977.675.512.000,00	977.675.512.000,00	906.666.365.000,00
Dana Alokasi Khusus	85.838.690.000,00	85.838.690.000,00	104.304.440.000,00
Jumlah	1.108.079.641.000,00	1.130.745.214.336,00	1.074.895.578.793,00

1) Bagi Hasil Pajak Rp58.209.904.563,00

Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat terdiri atas Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh), dan Bagi Hasil Cukai Tembakau dengan rincian sebagai berikut:

	2014		2013
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Dana Perimbangan-Bagi Hasil Pajak			
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	20.655.634.087,00	28.419.872.928,00	36.119.204.276,00
Bagi Hasil dari PPH 21, 25, 29	13.711.305.576,00	10.463.035.630,00	11.651.315.058,00
Pengembalian Upah Pungut PBB	1.307.594.520,00	-	3.850.795.954,00
Bagi Hasil dari Pajak Rokok	-	19.326.996.005,00	8.564.348.061,00
Penerimaan PBB bagi pemerintah pusat yg dibagikan kpd kabupaten/kota	-	-	3.204.517.082,00
Jumlah	35.674.534.183,00	58.209.904.563,00	63.390.180.431,00

2) Bagi Hasil Bukan Pajak Rp9.021.107.773,00

Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri atas Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam, dengan rincian sebagai berikut:

	2014		2013
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Dana Perimbangan-Bagi Hasil Bukan Pajak:			
Bagi hasil dari provisi sumber daya hutan	2.003.479.279,00	1.798.318.106,00	1.004.037.481,00
Bagi hasil dari eksplorasi dan eksploitasi (Royalti)	2.685.600,00	-	79.039.590,00
Bagi Hasil dari pungutan hasil perikanan	402.414.486,00	383.182.410,00	-
Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi	298.993.114,00	237.468.039,00	67.627.825,00
Bagi hasil dari pertambangan gas bumi	36.064.000,00	56.578.713,00	31.085.055,00
Bagi hasil dari pertambangan panas bumi	13.602.070,00	13.602.070,00	-
Bagi Hasil dari Pertambangan Umum	123.935.268,00	91.481.558,00	5.394.538,00
Bagi Hasil dari SDA Perikanan	-	-	347.408.873,00
Bagi Hasil Cukai Tembakau	6.009.731.000,00	6.440.476.877,00	-
Jumlah	8.890.904.817,00	9.021.107.773,00	1.534.593.362,00

3) Dana Alokasi Umum (DAU) Rp977.675.512.000,00

DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-



daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Alokasi DAU TA 2014 untuk Kabupaten Grobogan telah diterima seluruhnya pada TA 2014.

4) Dana Alokasi Khusus (DAK)..... Rp85.838.690.000,00

DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Penerimaan DAK pada TA 2014 sebesar Rp85.838.690.000,00 dialokasikan untuk bidang-bidang sebagai berikut:

<i>Dana Alokasi Khusus</i>	2014		2013
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Bidang Pendidikan	43.355.530.000,00	43.355.530.000,00	68.360.140.000,00
Bidang Kesehatan	7.900.910.000,00	7.900.910.000,00	7.359.570.000,00
Bidang Infrastruktur Jalan	8.891.410.000,00	8.891.410.000,00	7.706.290.000,00
Bidang Infrastruktur Irigasi	4.791.840.000,00	4.791.840.000,00	4.621.490.000,00
Bidang Infrastruktur Air Minum	2.727.820.000,00	2.727.820.000,00	1.414.540.000,00
Bidang Infrastruktur Sanitasi	985.610.000,00	985.610.000,00	1.377.600.000,00
Bidang Kelautan dan Perikanan	1.864.340.000,00	1.864.340.000,00	1.975.110.000,00
Bidang Pertanian	11.072.690.000,00	11.072.690.000,00	6.456.420.000,00
Bidang Lingkungan Hidup	1.485.150.000,00	1.485.150.000,00	1.529.780.000,00
Bidang Keluarga Berencana	1.226.960.000,00	1.226.960.000,00	1.145.970.000,00
Bidang Kehutanan	1.097.620.000,00	1.097.620.000,00	1.134.990.000,00
Bidang Perdagangan	-	-	807.030.000,00
Bidang Transportasi Darat	438.810.000,00	438.810.000,00	415.510.000,00
Jumlah	85.838.690.000,00	85.838.690.000,00	104.304.440.000,00

b. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya..... Rp221.326.331.000,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya terdiri atas Pendapatan Dana Penyesuaian untuk pemberian tambahan penghasilan bagi guru PNS dan penerimaan tunjangan profesi guru, sebagai berikut:

- 1) Penerimaan untuk tambahan penghasilan bagi guru PNS sebesar Rp2.487.000.000,00.
- 2) Penerimaan untuk tunjangan profesi guru PNS sebesar Rp218.839.331.000,00.

c. Transfer Pemerintah Provinsi Rp80.379.135.995,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi pada TA 2014 adalah sebesar Rp80.379.135.995,00 yang berarti mencapai 102,06 persen dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp78.754.434.000,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi terdiri



atas Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Lain-lain dari Provinsi, dengan perincian sebagai berikut:

	2014		2013
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Transfer Pemerintah Provinsi:			
Bagi Hasil Pajak:			
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	22.557.599.000,00	20.852.550.671,00	20.130.815.772,00
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	31.978.867.000,00	30.598.862.206,00	30.939.108.604,00
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	23.848.850.000,00	28.718.911.189,00	23.328.228.644,00
Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	264.370.000,00	208.811.929,00	228.998.572,00
	78.649.686.000,00	80.379.135.995,00	74.627.151.592,00
Bagi Hasil Lainnya:			
Bagi Hasil Penerimaan Lain-lain SP3 dari Perhutani	104.748.000,00	-	-
Bagi Hasil Penerimaan Lain-lain SP3 dari Provinsi	-	-	-
	104.748.000,00	-	-
Jumlah	78.754.434.000,00	80.379.135.995,00	74.627.151.592,00

3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah **Rp43.220.417.782,00**

Lain-lain Pendapatan Yang Sah adalah penerimaan daerah selain yang telah dikelompokkan di atas, dengan realisasi pada TA 2014 dan 2013 sebagai berikut:

	2014		2013
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Lain-lain Pendapatan yang Sah:			
Hibah dari LOAN WISMP 2	1.177.976.000,00	1.063.605.300,00	1.099.143.300,00
Hibah dari AUSAID utk PDAM	3.000.000.000,00	1.586.000.000,00	-
Bantuan Keuangan dari Provinsi	32.954.367.000,00	40.570.812.482,00	37.581.841.865,00
Jumlah	37.132.343.000,00	43.220.417.782,00	38.680.985.165,00

- Hibah Daerah dari LOAN WISMP 2, merupakan hibah untuk kegiatan *Water Resources and Irrigation Sector Management Program 2* berdasarkan Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Grobogan Nomor PHD-039/PK/2012, Tanggal 27 Pebruari 2012. Tujuan Dana Hibah dipergunakan untuk membiayai peningkatan pengelolaan sumber daya air wilayah sungai dan pengelolaan irigasi partisipatif yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Grobogan.
- Hibah dari AUSAID untuk PDAM, sesuai perjanjian antara Bupati Grobogan dengan Menteri Keuangan Nomor PPH-57/PK/2013 Tanggal 13 Juli 2013, yaitu hibah diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk pengadaan sambungan air bersih.



- Bantuan Keuangan Provinsi. Pada tahun 2014 APBD Perubahan untuk bantuan keuangan dari provinsi sebesar Rp32.954.367.000,00, sedangkan realisasi yang diterima Kabupaten Grobogan sebesar Rp40.570.812.482,00 sehingga terjadi realisasi lebih terhadap anggaran sebesar Rp7.616.445.482,00. Hal ini terjadi karena berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Provinsi Nomor:4998/DPPA/2014, Pemerintah Kabupaten Grobogan mendapat alokasi bantuan keuangan sebesar Rp52.940.475.000,00, namun karena penetapan APBD Perubahan Kabupaten Grobogan TA.2014 telah ditetapkan terlebih dahulu maka alokasi bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah tersebut tidak dapat tertampung pada Perda APBD Perubahan TA 2014, sehingga realisasi pendapatannya melebihi anggaran perubahan. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

NO	URAIAN	APBD PERUBAHAN KAB. GROBOGAN TA.2014	APBD PERUBAHAN PROV. JATENG TA.2014	REALISASI ANGGARAN	LEBIH/(KURANG) REALISASI TERHADAP APBD PERUBAHAN KAB. GROBOGAN TA.2014
1	Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Umum dari Retribusi Daerah Tera dan Tera Ulang	57.752.000,00	98.711.000,00	79.048.482	21.296.482,00
2	Bant. Keu. Bersifat umum untuk SP3 kayu	-	25.149.000,00	25.149.000,00	25.149.000,00
3	FEDEP	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000	-
4	TMMD Sengkuyung	330.000.000,00	330.000.000,00	330.000.000	-
5	Profil Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000	-
6	Primatani Berbasis Pekarangan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000	-
7	Pendidikan Untuk Semua (PUS)	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000	-
8	Bantuan Sarana Prasarana	17.351.000.000,00	36.421.000.000,00	24.071.000.000	6.720.000.000,00
9	Bantuan Pendidikan	14.925.615.000,00	15.775.615.000,00	15.775.615.000	850.000.000,00
	JUMLAH	32.954.367.000,00	52.940.475.000,00	40.570.812.482	7.616.445.482,00

B. BELANJA **Rp1.645.804.824.542,00**

Realisasi Belanja pada TA 2014 adalah sebesar Rp1.645.804.824.542,00 yang berarti mencapai 92,03 persen dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp1.788.253.908.250,00.

Belanja dikelompokkan menjadi 3 klasifikasi, yaitu (1) Belanja menurut Organisasi; (2) Belanja menurut Fungsi; dan (3) Belanja menurut Jenis Belanja (Ekonomi).

Belanja Menurut Organisasi (SKPD)

Realisasi Belanja pada TA 2014 menurut organisasi terbesar adalah pada Dinas Pendidikan sebesar Rp690.308.758.407,00 atau 41,94 persen dari total Belanja Pemerintah Daerah. Berikut komposisi 5 (lima) terbesar SKPD Pengguna Anggaran Belanja TA 2014 adalah:

1. Dinas Pendidikan sebesar Rp690.308.758.407,00 atau 41,94 persen dari total realisasi Belanja Pemerintah Daerah.
2. Dinas Bina Marga sebesar Rp134.281.031.436,00 atau 8,16 persen dari total realisasi Belanja Pemerintah Daerah.
3. Dinas Kesehatan sebesar Rp91.626.535.744,00 atau 5,57 persen dari total realisasi Belanja Pemerintah Daerah.



4. Dinas Pengairan sebesar Rp77.718.835.637,00 atau 4,72 persen dari total realisasi Belanja Pemerintah Daerah.
5. Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan sebesar Rp57.413.631.486,00 atau 3,49 persen dari total realisasi Belanja Pemerintah Daerah.

Belanja Menurut Fungsi

Klasifikasi belanja menurut fungsi merupakan perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Belanja menurut Fungsi terbagi dalam 9 (sembilan) fungsi, yaitu fungsi pelayanan umum, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial.

Anggaran dan realisasi Belanja per fungsi pada TA 2014 dan TA 2013 adalah sebagai berikut:

<i>Uraian Fungsi</i>	2014		2013
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Pelayanan Umum	318.635.398.967,00	290.464.082.807,00	236.050.782.767,00
Ketertiban dan Keamanan	8.698.832.495,00	7.283.275.022,00	7.603.370.727,00
Ekonomi	122.947.746.851,00	124.513.258.616,00	94.112.499.831,00
Lingkungan Hidup	17.382.844.563,00	13.981.347.794,00	9.574.435.432,00
Perumahan dan Fasilitas Umum	278.189.897.344,00	262.574.901.574,00	233.123.681.433,00
Kesehatan	242.368.911.406,00	220.052.356.398,00	165.994.396.383,00
Pariwisata dan Budaya	2.305.000.000,00	2.194.659.000,00	1.626.027.000,00
Pendidikan	773.047.285.921,00	700.969.023.745,00	737.294.410.435,00
Perlindungan Sosial	24.677.990.703,00	23.771.919.586,00	22.569.593.409,00
Jumlah	1.788.253.908.250,00	1.645.804.824.542,00	1.507.949.197.417,00

Belanja Menurut Jenis Belanja

Berdasarkan jenisnya, Belanja terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga (BTT). Perbandingan antara anggaran dan realisasi Belanja TA 2014 serta realisasi TA 2013 adalah sebagai berikut:

<i>Belanja Daerah:</i>	2014		2013
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Operasi	1.447.096.476.246,00	1.345.282.641.875,00	1.152.075.997.708,00
Belanja Modal	338.657.432.004,00	300.522.182.667,00	353.074.204.294,00
Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00	-	358.580.415,00
Transfer ke Desa	-	-	2.440.420.000,00
	1.788.253.908.250,00	1.645.804.824.542,00	1.507.949.202.417,00

Belanja Operasi..... Rp1.345.282.641.875,00

Belanja Operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek.



Realisasi Belanja Operasi TA 2014 adalah sebesar Rp1.345.282.641.875,00 yang berarti mencapai 92,96 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp1.447.096.476.246,00. Belanja Operasi terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Bantuan Keuangan dengan rincian sebagai berikut:

	2014		2013
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Operasi:			
Belanja Pegawai	946.283.203.516,00	879.415.011.197,00	816.864.175.577,00
Belanja Barang	301.723.558.482,00	276.939.441.264,00	197.932.427.555,00
Belanja Bunga	47.205.000,00	24.948.302,00	35.959.948,00
Belanja Subsidi	428.500.000,00	428.500.000,00	428.500.000,00
Belanja Hibah	105.995.429.048,00	101.634.714.677,00	90.096.112.488,00
Belanja Bantuan Sosial	9.620.293.700,00	7.813.425.000,00	12.807.409.550,00
Belanja Bantuan Keuangan	82.998.286.500,00	79.026.601.435,00	33.911.412.590,00
	1.447.096.476.246,00	1.345.282.641.875,00	1.152.075.997.708,00

a. Belanja Pegawai..... Rp879.415.011.197,00

Realisasi Belanja Pegawai TA 2014 adalah sebesar Rp879.415.011.197,00 yang berarti mencapai 92,93 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp946.283.203.516,00. Hal ini berarti Belanja Pegawai lebih besar Rp62.550.835.620,00 atau 7,66 persen dari realisasi TA 2013.

Belanja pegawai terdiri atas Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Belanja Pegawai:	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)	%
Belanja Tidak Langsung:					
Gaji dan Tunjangan	605.290.499.055,00	583.480.031.775,00	96,40	(21.810.467.280,00)	(3,60)
Tambahan Penghasilan PNS	287.395.716.095,00	246.145.468.617,00	85,65	(41.250.247.478,00)	(14,35)
Belanja Lain Pimpinan dan anggota DPRD serta KDHWKDH	4.180.000.000,00	4.161.100.000,00	99,55	(18.900.000,00)	(0,45)
Biaya Pemungutan Pajak dan Retribusi	2.065.733.900,00	1.974.278.642,00	95,57	(91.455.258,00)	(4,43)
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	437.313.700,00	357.018.263,00	81,64	(80.295.437,00)	(18,36)
Jumlah	899.369.262.750,00	836.117.897.297,00	92,97	(63.251.365.453,00)	(7,03)
Belanja Langsung:					
Honorarium PNS	17.976.519.016,00	16.507.492.450,00	91,83	(1.469.026.566,00)	(8,17)
Honorarium Non PNS	23.472.811.250,00	22.404.086.950,00	95,45	(1.068.724.300,00)	(4,55)
Uang Lembur	47.840.000,00	45.904.000,00	95,95	(1.936.000,00)	(4,05)
Uang untuk diberikan ke pihak ketiga/masyarakat	1.035.000.000,00	611.000.000,00	59,03	(424.000.000,00)	(40,97)
Belanja Pegawai BLUD	4.381.770.500,00	3.728.630.500,00	85,09	(653.140.000,00)	(14,91)
Jumlah	46.913.940.766,00	43.297.113.900,00	92,29	(3.616.826.866,00)	(7,71)
Jumlah Belanja Pegawai	946.283.203.516,00	879.415.011.197,00	92,93	(66.868.192.319,00)	(7,07)



- a. Realisasi belanja Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp246.145.468.617,00 terdiri atas tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebesar Rp18.260.969.277,00; tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebesar Rp2.558.850.000,00; tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebesar Rp91.800.000,00; tambahan penghasilan bagi guru PNS sebesar Rp2.028.812.500,00; dan tunjangan sertifikasi profesi guru sebesar Rp223.205.036.840,00.
- b. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat sebesar Rp611.000.000,00 terdiri atas uang untuk diberikan kepada pihak ketiga sebesar Rp59.400.000,00; uang untuk diberikan kepada masyarakat sebesar Rp263.300.000,00 dan untuk diberikan kepada pelajar/siswa berprestasi sebesar Rp288.300.000,00.

b. Belanja Barang Rp276.939.441.264,00

Realisasi Belanja Barang TA 2014 adalah sebesar Rp276.939.441.264,00 yang berarti mencapai 91,78 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp301.723.558.482,00. Hal ini berarti Belanja Barang lebih besar Rp79.007.013.709,00 atau 39,92 persen jika dibandingkan dengan realisasi TA 2013. Belanja Barang terdiri atas belanja sebagai berikut:

<i>Belanja Barang:</i>	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)	%
Belanja Bahan Pakai Habis	16.433.267.830,00	13.726.885.562,00	83,53	(2.706.382.268,00)	(16,47)
Belanja Bahan/Material	15.320.011.669,00	11.655.769.245,00	76,08	(3.664.242.424,00)	(23,92)
Belanja Jasa Kantor	60.929.120.738,00	57.848.225.517,00	94,94	(3.080.895.221,00)	(5,06)
Belanja Premi Asuransi	407.000.000,00	333.462.293,00	81,93	(73.537.707,00)	(18,07)
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.717.577.000,00	4.012.212.171,00	85,05	(705.364.829,00)	(14,95)
Belanja Cetak Dan Penggandaan	11.752.537.025,00	10.498.654.863,00	89,33	(1.253.882.162,00)	(10,67)
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.031.987.056,00	1.639.630.236,00	80,69	(392.356.820,00)	(19,31)
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.323.300.000,00	1.199.428.800,00	90,64	(123.871.200,00)	(9,36)
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.848.703.500,00	1.741.674.000,00	94,21	(107.029.500,00)	(5,79)
Belanja Makanan Dan Minuman	20.128.767.200,00	18.772.878.305,00	93,26	(1.355.888.895,00)	(6,74)
Belanja Pakaian Dinas dan	1.338.261.000,00	1.229.130.000,00	91,85	(109.131.000,00)	(8,15)
Belanja Pakaian Kerja	858.998.000,00	845.646.000,00	98,45	(13.352.000,00)	(1,55)
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	6.559.323.000,00	6.054.090.450,00	92,30	(505.232.550,00)	(7,70)
Belanja Perjalanan Dinas	49.670.211.314,00	41.492.335.466,00	83,54	(8.177.875.848,00)	(16,46)
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	827.000.000,00	827.000.000,00	100,00	-	-
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	6.724.170.000,00	5.769.554.757,00	85,80	(954.615.243,00)	(14,20)
Belanja Pemeliharaan	24.266.981.750,00	23.611.686.866,00	97,30	(655.294.884,00)	(2,70)
Belanja Jasa Konsultansi	5.653.325.000,00	4.566.465.560,00	80,77	(1.086.859.440,00)	(19,23)
Belanja Barang dan Jasa BLUD	70.535.245.500,00	70.917.242.173,00	100,54	381.996.673,00	0,54
Belanja Barang dan Perlengkapan Kantor dibawah Kapitalisasi	356.770.900,00	162.203.000,00	45,46	-	-
Belanja Harga Perolehan	41.000.000,00	35.266.000,00	86,01	-	-
Jumlah Belanja Barang	301.723.558.482,00	276.939.441.264,00	91,79	(24.583.815.318,00)	(8,15)



Belanja Jasa Kantor pada rincian Belanja Barang dan Jasa tersebut termasuk Belanja Jasa Kantor di BLUD dengan anggaran sebesar Rp70.535.245.500,00 realisasinya sebesar Rp70.917.242.173,00. Sedangkan Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp65.563.478.467,00 berasal dari sumber dana Pendapatan Operasional BLUD.

c. Belanja Bunga..... Rp24.948.302,00

Realisasi Belanja Bunga sebesar Rp24.948.302,00 merupakan pembayaran bunga pinjaman kepada ADB-LOAN.

d. Belanja Subsidi Rp428.500.000,00

Belanja Subsidi sebesar Rp428.500.000,00 merupakan belanja subsidi kepada perusahaan/lembaga untuk subsidi pasar murah bagi masyarakat dengan rincian sebagai berikut:

No	URAIAN	PERUSAHAAN/LEMBAGA	JUMLAH (Rp)
1	Subsidi pengadaan beras pasar murah	KUD. Mulyo Jati, Kedungjati	16.200.000,00
2	Subsidi pengadaan minyak goreng pasar murah	UD. Harapan Mandiri, Purwodadi	66.400.000,00
3	Subsidi pengadaan telur pasar murah	CV. Usaha Bersama, Purwodadi	27.000.000,00
4	Subsidi pengadaan beras pasar murah	UD. DM. Putra, Kalongan, Purwodadi	48.600.000,00
5	Subsidi pasar murah	Agung Toko Pojok, Panunggalan, Pulokulon	173.100.000,00
6	Subsidi pengadaan beras pasar murah	UD. Heri Mukti, Tanjungharjo	48.600.000,00
7	Subsidi pengadaan beras pasar murah	UD. Putra Kembar, Nambuhan, Purwodadi	48.600.000,00
JUMLAH			428.500.000,00

e. Belanja Hibah Rp101.634.714.677,00

Hibah merupakan pemberian uang/barang atau jasa kepada penerima yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Pengelolaan hibah diatur melalui Keputusan Bupati Grobogan Nomor 900/701 Tahun 2014 tentang Penerimaan Serta Besaran Uang Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2014.

No	Bentuk Hibah	Realisasi (Rp)
1	Uang	31.803.253.608,00
2	Barang/Jasa	69.831.461.069,00
	Jumlah	101.634.714.677,00

Realisasi hibah tahun anggaran 2014 terdiri atas:

1. Hibah berupa uang sebesar Rp31.803.253.608,00; melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) terdiri dari:



- Belanja hibah kepada pemerintah desa, untuk lumbung desa sebesar Rp480.000.000,00
- Belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi sebesar Rp3.056.540.000,00
- Belanja hibah kepada kelompok/anggota masyarakat sebesar Rp28.266.713.608,00

2. Hibah berupa barang/jasa dan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp69.831.461.069,00. Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) belanja langsung SKPD yang berupa belanja hibah barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat dianggarkan dalam kelompok Belanja Barang namun untuk kepentingan penyajian laporan keuangan disajikan dalam kelompok Belanja Hibah.

Hibah berupa barang/jasa dan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat dilaksanakan oleh SKPD sebagai berikut:

No.	SKPD	Barang yg diserahkan ke masyarakat (Rp)	Barang yg akan dijual ke masyarakat (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan	13.933.101.709		13.933.101.709
2	Cipta Karya TRK	2.966.850.000		2.966.850.000
3	Dinas Pengairan	4.839.062.850		4.839.062.850
4	Badan Lingkungan Hidup	12.500.000		12.500.000
5	BP3AKB	62.059.500		62.059.500
6	Dinsosnakertrans	446.950.000		446.950.000
7	Koperasi UMKM	121.500.000		121.500.000
8	Disporabudpar	132.000.000		132.000.000
9	Sekretariat Daerah	1.965.454.050		1.965.454.050
10	Kelurahan Kunden	10.800.000		10.800.000
11	BPBD	865.391.500		865.391.500
12	Badan Ketahanan Pangan	3.464.479.500		3.464.479.500
13	Badan Pemberdayaan Masyarakat	3.020.203.550		3.020.203.550
14	Perpustakaan	146.911.000		146.911.000
15	Distan TPH	22.234.182.500	83.702.500	22.317.885.000
16	Disnakan	10.610.510.050		10.610.510.050
17	Dishutbun	4.559.815.860		4.559.815.860
18	Disperindagtamben	355.986.500		355.986.500
JUMLAH		69.747.758.569	83.702.500	69.831.461.069

f. Belanja Bantuan Sosial..... Rp7.813.425.000,00

Bantuan bantuan sosial dimaksudkan untuk meningkatkan status sosial masyarakat baik secara langsung kepada anggota masyarakat maupun melalui kelompok dan organisasi kemasyarakatan di bidang pendidikan, keagamaan, kesehatan, pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, serta kelompok sosial lainnya.

Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Pengelolaan bantuan sosial diatur melalui Keputusan Bupati Grobogan Nomor 900/701 Tahun 2014 tentang Penerimaan Serta Besaran Uang Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2014.



Realisasi bantuan sosial terdiri atas:

1. Bantuan sosial berupa uang melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) untuk Bantuan Sosial Kepada Individu sebesar Rp408.000.000,00.
2. Bantuan Sosial berupa uang melalui DPA PPKD untuk Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp6.799.171.000,00.
3. Bantuan Sosial berupa uang melalui DPA PPKD untuk Bantuan Sosial Kepada Masyarakat sebesar Rp161.300.000,00.
4. Bantuan Sosial berupa barang sebesar Rp444.954.000,00 melalui DPA SKPD yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat dengan pelaksanaan SKPD sebagaimana tabel berikut:

No	SKPD	JUMLAH (Rp)
1	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	17.437.500,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	369.476.500,00
3	Badan Ketahanan Pangan	58.040.000,00
JUMLAH		444.954.000,00

g. Belanja Bantuan Keuangan Rp79.026.601.435,00

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2014 adalah sebesar Rp79.026.601.435,00 yang berarti mencapai 95,21 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp82.998.286.500,00. Hal ini berarti Belanja Bantuan Keuangan lebih besar Rp45.115.188.845,00 atau 133,04 persen jika dibandingkan dengan realisasi TA 2013.

Anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2014 adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)	%
Bantuan keuangan kepada desa	81.998.286.500,00	78.095.719.250,00	95,24	(3.902.567.250,00)	(4,76)
Bantuan keuangan kepada desa yang bersifat umum	19.800.300.000,00	19.728.200.000,00	99,64	(72.100.000,00)	(0,36)
Bantuan keuangan kepada desa yang bersifat khusus untuk percepatan pembangunan	42.303.764.000,00	38.943.764.000,00	92,06	(3.360.000.000,00)	(7,94)
Bantuan keuangan kepada desa yang bersifat khusus untuk pemberdayaan masyarakat desa	19.894.222.500,00	19.423.755.250,00	97,64	(470.467.250,00)	(2,36)
Bantuan keuangan kepada partai politik	1.000.000.000,00	930.882.185,00	93,09	(69.117.815,00)	(6,91)
Jumlah	82.998.286.500,00	79.026.601.435,00	95,21	(7.874.252.315,00)	(9,49)



1) Belanja bantuan keuangan kepada desa sebesar Rp78.095.719.250,00. Tata cara pemberian berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa, terdiri atas pengeluaran-pengeluaran sebagai berikut:

a. Bantuan keuangan kepada desa yang bersifat umum sebesar Rp19.728.200.000,00 terdiri dari:

- ADD sebesar Rp18.928.200.000,00
- Bantuan Desa Kurang Hasil sebesar Rp800.000.000,00

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

No.	Kecamatan	Realisasi		Jumlah (Rp)
		ADD	Desa Kurang Hasil	
1	Brati	659.900.000,00	72.500.000,00	732.400.000,00
2	Gabus	1.012.800.000,00	60.000.000,00	1.072.800.000,00
3	Geyer	982.600.000,00	125.000.000,00	1.107.600.000,00
4	Godong	1.755.000.000,00	15.000.000,00	1.770.000.000,00
5	Grobogan	782.600.000,00	20.000.000,00	802.600.000,00
6	Gubug	1.356.800.000,00	25.000.000,00	1.381.800.000,00
7	Karangrayung	1.421.200.000,00	107.500.000,00	1.528.700.000,00
8	Kedungjati	822.500.000,00	175.000.000,00	997.500.000,00
9	Klambu	585.000.000,00	-	585.000.000,00
10	Kradenan	988.000.000,00	40.000.000,00	1.028.000.000,00
11	Ngaringan	870.200.000,00	-	870.200.000,00
12	Penawangan	1.291.500.000,00	20.000.000,00	1.311.500.000,00
13	Pulokulon	941.100.000,00	10.000.000,00	951.100.000,00
14	Purwodadi	871.600.000,00	-	871.600.000,00
15	Tanggungharjo	624.600.000,00	20.000.000,00	644.600.000,00
16	Tawangharjo	711.000.000,00	25.000.000,00	736.000.000,00
17	Tegowanu	1.168.400.000,00	45.000.000,00	1.213.400.000,00
18	Toroh	1.205.900.000,00	7.500.000,00	1.213.400.000,00
19	Wirosari	877.500.000,00	32.500.000,00	910.000.000,00
	TOTAL	18.928.200.000,00	800.000.000,00	19.728.200.000,00

b. Bantuan keuangan kepada desa yang bersifat khusus untuk percepatan pembangunan desa sebesar Rp38.943.764.000,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

No	KECAMATAN	JUMLAH DPA	REALISASI (Rp)
1	Brati	2.765.000.000,00	1.765.000.000,00
2	Gabus	2.260.000.000,00	2.260.000.000,00
3	Geyer	3.150.000.000,00	3.050.000.000,00
4	Godong	2.485.764.000,00	2.485.764.000,00
5	Grobogan	3.005.000.000,00	3.005.000.000,00
6	Gubug	1.734.000.000,00	1.484.000.000,00
7	Karangrayung	2.800.000.000,00	2.800.000.000,00
8	Kedungjati	905.000.000,00	715.000.000,00
9	Klambu	2.465.000.000,00	1.665.000.000,00
10	Kradenan	1.017.000.000,00	1.017.000.000,00
11	Ngaringan	1.570.000.000,00	1.570.000.000,00
12	Penawangan	2.384.000.000,00	2.384.000.000,00
13	Pulokulon	1.535.000.000,00	1.415.000.000,00
14	Purwodadi	2.425.000.000,00	1.525.000.000,00
15	Tanggungharjo	1.548.000.000,00	1.548.000.000,00
16	Tawangharjo	2.400.000.000,00	2.300.000.000,00
17	Tegowanu	2.320.000.000,00	2.320.000.000,00
18	Toroh	4.560.000.000,00	4.560.000.000,00
19	Wirosari	1.075.000.000,00	1.075.000.000,00
	JUMLAH	42.403.764.000,00	38.943.764.000,00



- c. Bantuan keuangan kepada desa yang bersifat khusus untuk pemberdayaan masyarakat desa sebesar Rp19.423.755.250,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Pemberdayaan pembangunan jalan desa sebesar Rp5.000.000.000,00, dengan rincian sebagaimana dalam tabel berikut:

No	KECAMATAN	JUMLAH DPA	REALISASI (Rp)
1	Brati	200.000.000,00	200.000.000,00
2	Gabus	400.000.000,00	400.000.000,00
3	Geyer	200.000.000,00	200.000.000,00
4	Godong	400.000.000,00	400.000.000,00
5	Grobogan	300.000.000,00	300.000.000,00
6	Gubug	300.000.000,00	300.000.000,00
7	Karangrayung	300.000.000,00	300.000.000,00
8	Kedungjati	200.000.000,00	200.000.000,00
9	Klambu	200.000.000,00	200.000.000,00
10	Kradenan	300.000.000,00	300.000.000,00
11	Ngarigan	200.000.000,00	200.000.000,00
12	Penawangan	400.000.000,00	400.000.000,00
13	Pulokulon	400.000.000,00	400.000.000,00
14	Purwodadi	100.000.000,00	100.000.000,00
15	Tanggungharjo	200.000.000,00	200.000.000,00
16	Tawangharjo	300.000.000,00	300.000.000,00
17	Tegowanu	200.000.000,00	200.000.000,00
18	Toroh	200.000.000,00	200.000.000,00
19	Wirosari	200.000.000,00	200.000.000,00
	JUMLAH	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00

- Bantuan untuk TPAPD sebesar Rp10.131.925.000,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

No	KECAMATAN	JUMLAH DPA	REALISASI (Rp)
1	Brati	563.700.000,00	550.225.000,00
2	Gabus	549.300.000,00	535.500.000,00
3	Geyer	1.689.300.000,00	1.628.425.000,00
4	Godong	527.400.000,00	520.650.000,00
5	Grobogan	409.500.000,00	400.225.000,00
6	Gubug	358.800.000,00	355.675.000,00
7	Karangrayung	1.436.400.000,00	1.383.225.000,00
8	Kedungjati	466.200.000,00	459.450.000,00
9	Klambu	131.100.000,00	130.350.000,00
10	Kradenan	457.800.000,00	454.925.000,00
11	Ngarigan	301.200.000,00	292.125.000,00
12	Penawangan	599.400.000,00	588.225.000,00
13	Pulokulon	394.800.000,00	358.725.000,00
14	Purwodadi	222.900.000,00	218.650.000,00
15	Tanggungharjo	228.300.000,00	227.675.000,00
16	Tawangharjo	394.800.000,00	391.300.000,00
17	Tegowanu	509.400.000,00	502.400.000,00
18	Toroh	527.100.000,00	522.325.000,00
19	Wirosari	620.100.000,00	611.850.000,00
	JUMLAH	10.387.500.000,00	10.131.925.000,00



- Bantuan untuk kegiatan BPD sebesar Rp272.000.000,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

No	KECAMATAN	JUMLAH DPA	REALISASI (Rp)
1	Kecamatan Brati	9.000.000,00	9.000.000,00
2	Kecamatan Gabus	14.000.000,00	14.000.000,00
3	Kecamatan Geyer	13.000.000,00	13.000.000,00
4	Kecamatan Godong	28.000.000,00	28.000.000,00
5	Kecamatan Grobogan	11.000.000,00	11.000.000,00
6	Kecamatan Gubug	21.000.000,00	21.000.000,00
7	Kecamatan Karangrayung	19.000.000,00	19.000.000,00
8	Kecamatan Kedungjati	12.000.000,00	12.000.000,00
9	Kecamatan Klambu	9.000.000,00	9.000.000,00
10	Kecamatan Kradenan	14.000.000,00	14.000.000,00
11	Kecamatan Ngarigan	12.000.000,00	12.000.000,00
12	Kecamatan Penawangan	20.000.000,00	20.000.000,00
13	Kecamatan Pulokulon	13.000.000,00	12.000.000,00
14	Kecamatan Purwodadi	13.000.000,00	13.000.000,00
15	Kecamatan Tanggunharjo	9.000.000,00	9.000.000,00
16	Kecamatan Tawangharjo	10.000.000,00	10.000.000,00
17	Kecamatan Tegowanu	18.000.000,00	18.000.000,00
18	Kecamatan Toroh	16.000.000,00	16.000.000,00
19	Kecamatan Wirosari	12.000.000,00	12.000.000,00
	JUMLAH	273.000.000,00	272.000.000,00

- Bantuan untuk penunjang kegiatan RT/RW sebesar Rp2.249.450.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	KECAMATAN	JUMLAH DPA	REALISASI (Rp)
1	Kecamatan Brati	70.050.000,00	70.050.000,00
2	Kecamatan Gabus	133.550.000,00	133.550.000,00
3	Kecamatan Geyer	126.650.000,00	126.650.000,00
4	Kecamatan Godong	127.950.000,00	127.950.000,00
5	Kecamatan Grobogan	109.600.000,00	109.600.000,00
6	Kecamatan Gubug	118.850.000,00	118.850.000,00
7	Kecamatan Karangrayung	145.350.000,00	145.350.000,00
8	Kecamatan Kedungjati	84.900.000,00	84.900.000,00
9	Kecamatan Klambu	48.750.000,00	48.750.000,00
10	Kecamatan Kradenan	133.800.000,00	133.800.000,00
11	Kecamatan Ngarigan	102.200.000,00	102.200.000,00
12	Kecamatan Penawangan	113.250.000,00	113.250.000,00
13	Kecamatan Pulokulon	165.900.000,00	157.150.000,00
14	Kecamatan Purwodadi	222.250.000,00	222.250.000,00
15	Kecamatan Tanggunharjo	64.150.000,00	64.150.000,00
16	Kecamatan Tawangharjo	87.850.000,00	87.850.000,00
17	Kecamatan Tegowanu	62.800.000,00	62.800.000,00
18	Kecamatan Toroh	215.050.000,00	215.050.000,00
19	Kecamatan Wirosari	125.300.000,00	125.300.000,00
	JUMLAH	2.258.200.000,00	2.249.450.000,00



- Biaya penunjang penarikan PBB sebesar Rp1.670.380.250,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

No	KECAMATAN	JUMLAH DPA	REALISASI (Rp)
1	Kecamatan Brati	66.095.000,00	66.077.500,00
2	Kecamatan Gabus	109.105.000,00	68.872.500,00
3	Kecamatan Geyer	102.542.500,00	100.727.500,00
4	Kecamatan Godong	101.912.500,00	94.087.500,00
5	Kecamatan Grobogan	100.145.000,00	99.690.000,00
6	Kecamatan Gubug	96.397.500,00	78.766.250,00
7	Kecamatan Karangrayung	122.610.000,00	119.905.000,00
8	Kecamatan Kedungjati	53.712.500,00	52.842.500,00
9	Kecamatan Klambu	58.620.000,00	35.500.000,00
10	Kecamatan Kradenan	113.885.000,00	107.265.750,00
11	Kecamatan Ngarangan	115.007.500,00	114.902.500,00
12	Kecamatan Penawangan	93.540.000,00	82.904.500,00
13	Kecamatan Pulokulon	144.785.000,00	137.462.500,00
14	Kecamatan Purwodadi	95.907.500,00	70.487.500,00
15	Kecamatan Tanggunharjo	60.292.500,00	53.513.750,00
16	Kecamatan Tawangharjo	81.522.500,00	81.377.500,00
17	Kecamatan Tegowanu	77.382.500,00	72.780.000,00
18	Kecamatan Toroh	160.952.500,00	140.271.250,00
19	Kecamatan Wirosari	121.107.500,00	92.946.250,00
	JUMLAH	1.875.522.500,00	1.670.380.250,00

- Bantuan untuk Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Desa Inovatif sebesar Rp100.000.000,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

No	DESA/KECAMATAN	JUMLAH DPA	REALISASI (Rp)
1	Desa Tambakselo, Kecamatan Wirosari	25.000.000,00	25.000.000,00
2	Desa Pulorejo, Kecamatan Purwodadi	25.000.000,00	25.000.000,00
3	Desa Tambakrejo, Kecamatan Toroh	25.000.000,00	25.000.000,00
4	Desa Ngraji, Kecamatan Purwodadi	25.000.000,00	25.000.000,00
	JUMLAH	100.000.000,00	100.000.000,00

- 2) Belanja bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp930.882.185,00 digunakan untuk pemberian bantuan kepada partai politik yang memiliki wakil di DPRD Kabupaten Grobogan, antara lain kepada:

No	Partai Politik	Realisasi (Rp)
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	216.381.441,00
2	Partai Kebangkitan Bangsa	153.206.729,00
3	Partai Golongan Karya	150.461.161,00
4	Partai Demokrat	88.013.391,00
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	76.539.640,00
6	Partai Hati Nurani Rakyat	59.814.701,00
7	Partai Persatuan Pembangunan	59.488.417,00
8	Partai Amanat Nasional	52.949.412,00
9	Partai Nasional Demokrat	26.278.985,00
10	Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia	24.574.437,00
11	Partai Keadilan Sejahtera	23.173.871,00



Jumlah	930.882.185,00
---------------	-----------------------

1. Belanja Modal **Rp300.522.182.667,00**

- a) Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi pengeluaran atas perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya.

Realisasi Belanja Modal TA 2014 adalah sebesar Rp300.522.182.667,00 yang berarti mencapai 88,74 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp338.657.432.004,00. Realisasi belanja modal dapat dilihat dalam tabel berikut:

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)	%
Belanja Modal Pengadaan Tanah	6.080.871.000,00	4.996.522.913,00	82,17	(1.084.348.087,00)	(17,83)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin:	44.190.474.890,00	32.745.043.780,00	74,10	(11.445.431.110,00)	(25,90)
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	2.882.653.000,00	1.283.592.950,00	44,53	(1.599.060.050,00)	(55,47)
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat	8.764.795.500,00	6.293.304.750,00	71,80	(2.471.490.750,00)	(28,20)
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	539.614.500,00	472.555.590,00	87,57	(67.058.910,00)	(12,43)
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	13.000.000,00	12.970.000,00	99,77	(30.000,00)	(0,23)
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	493.048.000,00	483.510.750,00	98,07	(9.537.250,00)	(1,93)
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	694.214.000,00	609.642.225,00	87,82	(84.571.775,00)	(12,18)
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3.310.376.500,00	3.152.755.346,00	95,24	(157.621.154,00)	(4,76)
Belanja Modal Pengadaan Komputer	6.161.727.444,00	5.600.804.091,00	90,90	(560.923.353,00)	(9,10)
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	3.337.631.613,00	3.423.504.385,00	102,57	85.872.772,00	2,57
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	189.328.000,00	174.500.300,00	92,17	(14.827.700,00)	(7,83)
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	20.400.000,00	17.719.000,00	86,86	(2.681.000,00)	(13,14)
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	818.613.800,00	843.364.510,00	103,02	24.750.710,00	3,02
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	264.044.000,00	249.008.500,00	94,31	(15.035.500,00)	(5,69)
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	102.500.000,00	100.890.900,00	98,43	(1.609.100,00)	(1,57)
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	7.560.963.728,00	2.420.093.796,00	32,01	(5.140.869.932,00)	(67,99)
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	9.034.152.805,00	7.604.044.687,00	84,17	(1.430.108.118,00)	(15,83)
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	3.412.000,00	2.782.000,00	81,54	(630.000,00)	(18,46)
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	56.360.275.942,00	52.768.169.270,00	93,63	(3.592.106.672,00)	(6,37)
Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan	56.360.275.942,00	52.768.169.270,00	93,63	(3.592.106.672,00)	(6,37)
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan:	206.522.135.500,00	197.008.940.279,00	95,39	(9.513.195.221,00)	(4,61)
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	134.985.099.500,00	126.528.010.964,00	93,73	(8.457.088.536,00)	(6,27)
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	3.836.575.500,00	3.593.201.475,00	93,66	(243.374.025,00)	(6,34)
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	63.804.669.500,00	63.287.696.100,00	99,19	(516.973.400,00)	(0,81)
Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	2.614.377.000,00	2.363.879.250,00	90,42	(250.497.750,00)	(9,58)
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	1.281.414.000,00	1.236.152.490,00	96,47	(45.261.510,00)	(3,53)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya:	25.503.674.672,00	13.003.506.425,00	50,99	(12.500.168.247,00)	(49,01)
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	11.804.540.672,00	3.543.823.145,00	30,02	(8.260.717.527,00)	(69,98)
Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	306.180.000,00	213.352.000,00	69,68	(92.828.000,00)	(30,32)
Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan	329.050.000,00	325.415.000,00	98,90	(3.635.000,00)	(1,10)
Belanja harga perolehan barang modal	6.293.000,00	4.973.000,00	79,02	(1.320.000,00)	(20,98)
Belanja Modal BLUD	13.057.611.000,00	8.915.943.280,00	68,28	(4.141.667.720,00)	(31,72)
Jumlah Belanja Modal	338.657.432.004,00	300.522.182.667,00	88,74	(38.135.249.337,00)	(11,26)

- b) Penganggaran Belanja Modal mengikuti kebijakan akuntansi mengenai nilai minimum kapitalisasi aset tetap. Nilai minimum kapitalisasi aset tetap adalah batasan besaran minimum belanja per



unit barang untuk dianggarkan sebagai Belanja Modal. Pembelian barang yang tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam Belanja Barang. Pada tahun anggaran 2014 belanja yang menghasilkan aset tidak hanya berasal dari belanja modal saja, tetapi juga kapitalisasi dari belanja pegawai yaitu sebesar Rp1.867.500,38, kapitalisasi dari belanja barang dan jasa sebesar Rp1.143.890.107,00 dan dari belanja modal sebesar Rp301.377.494.566,10. Sedangkan belanja modal yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebesar Rp24.189.788.057,15, dan yang dihibahkan kepada masyarakat sebesar Rp426.729.882,00. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	Kapitalisasi dari Belanja Pegawai	Kapitalisasi dari Belanja Barang	Belanja Modal	Tidak Dikapitalisasi	Dibawah Nilai Kapitalisasi
Realisasi Pemda:	1.867.500,35	1.143.890.107,00	298.931.838.870,10	19.308.888.729,30	4.861.311.977,85
Tanah	-	-	4.930.022.913,00	443.398.801,00	-
Peralatan dan Mesin:	-	819.659.898,00	36.615.355.899,85	211.601.122,86	4.082.144.822,04
Gedung dan Bangunan	1.867.500,35	324.230.209,00	57.960.700.638,83	753.850.389,82	707.925.957,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	194.884.304.629,00	17.891.533.415,62	11.661.198,80
Aset Tetap Lainnya	-	-	4.271.352.809,41	8.505.000,00	59.580.000,00
Aset Lainnya	-	-	270.101.980,00	-	-
Realisasi FKTP:	-	-	2.445.655.696,00	7.453.250,00	12.134.100,00
Tanah	-	-	-	-	-
Peralatan dan Mesin:	-	-	2.444.980.696,00	7.453.250,00	12.134.100,00
Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	675.000,00	-	-
Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-
Aset Lainnya	-	-	-	-	-
TOTAL	1.867.500,35	1.143.890.107,00	301.377.494.566,10	19.316.341.979,30	4.873.446.077,85

C. PEMBIAYAAN NETTO..... **Rp144.444.121.238,00**

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Realisasi Pembiayaan Netto TA 2014 adalah sebesar Rp144.444.121.238,00 yang berarti 99,02 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp145.867.783.250,00. Pembiayaan Netto terdiri atas Pembiayaan Penerimaan dan Pembiayaan Pengeluaran, dengan rincian sebagai berikut:

	2014		2013
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Pembiayaan:			
1 Penerimaan Pembiayaan	168.104.939.250,00	166.127.016.838,00	141.123.082.558,00
2 Pengeluaran Pembiayaan	22.237.156.000,00	21.682.895.600,00	18.553.726.600,00
Pembiayaan Netto	145.867.783.250,00	144.444.121.238,00	122.569.355.958,00

**1. Penerimaan Pembiayaan Rp166.127.016.838,00**

Penerimaan pembiayaan mencakup penerimaan Kas Daerah yang berasal dari Penggunaan SILPA tahun lalu dan Pencairan Dana Cadangan, dengan rincian sebagai berikut:

	2014		2013
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Penggunaan SILPA	164.329.258.000,00	164.329.258.658,00	139.135.182.834,00
Penerimaan Piutang Daerah	3.775.681.250,00	1.797.758.180,00	1.987.899.724,00
	168.104.939.250,00	166.127.016.838,00	141.123.082.558,00

- Penggunaan SILPA merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2013 yang dialokasikan untuk pembiayaan pada TA 2014. Jumlah tersebut terdiri atas jumlah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Grobogan TA 2013 sebesar Rp164.329.258.658,00 dari sisa penghematan belanja atau akibat lainnya.
- Penerimaan piutang daerah sebesar Rp1.797.758.180,00 terdiri dari penerimaan piutang daerah piutang lainnya sebesar Rp216.338.180,00; penerimaan piutang penguatan modal APBD kepada LUEP sebesar Rp885.500.000,00; penerimaan piutang dari lembaga masyarakat sebesar Rp695.920.000,00.

2. Pengeluaran Pembiayaan Rp21.682.895.600,00

Pengeluaran pembiayaan mencakup pengeluaran Kas Daerah yang dipergunakan untuk penyertaan modal, pemberian pinjaman daerah, dan pembentukan dana cadangan. Rincian lebih lanjut mengenai pengeluaran pembiayaan tahun 2013 adalah sebagai berikut:

	2014		2013
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Pengeluaran Pembiayaan:			
Pembentukan Dana Cadangan	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00
Penyertaan Modal (Investasi)			
Pemerintah Daerah	12.500.000.000,00	12.500.000.000,00	9.356.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang	527.156.000,00	92.895.600,00	132.726.600,00
Pemberian Pinjaman Daerah	1.710.000.000,00	1.590.000.000,00	1.565.000.000,00
	22.237.156.000,00	21.682.895.600,00	18.553.726.600,00

- Pembentukan dana cadangan sebesar Rp7.500.000.000,00 adalah Pembentukan dana cadangan untuk pelaksanaan Pemilukada tahun 2016 sebesar Rp20.000.000.000,00. Dana cadangan ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembiayaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016. Dana Cadangan dibentuk dalam 3 tahap/tahun



pembentukan, pembentukan tahap pertama pada tahun 2012 sebesar Rp5.000.000.000,00, pembentukan tahap kedua pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp7.500.000.000,00, dan pembentukan tahap ketiga tahun 2014 yaitu sebesar Rp7.500.000.000,00.

- b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Kabupaten sebesar Rp12.500.000.000,00 adalah penyertaan modal Pemkab Grobogan pada Badan Usaha Milik Daerah tahun 2014 pada PD.BPR BKK sebesar Rp1.500.000.000,00; penyertaan modal pada PDAM sebesar Rp9.000.000.000,00; penyertaan modal pada PT.Bank Jateng sebesar Rp2.000.000.000,00.
- c. Pembayaran pokok utang sebesar Rp92.895.600,00 untuk pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada ADB LOAN.
- d. Pemberian pinjaman daerah sebesar Rp1.590.000.000,00 adalah pemberian pinjaman daerah kepada lembaga masyarakat dengan perincian sebagai berikut:
 - Pemberian pinjaman pengembangan cadangan pangan untuk 13 kelompok sebesar Rp260.000.000,00.
 - Pemberian pinjaman pengembangan lumbung pangan untuk 9 kelompok sebesar Rp180.000.000,00.
 - Penyaluran dana penguatan modal kepada LUEP sebesar Rp870.000.000,00.
 - Pemberian pinjaman untuk penguatan modal usaha peternakan sebesar Rp280.000.000,00.

D. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp209.605.742.431,00

Berdasarkan Surplus Anggaran sebesar Rp65.161.621.193,00 dan realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp144.444.121.238,00 sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) TA 2014 sebesar Rp209.605.742.431,00, dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran 2014 (Rp)	Realisasi 2014 (Rp)	Realisasi 2013 (Rp)
1 Pendapatan dan Belanja			
Pendapatan	1,642,386,125,000.00	1,710,966,445,735.00	1,549,709,105,117.00
Belanja dan Transfer	1,788,253,908,250.00	1,645,804,824,542.00	1,507,949,202,417.00
Surplus/(Defisit)	(145,867,783,250.00)	65,161,621,193.00	41,759,902,700.00
2 Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	168,104,939,250.00	166,127,016,838.00	141,123,082,558.00
Pengeluaran Pembiayaan	22,237,156,000.00	21,682,895,600.00	18,553,726,600.00
Pembiayaan Netto	145,867,783,250.00	144,444,121,238.00	122,569,355,958.00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	-	209,605,742,431.00	164,329,258,658.00

SILPA tahun 2014 sebesar Rp209.605.742.431,00 tersebut berasal dari kelebihan penerimaan pendapatan, sisa anggaran belanja, dan pembiayaan netto sebagaimana diuraikan sebagai berikut berikut:

1. Dari target pendapatan sebesar Rp1.642.386.125.000,00 realisasinya sebesar Rp1.710.966.445.735,00 sehingga terdapat kelebihan penerimaan dari target pendapatan sebesar Rp68.680.320.735,00. Lima



komponen terbesar kelebihan penerimaan dari target pendapatan antara lain: Dana Bagi Hasil Pajak Dari Pemerintah Pusat sebesar Rp22.535.370.380,00; Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp33.932.039.569,00; Bantuan Keuangan Dari Provinsi sebesar Rp7.616.445.482,00; Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp4.214.109.888,00 dan Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp953.066.159,00.

2. Dari anggaran belanja sebesar Rp1.788.253.908.250,00 realisasinya sebesar Rp1.645.804.824.542,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp142.449.083.708,00. Sisa belanja tersebut terdiri atas rincian sebagai berikut:
 - a. Selisih kurang anggaran belanja operasi sebesar Rp101.813.834.371,00 yang terdiri atas:
 - 1) Selisih kurang realisasi terhadap anggaran belanja operasi bersifat tidak langsung selain untuk pelaksanaan kegiatan, yakni:
 - a) Selisih kurang realisasi terhadap anggaran belanja pegawai bersifat tidak langsung sebesar Rp63.251.365.453,00.
 - b) Selisih kurang realisasi terhadap anggaran belanja bunga sebesar Rp22.256.698,00.
 - c) Selisih kurang realisasi terhadap anggaran belanja hibah sebesar Rp3.894.040.392,00.
 - d) Selisih kurang realisasi terhadap anggaran belanja bantuan sosial sebesar Rp1.924.153.000,00.
 - e) Selisih kurang realisasi terhadap anggaran belanja bantuan keuangan sebesar Rp3.971.685.065,00.
 - f) Selisih kurang realisasi terhadap anggaran belanja tidak terduga sebesar Rp2.500.000.000,00.
 - 2) Selisih kurang realisasi terhadap anggaran belanja operasi untuk pelaksanaan kegiatan, yakni:
 - a) Selisih kurang realisasi terhadap anggaran belanja pegawai sebesar Rp3.616.826.866,00.
 - b) Selisih kurang realisasi terhadap anggaran belanja barang sebesar Rp25.133.506.897,00.
 - b. Selisih kurang realisasi terhadap anggaran belanja modal sebesar Rp38.135.249.337,00.
3. Sisa anggaran belanja sebagaimana tersebut di atas antara lain berasal dari kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus yang realisasinya sangat rendah dan harus dianggarkan kembali pada tahun anggaran 2015, antara lain sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan yang dianggarkan sebesar Rp51.640.637.491,00 realisasinya sebesar Rp31.973.394.344,00 atau terdapat sisa anggaran sebesar Rp19.667.243.147,00. Pada tahun 2014 pelaksanaan DAK Bidang



- Pendidikan dianggarkan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp39.599.642.045,00 realisasinya sebesar Rp27.909.944.344,00 atau terdapat sisa anggaran Rp11.689.697.701,00; dan dianggarkan pada Belanja Hibah DPPKAD sebesar Rp12.040.995.446,00 realisasinya sebesar Rp4.063.450.000,00 atau terdapat sisa anggaran Rp7.977.545.446,00.
- b. Pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan, dari anggaran sebesar Rp8.274.678.000,00 realisasinya sebesar Rp8.122.794.315,00 atau terdapat sisa anggaran sebesar Rp151.883.685,00.
 - c. Pelaksanaan DAK Bidang Keluarga Berencana, dari anggaran sebesar Rp1.759.050.000,00 realisasinya sebesar Rp1.726.351.410,00 atau terdapat sisa anggaran sebesar Rp32.698.590,00.
 - d. Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup, dari anggaran sebesar Rp2.050.630.000,00 realisasinya sebesar Rp1.157.655.795,00 atau terdapat sisa anggaran sebesar Rp892.974.205,00.
 - e. Pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur Jalan, dari anggaran sebesar Rp9.623.516.000,00 realisasinya sebesar Rp8.799.456.637,00 atau terdapat sisa anggaran sebesar Rp824.059.363,00.
 - f. Pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur Irigasi, dari anggaran sebesar Rp5.194.998.000,00 realisasinya sebesar Rp4.853.395.726,00 atau terdapat sisa anggaran sebesar Rp341.602.274,00.
 - g. Pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur Air Bersih, dari anggaran sebesar Rp2.760.769.000,00 realisasinya sebesar Rp1.832.777.908,00 atau terdapat sisa anggaran sebesar Rp927.991.092,00.
 - h. Pelaksanaan DAK Bidang Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, dari anggaran sebesar Rp6.131.490.000,00 realisasinya sebesar Rp6.108.772.183,00 atau terdapat sisa anggaran sebesar Rp22.717.817,00.
 - i. Pelaksanaan DAK Bidang Pertanian pada Badan Ketahanan Pangan, dari anggaran sebesar Rp2.535.755.000,00 realisasinya sebesar Rp2.473.346.589,00 atau terdapat sisa anggaran sebesar Rp62.408.411,00.
 - j. Pelaksanaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan, dari anggaran sebesar Rp3.515.282.000,00 realisasinya sebesar Rp3.399.979.700,00 atau terdapat sisa anggaran sebesar Rp115.302.300,00.
 - k. Pelaksanaan DAK Bidang Kehutanan, dari anggaran sebesar Rp2.171.325.000,00 realisasinya sebesar Rp2.030.599.453,00 atau terdapat sisa anggaran sebesar Rp140.725.547,00.
 - l. Pelaksanaan DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat, dari anggaran sebesar Rp438.810.000,00 realisasinya sebesar



Rp436.756.000,00 atau terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.045.000,00.

4. Sisa anggaran belanja kegiatan yang dananya bersumber dari DBHCHT yang realisasinya sangat rendah dan harus dianggarkan kembali pada tahun anggaran 2015, antara lain sebagai berikut:
 - a. Kegiatan yang dibiayai dari Dana DBHCHT pada Dinas Kesehatan, dari anggaran sebesar Rp400.000.000,00 realisasinya sebesar Rp395.485.600,00 atau terdapat sisa anggaran sebesar Rp4.514.400,00
 - b. Pelaksanaan kegiatan Dana DBHCHT pada RSUD dr.R.Soedjati, dari anggaran sebesar Rp5.000.000.000,00 realisasinya sebesar Rp1.667.767.425,00 atau terdapat sisa anggaran sebesar Rp3.332.232.575,00
 - c. Pelaksanaan kegiatan Dana DBHCHT pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dari anggaran sebesar Rp500.000.000,00 realisasinya sebesar Rp494.845.450,00 atau terdapat sisa anggaran sebesar Rp5.154.550,00
 - d. Pelaksanaan kegiatan Dana DBHCHT pada Satpol PP, dari anggaran sebesar Rp150.000.000,00 realisasinya sebesar Rp149.900.000,00 atau terdapat sisa anggaran sebesar Rp100.000,00
 - e. Pelaksanaan kegiatan Dana DBHCHT pada Bapermas, dari anggaran sebesar Rp400.000.000,00 realisasinya sebesar Rp398.020.000,00 atau terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.980.000,00
 - f. Pelaksanaan kegiatan Dana DBHCHT pada Dinas Pertanian TPH, dari anggaran sebesar Rp250.000.000,00 realisasinya sebesar Rp247.395.500,00 atau terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.604.500,00
 - g. Pelaksanaan kegiatan Dana DBHCHT pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan, dari anggaran sebesar Rp400.000.000,00 realisasinya sebesar Rp357.282.000,00 atau terdapat sisa anggaran sebesar Rp42.718.000,00
 - h. Pelaksanaan kegiatan Dana DBHCHT pada Dinas Peternakan dan Perikanan, dari anggaran sebesar Rp1.433.737.000,00 realisasinya sebesar Rp1.383.048.500,00 atau terdapat sisa anggaran sebesar Rp50.668.500,00
 - i. Pelaksanaan kegiatan Dana DBHCHT pada Disperindagtamben, dari anggaran sebesar Rp9.183.737.000,00 realisasinya sebesar Rp5.741.537.075,00 atau terdapat sisa anggaran sebesar Rp3.442.199.925,00.
5. Kekurangan pembiayaan netto sebesar Rp1.423.662.012,00 disebabkan:
 - a. Selisih kurang penerimaan pembiayaan sebesar Rp1.977.922.412,00 yang berasal dari selisih lebih Penggunaan SILPA sebesar Rp658,00,



dan selisih kurang penerimaan piutang daerah sebesar Rp1.977.923.070,00.

- b. Selisih kurang pengeluaran pembiayaan sebesar Rp554.260.400,00 yang berasal dari selisih kurang pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran pokok utang sebesar Rp434.260.400,00 dan selisih kurang pengeluaran pembiayaan untuk pemberian pinjaman daerah sebesar Rp120.000.000,00.

**5.2 PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**

Neraca terdiri atas aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut (dalam Rupiah):

Uraian	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Aset Lancar	256.103.305.844,09	236.065.019.086,00
Investasi Jangka Panjang	115.249.198.352,44	85.691.135.672,92
Aset Tetap	2.141.261.917.299,93	1.847.814.796.734,02
Dana Cadangan	21.900.426.864,00	13.194.881.504,00
Aset Lainnya	10.841.759.327,60	171.352.246.506,51
Jumlah Aset	2.545.356.607.688,06	2.354.118.079.503,45
Kewajiban Jangka Pendek	4.371.169.485,82	16.065.565.044,27
Kewajiban Jangka Panjang	49.237.248,40	155.989.130,22
Jumlah Kewajiban	4.420.406.734,22	16.221.554.174,49
Ekuitas Dana Lancar	251.732.136.358,27	219.999.454.041,73
Ekuitas Dana Investasi	2.267.303.637.731,58	2.104.702.189.783,23
Ekuitas Dana Cadangan	21.900.426.864,00	13.194.881.504,00
Jumlah Ekuitas	2.540.936.200.953,84	2.337.896.525.328,96
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	2.545.356.607.688,06	2.354.118.079.503,45

A. Aset Lancar Rp256.103.306.344,09

Aset lancar merupakan kelompok pos/rekening yang menggambarkan kekayaan daerah yang dicairkan atau memiliki perputaran paling lama satu tahun terhitung sejak tanggal neraca. Saldo keseluruhan kelompok akun aset lancar per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 dapat dirinci sebagai berikut:

Aset Lancar	31 Desember 2014	31 Desember 2013
1 Kas	205.844.074.074,00	175.388.369.298,00
2 Investasi Jangka Pendek	5.000.000.000,00	-
3 Piutang	19.686.279.873,09	18.154.834.831,00
4 Persediaan	25.572.952.397,00	42.521.814.957,00
Jumlah	256.103.306.344,09	236.065.019.086,00

1. Kas Rp205.844.073.574,00

Saldo kas terdiri atas Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, dan Kas di Bendahara FKTP dengan perincian sebagai berikut:



	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Kas	(Rp)	(Rp)
Kas di Kas Daerah	180.359.126.070,00	171.475.013.635,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	727.480,00	14.040.010,00
Kas di Bendahara Penerimaan	1.944.000,00	1.082.000,00
Kas di Badan Layanan Umum Daerah	12.104.684.803,00	3.898.233.653,00
Kas di Bendahara FKTP	13.377.591.721,00	-
Jumlah	205.844.074.074,00	175.388.369.298,00

a) Kas di Kas Daerah Rp180.359.126.070,00

Saldo Kas di Kas Daerah terdiri atas penempatan berupa giro dan deposito pada Bank, dengan rincian saldo sebagai berikut:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Kas di Kas Daerah:	(Rp)	(Rp)
1) Rekening Giro	30.359.126.070,00	11.475.013.635,00
2) Rekening Deposito	150.000.000.000,00	160.000.000.000,00
Jumlah	180.359.126.070,00	171.475.013.635,00

Kas di Kas Daerah yang merupakan bagian dari SILPA sebesar Rp179.279.259.668,00 dan kas utang PFK sebesar Rp1.079.866.402,00 yang berupa uang jaminan dan jaminan pemeliharaan sebesar Rp1.078.666.402,00 serta penerimaan atas kelebihan setoran penerimaan pembiayaan yang akan dikembalikan kepada penytor sebesar Rp1.200.000,00. Diantara penggunaan dana sebesar Rp179.279.259.668,00 terdapat dana terikat yang peruntukannya telah ditentukan seperti DAK, DBHCHT, Bantuan Provinsi dan Sertifikasi Guru PNS dengan rincian sebagaimana berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Dana Alokasi Khusus DAK 2014 DAK sebelum 2014	23.265.500.629,00 2.857.349.765,00
2	Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013	4.094.309.925,00
3	Bantuan Provinsi 2014 2013 2012	3.873.553.182,00 242.402.235,00 643.000,00
4	Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS dan Tunjangan Profesi Guru Tunjangan Profesi Guru	3.407.250.000,00 30.457.627.255,00
	Jumlah	68.198.635.991,00

1) Rekening Giro Rp30.359.126.070,00

Rekening giro bank adalah dana yang merupakan bagian dari kekayaan milik Pemerintah Daerah yang ditempatkan di bank dalam bentuk rekening giro, dengan rincian sebagai berikut:



Rekening Giro:	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	(Rp)	(Rp)
Bank BPD Jateng Cab Purwodadi No. 1-017-00000-1	-	-
Bank BPD Jateng Cab Purwodadi No. 1-017-00128-3	1.133.852.421,00	7.966.451.699,00
Bank BPD Jateng Cab Purwodadi No. 1-017-00311-2	29.225.273.649,00	3.508.561.936,00
Jumlah	30.359.126.070,00	11.475.013.635,00

Penggunaan rekening kas daerah adalah sebagai berikut:

- Rekening giro Bank BPD Jateng Cabang Purwodadi A/C No. 1-017-00000-1 atas nama BUD Kabupaten Grobogan merupakan rekening Kas Penerimaan APBD Kabupaten Grobogan.
- Rekening giro Bank BPD Jateng Cabang Purwodadi A/C No. 1-017-00128-3 atas nama BUD Kabupaten Grobogan merupakan rekening Kas Pengeluaran APBD Kabupaten Grobogan.
- Rekening giro Bank BPD Jateng Cabang Purwodadi A/C No. 1-017-00311-2 atas nama BUD Kabupaten Grobogan merupakan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

2) Deposito Rp150.000.000.000,00

Saldo deposito sebesar Rp150.000.000.000,00 adalah dana Pemerintah Daerah yang ditempatkan di bank dalam bentuk deposito untuk jangka waktu satu bulan, dan diperpanjang secara otomatis atau *automatic roll over* (ARO). Tingkat bunga deposito tahun 2014 adalah sesuai tingkat bunga yang berlaku pada masing-masing bank, yang pendapatannya diakui/dibukukan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Grobogan. Saldo kas dalam bentuk simpanan deposito sebesar Rp150.000.000.000,00 berupa 18 lembar sertifikat dengan nilai nominal masing-masing sebagai berikut:

Bank BRI sebanyak 2 lembar @ Rp 5.000.000.000,00

Bank BRI sebanyak 2 lembar @ Rp10.000.000.000,00

Bank BPD sebanyak 4 lembar @ Rp 5.000.000.000,00

Bank BPD sebanyak 10 lembar @ Rp10.000.000.000,00

Rincian Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2014 dapat dilihat dalam tabel berikut:



Uraian	Nomor Bukti	Tanggal Penempatan	Saldo Tahun 2014 (Rp)	Saldo Tahun 2013 (Rp)
Deposito Bank Jateng	A 078844	06/01/2012	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
Deposito Bank Jateng	A 078845	06/01/2012	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
Deposito Bank Jateng	A 078846	06/01/2012	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
Deposito Bank Jateng	A 078847	06/01/2012	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
Deposito Bank Jateng	A 086242	08/05/2014	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
Deposito Bank Jateng	A 086243	08/05/2014	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
Deposito Bank Jateng	A 086244	08/05/2014	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
Deposito Bank Jateng	A 086245	08/05/2014	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
Deposito Bank Jateng	A 086246	08/05/2014	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
Deposito Bank Jateng	A 086269	04/07/2014	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
Deposito Bank Jateng	A 086270	04/07/2014	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
Deposito Bank Jateng	A 086271	04/07/2014	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
Deposito Bank Jateng	A 086272	04/07/2014	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
Deposito Bank Jateng	A 086273	04/07/2014	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
Deposito Bank Jateng				10.000.000.000,00
Jumlah Deposito di Bank Jateng			120.000.000.000,00	130.000.000.000,00
Deposito Bank BRI	DC 3861937	21/12/2011	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
Deposito Bank BRI	DC 3863116	21/12/2012	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
Deposito Bank BRI	DC 3863983	26/09/2013	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
Deposito Bank BRI	DC 3864514	04/12/2013	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
Jumlah Deposito di Bank BRI			30.000.000.000,00	30.000.000.000,00
Total			150.000.000.000,00	160.000.000.000,00

Saldo kas di kas daerah sebesar Rp180.359.126.070,00 tersebut telah sesuai dengan hasil rekonsiliasi antara buku jurnal penerimaan dan pengeluaran kas dengan rekening koran dari Bank BPD Jateng Cabang Purwodadi.

b) Kas di Bendahara Pengeluaran Rp689.980,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan uang tunai maupun yang berada di rekening bank bendahara pengeluaran SKPD, sebagai berikut:

<i>Kas di Bendahara Pengeluaran</i>	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
Dinas Pendidikan	-	12.529.510,00
Kecamatan Taw angharjo	-	1.085.500,00
Disperindagtamben	689.980,00	425.000,00
Jumlah	689.980,00	14.040.010,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Disperindagtamben yaitu Pemungutan pajak oleh bendahara pengeluaran pada Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi yang sampai dengan 31 Desember 2014 belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp689.980,00. Telah disetor pada tanggal 5 Januari 2015.

c) Kas di Bendahara Penerimaan Rp1.944.000,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan tersebut adalah Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi sebesar Rp1.098.500,00 dan DPPKAD selaku SKPD



sebesar Rp845.500,00 merupakan penerimaan pendapatan tanggal 30 Desember tahun 2014 yang sampai dengan 31 Desember 2014 belum disetor ke Kas Daerah. Telah disetor pada tanggal 2 Januari 2015.

d) Kas di Badan Layanan Umum Daerah Rp12.104.684.803,00

Kas di Badan Layanan Umum Daerah sebesar Rp12.104.684.803,00 merupakan saldo kas BLUD yang terdiri dari:

- Kas tunai di Bendahara Pengeluaran BLUD bagian dari SILPA sebesar Rp132.486.386,00
- Kas tunai di Bendahara Penerimaan BLUD sebesar Rp5.781.379,00 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Transfer PT. Jasa Raharja untuk pasien Tertanggung Rp5.403.359,00
 2. Bunga bank bulan Desember 2014 Rp 378.020,00Kas di Bendahara Penerimaan tersebut adalah kas Rekening Askes yang merupakan rekening untuk menampung dana transfer dari PT. Jasa Raharja untuk pembayaran biaya pelayanan kesehatan bagi pasien yang dijamin oleh pihak penjamin tersebut, sedangkan atas bunga bank pada rekening Askes menjadi pendapatan RSUD.
- Saldo kas yang disimpan di Bank Jateng Cabang Purwodadi dengan Rekening Nomor 1.017.00034.4 sebesar Rp6.966.417.038,00
- Saldo deposito sebesar Rp5.000.000.000,00 adalah dana BLUD yang ditempatkan di bank BPD Jateng Cabang Purwodadi dalam bentuk deposito dengan ketentuan diperpanjang secara otomatis atau *automatic roll over* (ARO) dengan sertifikat deposito nomor A086346 jangka waktu 1 (satu) bulan sebesar Rp5.000.000.000,00. Tingkat bunga deposito tahun 2014 adalah sesuai tingkat bunga yang berlaku pada Bank BPD Jateng Cabang Purwodadi, yang pendapatannya diakui/dibukukan sebagai Pendapatan BLUD.

e) Kas di Bendahara FKTPRp13.377.591.721,00

Kas di bendahara FKTP adalah kas yang berada pada rekening bendahara Dana Kapitasi JKN pada 30 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama/Puskesmas di Kabupaten Grobogan. Rekening tersebut merupakan bagian dari rekening Bendahara Umum Daerah, sampai dengan 31 Desember 2014 jumlah rekening tersebut sebesar Rp13.377.591.721,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:



No	FKTP/PUSKESMAS	SILPA	Pendapatan Ditangguhkan	Pajak Belum Disetor	JUMLAH
1.	Kedungjati	732.342.980,00	4.070.666,00	-	736.413.646,00
2.	Karangrayung I	503.603.216,00	3.115.460,00	25.000,00	506.743.676,00
3.	Karangrayung II	175.119.778,00	1.492.584,00	-	176.612.362,00
4.	Penawangan I	161.676.627,00	1.409.816,00	1.817.807,00	164.904.250,00
5.	Penawangan II	178.850.224,00	1.791.531,00	1.903.063,00	182.544.818,00
6.	Toroh I	716.059.204,00	5.853.555,00	-	721.912.759,00
7.	Toroh II	230.439.856,00	2.040.840,00	744.000,00	233.224.696,00
8.	Geyer I	698.293.683,00	4.220.211,00	6.799.641,00	709.313.535,00
9.	Geyer II	163.105.500,00	1.237.228,00	2.511.875,00	166.854.603,00
10.	Pulokulon I	446.707.260,00	2.291.445,00	3.264.220,00	452.262.925,00
11.	Pulokulon II	844.230.972,00	4.790.319,00	-	849.021.291,00
12.	Kradenan I	409.432.861,00	2.445.536,00	-	411.878.397,00
13.	Kradenan II	232.082.906,00	1.464.343,00	3.873.943,00	237.421.192,00
14.	Gabus I	293.838.424,00	2.356.766,00	-	296.195.190,00
15.	Gabus II	308.942.704,00	1.381.285,00	1.539.744,00	311.863.733,00
16.	Ngaringan	878.041.356,00	7.234.811,00	-	885.276.167,00
17.	Wirosari I	119.088.948,00	2.840.583,00	3.090.040,00	125.019.571,00
18.	Wirosari II	189.432.224,00	1.750.504,00	4.312.548,00	195.495.276,00
19.	Tawangharjo	852.604.605,00	5.294.539,00	4.616.657,00	862.515.801,00
20.	Grobogan	941.931.844,00	6.602.875,00	90.980,00	948.625.699,00
21.	Purwodadi I	382.718.203,00	3.540.795,00	7.007.620,00	393.266.618,00
22.	Purwodadi II	468.855.452,00	2.831.632,00	-	471.687.084,00
23.	Brati	410.482.947,00	2.762.426,00	12.872.954,00	426.118.327,00
24.	Klambu	323.730.714,00	2.009.444,00	-	325.740.158,00
25.	Godong I	316.182.851,00	2.536.758,00	1.682.169,00	320.401.778,00
26.	Godong II	218.347.376,00	1.736.100,00	-	220.083.476,00
27.	Gubug I	590.005.888,00	3.153.477,00	-	593.159.365,00
28.	Gubug II	226.074.836,00	1.538.076,00	-	227.612.912,00
29.	Tegowanu	608.004.536,00	3.279.762,00	-	611.284.298,00
30.	Tanggungharjo	606.973.344,00	3.072.723,00	4.092.051,00	614.138.118,00
Total		13.227.201.319,00	90.146.090,00	60.244.312,00	13.377.591.721,00

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah kas di bendahara FKTP terdiri dari:

a. SiLPA.

SiLPA sebesar Rp13.227.201.319,00 adalah sisa dana JKN TA.2014 yang akan dipergunakan kembali pada tahun anggaran berikutnya untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.

b. Pendapatan Ditangguhkan.

Pendapatan ditangguhkan sebesar Rp90.146.090,00 merupakan bunga giro rekening bendahara FKTP yang belum disetor ke Kas Daerah.

c. Pajak Belum Disetor.

Pajak belum disetor sebesar Rp60.244.312,00 adalah pajak yang dipungut oleh bendahara FKTP yang sampai dengan 31 Desember 2014 belum disetor ke Kas Negara.

2. Investasi Jangka Pendek Rp5.000.000.000,00

Pada neraca tahun 2013 Investasi Jangka Pendek sebesar Rp0,00, sedangkan sampai dengan 31 Desember 2014 adalah Rp5.000.000.000,00. Penambahan investasi jangka pendek ini adalah berupa deposito dengan nomor sertifikat A086286 jangka waktu 3 bulan yang dikelola oleh RSUD. Dr. R. Soedjati Purwodadi selaku Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

**3. Piutang Rp19.686.279.873,09**

Saldo piutang per 31 Desember 2014 sebesar Rp19.686.279.873,09 adalah merupakan saldo piutang setelah penyisihan yang terdiri atas piutang pajak dan piutang retribusi dengan perincian sebagai berikut:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
<i>Piutang:</i>	(Rp)	(Rp)
Piutang Pajak	4.818.150.975,00	3.420.009.450,00
Piutang Retribusi	11.763.639.967,00	11.732.870.079,00
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	3.006.677.643,77	936.274.052,00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
Piutang Lainnya	4.938.518.825,00	4.991.581.505,00
Penyisihan Piutang Lainnya	(4.840.707.537,69)	(2.925.900.255,00)
Jumlah Piutang	19.686.279.873,09	24.006.635.341,00

a. Piutang Pajak Rp4.818.150.975,00

Akun Piutang Pajak menggambarkan hak Pemerintah Daerah dari pajak daerah yang sampai dengan 31 Desember 2014 belum diterima pendapatannya. Pada tahun 2013 piutang pajak yang tercatat di Neraca adalah sebesar Rp3.420.009.450,00 pada tahun 2014 terdapat penambahan piutang pajak yang berasal dari Piutang PBB Limpahan dari KPP Pratama Blora sebesar Rp1.073.154.137,00 dan piutang PBB tahun 2014 sebesar Rp2.942.250.606,00, sedangkan pada tahun 2014 juga terdapat realisasi pembayaran pajak sebesar Rp2.617.263.218,00 sehingga piutang pajak sebelum penyisihan menjadi sebesar Rp4.818.150.975,00. Setelah dilakukan perhitungan penyisihan maka piutang pajak setelah penyisihan adalah sebesar Rp4.441.477.205,00 Selanjutnya mutasi piutang pajak dari tahun 2013 sampai dengan saldo piutang pajak setelah penyisihan tahun 2014 adalah sebagaimana tabel berikut:

No	Uraian	Saldo Awal	Bertambah/(Berkurang)	Piutang Sebelum Penyisihan	Penyisihan Piutang	Saldo Akhir
1	Piutang PBB Th. 2009 - 2012	-	1.073.154.137	1.073.154.137	(374.923.771)	698.230.367
2	Piutang PBB Th. 2013	3.316.351.699	(2.522.395.467)	793.956.232	-	793.956.232
3	Piutang PBB Th. 2014	-	2.942.250.606	2.942.250.606	-	2.942.250.606
4	Piutang Pajak Hotel	17.905.800	(17.905.800)	-	-	-
5	Piutang Pajak Karaoke 2012 dan 2013	55.686.750	(46.896.750)	8.790.000	(1.750.000)	7.040.000
6	Pajak Restoran Warung Makan	22.020.920	(22.020.920)	-	-	-
7	Piutang galian Golongan C	390.351	(390.351)	-	-	-
8	Piutang Air Tanah	6.953.930	(6.953.930)	-	-	-
9	Pajak Sarang Burung Walet	700.000	(700.000)	-	-	-
	Jumlah	3.420.009.450	1.398.141.525	4.818.150.975	(376.673.771)	4.441.477.205

b. Piutang Retribusi Rp11.768.619.967,00

Akun piutang retribusi menggambarkan hak Pemerintah Daerah dari pengenaan retribusi daerah yang sampai dengan 31 Desember 2014 belum diterima pembayarannya. Jumlah Piutang Retribusi per 31 Desember 2014 sebelum penyisihan sebesar Rp11.768.619.967,00,



sedangkan setelah penyisihan sebesar Rp11.527.349.925,25. Rincian dan mutasi dari piutang retribusi berdasarkan SKPD adalah sebagai berikut:

SKPD	31 Desember 2013	mutasi tahun 2014		31 Desember 2014	Penyisihan Piutang
		bertambah	berkurang		
RSUD:	11.696.146.704,19	11.251.039.389,00	11.199.973.626,19	11.747.212.467,00	235.336.291,75
Piutang umum	449.907.821,00	250.098.261,00	137.173.420,00	562.832.662,00	186.145.362,00
Pasien yg tdk masuk dlm Data BPS/SK Bupati	13.514.921,00	2.546.000,00	13.514.921,00	2.546.000,00	
Piutang JAMKESDA	774.362.943,00	284.485.680,00	774.362.943,00	284.485.680,00	
Piutang PT. ASKES	507.593.516,00		507.593.516,00	-	
JKN/BPJS Kesehatan		10.619.307.234,00		10.619.307.234,00	
Pelayanan JAMKESMAS	6.083.119.949,19		6.083.119.949,19	-	
Obat JAMKESMAS	3.633.125.227,00		3.633.125.227,00	-	
Piutang pengobatan karyawan (IUR ASKES)	159.625.929,00			159.625.929,00	39.906.482,25
Piutang karyawan kontrak/ harlep (JAM.PEMKAB)	1.064.608,00	6.608.935,00	1.064.608,00	6.608.935,00	
Piutang ASKES DPR	20.820.923,00			20.820.923,00	8.536.491,25
Piutang PT. JASA RAHARJA	9.466.502,00	19.249.491,00	9.466.502,00	19.249.491,00	
Piutang PT. KAI (PERSERO)	33.200.086,00	53.948.284,00	33.200.086,00	53.948.284,00	
Piutang PT. BUMIDA	10.262.828,00	14.696.470,00	7.271.003,00	17.688.295,00	747.956,25
Piutang PT. POS INDONESIA	81.451,00	99.034,00	81.451,00	99.034,00	
DINAS CIPTA KARYA:	16.890.000,00	4.980.000,00	16.890.000,00	4.980.000,00	-
Piutang Retribusi pesampahan dan kebersihan	16.890.000,00	4.980.000,00	16.890.000,00	4.980.000,00	
DISPORABUDPAR:	-	16.427.500,00		16.427.500,00	953.750,00
Piutang Retribusi kios Bledug Kuwu		16.427.500,00		16.427.500,00	953.750,00
DPPKAD:	19.833.375,00		19.833.375,00	-	
Piutang Retribusi ijin gangguan	19.833.375,00		19.833.375,00	-	
JUMLAH	11.732.870.079,19	11.272.446.889,00	11.236.697.001,19	11.768.619.967,00	236.290.041,75

c. Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

.....**Rp3.006.677.643,77**

Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran adalah merupakan hak Pemerintah Kabupaten Grobogan yang belum diterima pembayarannya yang berasal dari sewa/penjualan konstruksi kios dan los pasar Suru, Tegowanu, pasar Gubug, Nglejok, Danyang, dan pasar Godong yang pada akhir tahun 2014 diperoleh saldo bagian lancar sebesar Rp2.998.015.643,77 dan Piutang atas penjualan Barang Milik Daerah di DPPKAD sebesar Rp8.662.000,00. Saldo piutang dari bagian lancar sewa/penjualan konstruksi kios dan los pada 6 pasar sebesar Rp2.998.015.643,77 setelah dikurangi penyisihan sebesar Rp966.366.606,39 menjadi sebesar Rp2.040.311.037,38. Perincian atas piutang tersebut Pasar dan Piutang penjualan Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut:



PASAR	JATUH TEMPO PELUNASAN	JUMLAH TUNGGAKKAN S.D 2014	BAG. LANCAR TAHUN 2014	JUMLAH PIUTANG	PEYISIHAN	Piutang setelah penyisihan
Piutang Pasar:						
Suru	2014	30.462.960	-	30.462.960,39	(10.022.532,82)	20.440.427,57
Tegowanu	2018	24.782.500	8.075.000,00	32.857.500,00	(9.585.625,00)	23.271.875,00
Gubug	2018	15.797.851	25.818.750,00	41.616.601,25	(4.279.223,70)	37.337.377,55
Nglejok	2018	389.995.939	138.916.826,02	528.912.765,34	(147.738.193,60)	381.174.571,74
Daryang	2018	4.031.121	12.112.499,75	16.143.620,49	(806.224,15)	15.337.396,34
Godong	2023	1.872.789.885	475.232.311,18	2.348.022.196,31	(793.934.807,13)	1.554.087.389,18
		2.337.860.257	660.155.387	2.998.015.644	(966.366.606)	2.031.649.037
Piutang Penjualan BMD:						
Penjualan BMD di DPPKAD			8.662.000,00	8.662.000,00	-	8.662.000,00
						-
JUMLAH		2.337.860.256,83	668.817.386,94	3.006.677.643,77	(966.366.606,39)	2.040.311.037,38

4. Piutang Lainnya **Rp4.938.518.825,00**

Akun piutang lainnya menggambarkan hak Pemerintah Kabupaten dari piutang selain piutang pajak dan piutang retribusi yang sampai dengan 31 Desember 2014 belum diterima pembayarannya. Piutang Lainnya berupa perguliran Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER) Kehutanan, PER Perkebunan, PER Peternakan, PER Perikanan, PER Pertanian, PER Perindag, PER Koperasi, Perguliran Cadangan Pangan, Lumbung Pangan, DPM LUEP, dan pengembalian investasi non permanen dari kelompok penerima bantuan ternak yang belum lunas pembayarannya yang dikelola Badan Ketahanan Pangan. Jumlah piutang lainnya sebelum penyisihan per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp4.991.581.505,00, pada tahun 2014 terdapat penambahan piutang dari Cadangan pangan 2014 sebesar Rp260.000.000,00 lumbung pangan 2014 sebesar Rp180.000.000,00 DPM LUEP 2014 Rp870.000.000,00 dan Piutang dari Kekurangan pengembalian Investasi non permanen sebesar Rp168.500.000,00, sedangkan realisasi pembayaran di tahun 2014 adalah sebesar Rp1.531.562.680,00 sehingga saldo piutang yang masih menjadi hak Pemerintah Daerah sebelum penyisihan adalah sebesar Rp4.938.518.825,00. Jumlah Piutang Lainnya tersebut setelah dikurangi penyisihan sebesar Rp2.856.250.075,00 menjadi Rp2.082.268.750,00. Khusus untuk penambahan piutang dari Kekurangan pengembalian investasi non permanen dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Latar belakang dari investasi non permanen tersebut adalah:
 - 1.1 Penyaluran dana penguatan kelembagaan pangan desa yang direalisasikan untuk pembelian ternak kambing pada tahun 2006. Dana dianggarkan dan dibiayai dari Pos Belanja Bagi Hasil Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan. Dana diberikan kepada 4 (empat) kelompok Desa Mandiri Pangan (MAPAN) @ Rp25.000.000,00 terdiri dari:
 - a. Kelompok SETIA TANI Desa Kluwan, Penawangan
 - b. Kelompok MANTEP ING TANI Desa Tambakselo, Wirosari
 - c. Kelompok TANI MAKMUR Desa Tambakselo, Wirosari



-
- d. Kelompok KATON SUBUR Desa Tambakselo, Wirosari.
- 1.2 Penyaluran Dana Penguatan Modal Pembelian Ternak di Kabupaten Grobogan tahun 2007, dana dianggarkan dan dibiayai dari Belanja Modal Pengadaan Ternak, kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan. Penyaluran dana didasarkan berita acara serah terima Dana Penguatan Modal Pembelian Ternak di Kabupaten Grobogan tanggal 28 November 2007 antara Kepala Bagian Ketahanan Pangan Setda Grobogan dengan para Ketua Kelompok. Dana disalurkan sebagai pinjaman Dana Penguatan Modal Pembelian Ternak tanpa ada dokumen yang memuat ketentuan-ketentuan terperinci mengenai teknis pengelolaan dana dan ternak yang dibeli. Dana diberikan kepada 8 (delapan) kelompok Desa Mandiri Pangan (MAPAN) dari 4 desa @ Rp17.500.000,00 terdiri dari:
- a. Kelompok SIDO LANCAR dan SIDO MAKMUR dari desa Sengonwetan, Kradenan
 - b. Kelompok RUKUN TANI dan MANUNGAL KARYO dari desa Kalirejo, Wirosari
 - c. Kelompok LESTARI dan RAHAYU dari desa Rawoh, Karangrayung
 - d. Kelompok SRI REJEKI dan NGUDI RAHAYU dari desa Jambangan, Geyer.
2. Perkembangan yang terjadi selama beberapa tahun terakhir dapat disimpulkan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan harapan disebabkan beberapa faktor, antara lain:
- a. Perbedaan pemahaman atas status dana yang diterima (merupakan pinjaman atau bantuan), walaupun telah ada surat perjanjian yang memuat ketentuan-ketentuannya.
 - b. Pelaksanaan perjanjian oleh kelompok yang berbeda-beda sejak penerimaan, pemeliharaan, dan pengadministrasian perkembangan ternak hingga perguliran ternak maupun pengembalian dana pinjaman.
 - c. Kurangnya pemantauan dan penatausahaan dari para petugas mulai dari tenaga pendamping di lapangan, ketua kelompok, aparatur di desa, hingga di SKPD.
3. Pada bulan Mei 2014 telah dilakukan serangkaian pertemuan dengan seluruh kelompok penerima berserta *stake holder* dari pihak desa dan kecamatan terkait dengan menyampaikan sosialisasi hasil pemeriksaan BPK. RI dan mendiskusikan mekanisme pengembalian. Dari kegiatan tersebut kemudian menghasilkan kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Grobogan dengan Kelompok Penerima Bantuan bahwa Jumlah bantuan yang diterima oleh kelompok tersebut akan dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten



- Grobogan sejumlah nilai pokok ditambah 10% bunga sehingga total pengembalian akan menjadi Rp264.000.000,00
4. Pada perjanjian kesepakatan pengembalian tersebut kelompok penerima dana akan mengembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Grobogan dengan batas waktu sampai dengan bulan November 2014. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 jumlah yang telah dikembalikan oleh para penerima dana ke Kas Daerah baru sebesar Rp95.500.000,00 sehingga masih terdapat sisa yang masih menjadi tanggungan kelompok penerima dana sebesar Rp168.500.000,00
 5. Dengan telah dibuatnya kesepakatan besaran dan jangka waktu pengembalian, maka Pemerintah Kabupaten Grobogan tidak mencatat jumlah yang belum dibayarkan sebesar Rp168.500.000,00 sebagai Investasi Non Permanen Lainnya. Kekurangan tersebut direklasifikasi dan dicatat sebagai Piutang Lainnya atas pengembalian investasi dari kelompok masyarakat. Adapun perhitungan jumlah investasi non permanen beserta bunga dan pengembaliannya sampai dengan 31 Desember 2014 sebagaimana tabel berikut:

No	Nama dan Alamat Kelompok Penerima Bantuan	Jumlah Dana Diterima/ Investasi Non Permanen (Rp)	Kesepakatan Pengembalian (Rp)	Realisasi Pengembalian per 31 Desember 2014 (Rp)	Sisa yang belum dikembalikan (Rp)
	Pengembangan Ternak Kambing di Desa MAPAN tahun 2006				
1	Kelompok Setia Tani, desa Kluwan Kecamatan Penawangan	25.000.000,00	27.500.000,00	-	27.500.000,00
2	Kelompok Tani Makmur, desa Tambakselo Kecamatan Wirosari	25.000.000,00	27.500.000,00	5.000.000,00	22.500.000,00
3	Kelompok Mantep Ing Tani, desa Tambakselo Kecamatan Wirosari	25.000.000,00	27.500.000,00	12.000.000,00	5.500.000,00
4	Kelompok Katon Subur, desa Tambakselo Kecamatan Wirosari	25.000.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	-
	Sub Jumlah	100.000.000,00	110.000.000,00	44.500.000,00	65.500.000,00
	Pengembangan Ternak Kambing di Desa Mapan tahun 2007				
5	Kelompok Sido Lancar, desa Sengonwetan Kecamatan Kradenan	17.500.000,00	19.250.000,00	-	19.250.000,00
6	Kelompok Sido Makmur, desa Sengonwetan Kecamatan Kradenan	17.500.000,00	19.250.000,00	-	19.250.000,00
7	Kelompok Rukun Tani, desa Kalirejo Kecamatan Wirosari	17.500.000,00	19.250.000,00	2.750.000,00	16.500.000,00
8	Kelompok Manunggal Karyo, desa Kalirejo Kecamatan Wirosari	17.500.000,00	19.250.000,00	6.500.000,00	12.750.000,00



Pemerintah Kabupaten Grobogan

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013

No	Nama dan Alamat Kelompok Penerima Bantuan	Jumlah Dana Diterima/ Investasi Non Permanen (Rp)	Kesepakatan Pengembalian (Rp)	Realisasi Pengembalian per 31 Desember 2014 (Rp)	Sisa yang belum dikembalikan (Rp)
9	Kelompok Lestari, desa Rawoh Kecamatan Karangrayung	17.500.000,00	19.250.000,00	11.250.000,00	800.000,00
10	Kelompok Rahayu, desa Rawoh Kecamatan Karangrayung	17.500.000,00	19.250.000,00	11.250.000,00	800.000,00
11	Kelompok Sri Rejeki, desa Jambangan Kecamatan Geyer	17.500.000,00	19.250.000,00	-	19.250.000,00
12	Kelompok Ngudi Rahayu, Desa Jambangan Kecamatan Geyer	17.500.000,00	19.250.000,00	19.250.000,00	-
	Sub Jumlah	140.000.000,00	154.000.000,00	51.000.000,00	103.000.000,00
JUMLAH		240.000.000,00	264.000.000,00	95.500.000,00	168.500.000,00

Sedangkan posisi saldo piutang sebelum penyisihan dari piutang lainnya adalah sebagai tabel berikut:



Pemerintah Kabupaten Grobogan

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013

SKPD	URAIAN PIUTANG	SALDO 31-12-2014	PENYISIHAN	PIUTANG SETELAH PENYISIHAN
Umur Piutang 5 Tahun ke atas:				
Dinas Pertanian TPH	Piutang P4K 2001	11.540.000	11.540.000	-
Dinas Peternakan & Perikanan	Piutang PER Peternakan 2001	193.452.500	193.452.500	-
Dinas Pertanian TPH	PER Pertanian 2001	110.222.500	110.222.500	-
Dinas Pertanian TPH	Piutang P4K 2002	47.969.900	47.969.900	-
Diskop UMKM	PER Koperasi 2001	39.175.000	39.175.000	-
Diskop UMKM	Bunga PER Koperasi 2001	500.000	500.000	-
Dinas Kehutanan & Perkebunan	Piutang PER Kehutanan 2001	112.098.750	112.098.750	-
Dinas Peternakan & Perikanan	Piutang PER Peternakan 2002	29.212.500	29.212.500	-
Dinas Peternakan & Perikanan	Piutang PER Perikanan 2002	4.000.000	4.000.000	-
Dinas Pertanian TPH	PER Pertanian 2001	60.975.000	60.975.000	-
Dinas Pertanian TPH	Jasa Penerimaan Baw ang 2004	1.361.000	1.361.000	-
Dinas Pertanian TPH	PER Pertanian 2002	45.143.000	45.143.000	-
Dinas Pertanian TPH	PER Pertanian 2003	35.500.000	35.500.000	-
Dinas Kehutanan & Perkebunan	PER Perkebunan 2002	95.553.000	95.553.000	-
Dinas Pertanian TPH	Jasa Penerimaan Baw ang 2005	2.782.000	2.782.000	-
Disperindagtamben	PER Perindag 2002	268.501.550	268.501.550	-
Disperindagtamben	Bunga PER Perindag 2002	82.887.425	82.887.425	-
Diskop UMKM	PER Koperasi 2002	223.267.000	223.267.000	-
Diskop UMKM	Bunga PER Koperasi 2002	20.625.000	20.625.000	-
Dinas Pertanian TPH	PER Pertanian 2003	113.550.000	113.550.000	-
Dinas Pertanian TPH	Jasa Penerimaan Baw ang 2006	3.311.000	3.311.000	-
Disperindagtamben	PER Perindag 2003	293.312.750	293.312.750	-
Disperindagtamben	Bunga PER Perindag 2003	103.860.250	103.860.250	-
Diskop UMKM	PER Koperasi 2003	243.592.000	243.592.000	-
Diskop UMKM	Bunga PER Koperasi 2003	36.500.000	36.500.000	-
Dinas Pertanian TPH	Jasa Penerimaan Baw ang 2007	4.661.000	4.661.000	-
Disperindagtamben	PER Perindag 2004	66.945.900	66.945.900	-
Disperindagtamben	Bunga PER Perindag 2004	28.344.800	28.344.800	-
Diskop UMKM	PER Koperasi 2004	181.125.000	181.125.000	-
Diskop UMKM	Bunga PER Koperasi 2004	41.500.000	41.500.000	-
Diskop UMKM	Dana Bergulir 2005	8.300.000	8.300.000	-
Diskop UMKM	Bunga Dana Bergulir 2005	2.250.000	2.250.000	-
Diskop UMKM	Dana Bergulir 2006	40.000.000	40.000.000	-
Diskop UMKM	Bunga Dana Bergulir 2006	9.000.000	9.000.000	-
Diskop UMKM	Penguatan Modal 2007	31.000.000	31.000.000	-
Diskop UMKM	Bunga Penguatan Modal 2007	9.500.000	9.500.000	-
		2.601.518.825	2.601.518.825	-
Umur Piutang 4 Tahun:				
Diskop UMKM	Penguatan Modal 2008	95.100.000,00	71.325.000,00	23.775.000
Diskop UMKM	Bunga Penguatan Modal 2008	20.250.000	15.187.500	5.062.500
BKP	Lumbung Pangan 2009	28.000.000	21.000.000	7.000.000
BKP	Cadangan Pangan 2009	16.000.000	12.000.000	4.000.000
		159.350.000	119.512.500	39.837.500
Umur Piutang 3 Tahun:				
Diskop UMKM	Bunga Perkuatan Modal 2009	16.625.000	8.312.500	8.312.500
Diskop UMKM	Perkuatan Modal 2009	103.300.000	51.650.000	51.650.000
BKP	Lumbung Pangan 2010	52.800.000	26.400.000	26.400.000
		172.725.000	86.362.500	86.362.500
Umur Piutang 2 Tahun:				
Diskop UMKM	Perkuatan Modal 2010	90.300.000	22.575.000	67.725.000
BKP	DPM LUEP 2012	82.500.000	20.625.000	61.875.000
Diskop UMKM	Bunga Perkuatan Modal 2010	22.625.000	5.656.250	16.968.750
		195.425.000	48.856.250	146.568.750
Umur Piutang s.d 1 Tahun:				
BKP	Cadangan Pangan 2012	8.100.000	-	8.100.000
BKP	Lumbung Pangan 2012	40.000.000	-	40.000.000
BKP	Cadangan Pangan 2013	165.200.000	-	165.200.000
BKP	Lumbung Pangan 2013	117.700.000	-	117.700.000
BKP	Cadangan Pangan 2014	260.000.000	-	260.000.000
BKP	Lumbung Pangan 2014	180.000.000	-	180.000.000
BKP	DPM LUEP 2014	870.000.000	-	870.000.000
DPPKAD	Kekurangan Pengembalian Investasi non Permanen	168.500.000	-	168.500.000
		1.809.500.000	-	1.809.500.000
JUMLAH PIUTANG LAINNYA		4.938.518.825	2.856.250.075	2.082.268.750

**5. Penyisihan Piutang..... Rp4.840.707.537,69**

Perhitungan penyisihan piutang ditujukan untuk mengantisipasi kemungkinan piutang tidak tertagih dimasa yang akan datang dan Penyisihan piutang ini bukan dimaksudkan untuk menghapus hak tagih Pemerintah kepada debitur tetapi hanya untuk menyajikan jumlah piutang sebesar *Net Realizable Value*. Perhitungan Penyisihan Piutang berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang Daerah adalah sebagai berikut:

NAMA PIUTANG	SALDO PIUTANG YANG MASIH HARUS DIBAYAR	JUMLAH PENYISIHAN	SALDO AKHIR SETELAH PENYISIHAN
Piutang Pajak	4.818.150.975,00	(376.673.770,50)	4.441.477.204,50
Piutang Retribusi	11.763.639.967,00	(236.290.041,75)	11.527.349.925,25
Bagian Lancar Tagihan penjualan angsuran	3.006.677.643,77	(1.371.493.650,44)	1.635.183.993,34
Piutang Lainnya	4.938.518.825,00	(2.856.250.075,00)	2.082.268.750,00
Jumlah	24.526.987.410,77	(4.840.707.537,69)	19.686.279.873,09

6. Persediaan Rp25.572.952.397,00

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, yang masih berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah. Jumlah persediaan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Persediaan	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
1 ATK/Pakai Habis	749.165.633,00	119.077.402,00
2 Meterai dan Perangko	5.657.500,00	1.617.500,00
3 Bahan pakai habis	4.132.530.450,72	135.526.280,00
4 Bahan/material/aspal	923.781.685,00	1.097.380.615,00
5 Obat-obatan	6.848.140.163,28	11.509.815.947,00
6 Bahan pendukung operasional	260.656.455,00	171.369.308,00
7 Alat listrik	278.176.050,00	239.736.970,00
8 Barang logistik (karung banjir)	-	42.918.290,00
9 Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	11.355.859.665,00	27.830.003.545,00
10 Karcis barang cetakan	538.711.795,00	798.510.600,00
11 Persediaan ternak kereman	451.290.000,00	531.600.000,00
12 Persediaan ikan	28.983.000,00	44.258.500,00
Jumlah	25.572.952.397,00	42.521.814.957,00

Persediaan dinilai berdasarkan hasil perhitungan fisik (*opname*) terhadap persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir dan/atau nilai wajar yang ditetapkan oleh pengurus barang masing-masing SKPD.

**B. Investasi Jangka Panjang Rp115.249.198.352,44**

Saldo Investasi Jangka Panjang merupakan saldo penempatan Dana Pemerintah Kabupaten Grobogan pada BUMD dengan umur lebih dari satu tahun Per 31 Desember 2014 dengan rincian:

<i>Investasi Jangka Panjang</i>	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
1 Investasi Non Permanen (Nilai Bersih)	-	240.000.000,00
2 Investasi Permanen	115.249.198.352,44	85.451.135.672,92
	<u>115.249.198.352,44</u>	<u>85.691.135.672,92</u>

1. Investasi Non Permanen Rp0,00

Investasi non permanen pada tahun 2013 sebesar Rp240.000.000,00 sedangkan pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp0,00, hal ini karena berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Grobogan dengan para penerima dana penguatan kelembagaan pangan desa dan penerima dana penguatan modal pembelian ternak dicapai kesepakatan bahwa dana tersebut dikembalikan ke kas daerah sebesar pokok penyaluran ditambah dengan bunga. Merujuk angka investasi nonpermanen pada tahun 2013 (nilai dana yang telah disalurkan) sebesar Rp240.000.000,00, sedangkan berdasarkan kesepakatan para penerima dana akan mengembalikan sebesar Rp264.000.000,00 sampai dengan bulan Nopember 2014. Perkembangan sampai dengan per 31 Desember 2014 jumlah realisasi pembayaran dari para penerima penyaluran dana tersebut diatas baru sebesar Rp95.500.000,00 sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp168.500.000,00. Atas kekurangan setoran tersebut maka Pemerintah Kabupaten Grobogan tidak lagi mencatat kedalam investasi non permanen tetapi mereklasnya kedalam piutang lainnya pada neraca.

2. Investasi Permanen Rp115.249.198.352,44

Jumlah Investasi Permanen merupakan penempatan dana Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam bentuk Penyertaan modal Pemerintah Daerah yang bersifat permanen (ditujukan untuk kepemilikan) yang dicatat dengan menggunakan metode biaya (*cost method*) maupun metode ekuitas (*equity method*). Rincian atas investasi permanen adalah sebagai berikut:

<i>Investasi Permanen</i>	Metode Pencatatan	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
PD. BPR BKK Purw odadi	Ekuitas	37.947.445.556,38	34.184.260.784,49	3.763.184.771,90
PD. BPR Purw a Artha	Ekuitas	15.673.162.426,00	15.368.526.970,59	304.635.455,41
PD. Purw a Aksara	Ekuitas	4.228.633.142,06	4.088.383.405,84	140.249.736,22
PDAM	Ekuitas	35.497.398.896,00	11.415.103.325,00	24.082.295.571,00
PD. Grobogan Multi Farm	Ekuitas	1.716.558.332,00	2.209.661.187,00	(493.102.855,00)
PT. PRPP Jaw a Tengah	Biaya	531.000.000,00	530.200.000,00	800.000,00
PT Bank Jateng	Biaya	19.655.000.000,00	17.655.000.000,00	2.000.000.000,00
Jumlah		<u>115.249.198.352,44</u>	<u>85.451.135.672,92</u>	<u>29.798.062.679,53</u>



- a. Investasi pada Perusahaan Daerah BPR BKK Purwodadi terdiri atas saham dengan komposisi persentase kepemilikan 51,39 persen dimana perbandingannya sebagai berikut:

<i>Investasi Permanen</i>	<i>Modal yang Disetor</i>
BPR. BKK Purwodadi	
Pemprov Jawa Tengah	35.895.723.549,62
Pemkab Grobogan	37.947.445.556,38
	<u>73.843.169.106,00</u>

Nilai ekuitas PD. BPR BKK Purwodadi per 31 Desember 2014 sebesar Rp73.843.169.106,00 sehingga dengan kepemilikan 51,39 persen nilai investasi Pemerintah Kabupaten Grobogan adalah sebesar Rp37.947.445.556,38.

- b. Perusahaan Daerah BPR Purwa Artha didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah BPR Purwa Artha sebagaimana telah diubah berkali-kali, terakhir dengan Perda Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 1997 tentang Perusahaan Daerah BPR Bank Purwa Artha. Sampai dengan 31 Desember 2014 Pemerintah Kabupaten Grobogan memiliki 100% saham BPR Bank Purwa Artha. Nilai ekuitas PD. BPR Purwa Artha per 31 Desember 2014 sebesar Rp15.673.162.426,00.
- c. Perusahaan Daerah Purwa Aksara didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 1989 tentang Perusahaan Daerah Purwa Aksara. Sampai dengan 31 Desember 2014 Pemerintah Kabupaten Grobogan memiliki 100% saham PD. Purwa Aksara. Nilai ekuitas PD. Purwa Aksara per 31 Desember 2014 sebesar Rp4.228.633.142,06.
- d. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 1986 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 1986 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum. Sampai dengan 31 Desember 2014 Pemerintah Kabupaten Grobogan memiliki 100% saham PDAM. Nilai ekuitas PDAM per 31 Desember 2014 sebesar Rp35.497.398.896,00.
- e. Perusahaan Daerah Grobogan Multi Farm didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusda Aneka Usaha Pertanian "Grobogan Multi Farm". Sampai dengan 31 Desember 2014 Pemerintah Kabupaten Grobogan memiliki 100% saham Grobogan Multi Farm. Nilai ekuitas PD. Grobogan Multi Farm per 31 Desember 2014 sebesar Rp1.716.558.332,00.



- f. PT. Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah didirikan bersama-sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1993. Modal yang ditempatkan dan disetor oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan adalah sebesar Rp531.000.000,00.
- g. Investasi pada Bank BPD Jateng bertambah menjadi sebesar Rp19.655.000.000,00 yang merupakan akumulasi setoran penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan. Sedangkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merupakan pemegang mayoritas saham pada Bank BPD Jateng. Kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah merupakan pemegang saham minoritas dan persentase kepemilikan.

C. Aset Tetap Rp2.141.304.817.299,93

Akun ini menunjukkan jumlah kekayaan milik Pemerintah Kabupaten Grobogan berupa aset tetap dengan usia manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2014 sebesar Rp2.141.298.277.299,93 merupakan nilai Aset Tetap yang dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan dan belum memperhitungkan depresiasi (penyusutan). Rincian Aset Tetap berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2013	Mutasi bersih	31 Desember 2014
Aset Tetap:	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Tanah	332.655.736.368,67	16.556.473.385,00	349.212.209.753,67
Peralatan dan Mesin	235.098.720.913,46	29.286.957.095,60	264.385.678.009,06
Gedung dan Bangunan	563.888.546.469,29	60.385.979.308,10	624.274.525.777,39
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	504.817.675.649,45	175.573.002.083,66	680.390.677.733,11
Aset Tetap Lainnya	210.409.158.833,15	12.268.994.693,55	222.678.153.526,70
Konstruksi dalam Pengerjaan	944.958.500,00	(581.386.000,00)	363.572.500,00
	<u>1.847.814.796.734,02</u>	<u>293.490.020.565,91</u>	<u>2.141.304.817.299,93</u>

Mutasi bersih Aset Tetap sebesar Rp293.490.020.565,91 terdiri atas mutasi penambahan nilai Aset Tetap sebesar Rp427.130.236.311,21 dan mutasi pengurangan nilai Aset Tetap sebesar Rp136.066.284.091,29 dan penambahan dari belanja di FKTP sebesar Rp.2.426.068.346,00. Penambahan dan Pengurangan nilai Aset Tetap terdiri atas:

1. penambahan aset tetap dari belanja;
2. penerimaan aset dari donasi/hibah;
3. penambahan aset mutasi masuk dari SKPD lain;
4. penambahan aset tetap yang belum tercatat;
5. reklasifikasi masuk dari akun lain yang tidak merubah total aset;
6. koreksi pembukuan yang menambah nilai aset;
7. penambahan dari belanja BOS tahun 2013;
8. penambahan dari validasi lainnya.
9. Penambahan aset FKTP dari dana JKN.

Sedangkan pengurangan nilai Aset Tetap terdiri atas:



- 1) penghapusan aset tetap;
- 2) pengurangan aset karena dihibahkan ke masyarakat;
- 3) pengurangan karena dibawah nilai kapitalisasi;
- 4) mutasi ke SKPD lain;
- 5) reklasifikasi keluar ke akun lain yang tidak mengubah jumlah total aset tetap;
- 6) koreksi pembukuan yang mengurangi nilai aset;
- 7) pengurangan karena validasi lainnya.

Rincian masing-masing komponen penambahan dan pengurangan aset tetap tersebut di atas adalah sebagai berikut:

	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jumlah
a. Penambahan Aset Tetap:							
1. Dari belanja	4.486.624.112,00	32.180.682.954,95	57.216.126.176,36	176.885.465.132,58	4.092.292.809,41	-	274.861.191.185,30
2. Dari Hibah	125.000.000,00	1.574.884.692,00	-	2.179.566.798,00	-	-	3.879.451.490,00
3. Mutasi masuk dari SKPD lain	2.445.642.742,00	1.289.918.190,00	24.264.898.300,00	-	198.667.000,00	-	28.199.126.232,00
4. Aset yang sebelumnya tidak tercatat	16.698.366.316,00	2.012.400.674,00	2.554.902.395,00	5.531.333,33	-	-	21.271.200.718,33
5. Reklasifikasi	-	4.162.018.247,13	3.851.271.898,00	5.313.432.163,66	4.165.563.722,32	363.572.500,00	17.855.858.531,11
6. Koreksi pembukuan	119.352.246,00	575.320.700,00	743.021.600,00	169.416.500,00	-	-	1.607.111.046,00
7. Dari dana BOS	-	3.306.084.653,00	-	22.805.300,00	6.710.505.126,00	-	10.039.395.079,00
8. Validasi Lainnya	131.237.126,00	15.838.549.641,20	48.664.036.382,47	237.357.269,46	4.461.370.896,34	-	69.332.551.315,47
9. Belanja Aset FKTP	-	2.425.393.346,00	-	675.000,00	-	-	2.426.068.346,00
	24.006.222.542,00	63.365.253.098,29	137.294.256.751,83	184.814.249.497,03	19.628.399.554,07	363.572.500,00	429.471.953.943,21
b. Pengurangan Aset Tetap:							
1. Penghapusan aset tetap	874.488.000,00	3.281.106.571,38	4.430.077.363,00	5.400.000,00	400.000,00	-	8.591.471.934,38
2. Dihibahkan ke masyarakat	-	-	-	-	4.564.440,08	-	4.564.440,08
3. Dibawah nilai kapitalisasi	-	34.849.227,00	1.036.126.500,00	-	-	-	1.070.975.727,00
4. Mutasi ke SKPD lain	2.445.642.742,00	1.417.318.190,71	22.566.536.300,00	-	1.769.629.000,00	-	28.199.126.232,71
5. Reklasifikasi	671.318.415,00	4.307.898.834,16	3.873.155.837,66	8.957.582.801,37	2.307.000,00	944.958.500,00	18.757.221.388,19
6. Koreksi pembukuan	321.750.000,00	2.421.101.200,89	233.539.100,00	106.325.950,00	160.127.088,00	-	3.242.843.338,89
7. Validasi lainnya	3.136.550.000,00	22.616.021.978,55	44.768.842.343,06	171.938.662,00	5.422.377.332,44	-	76.115.730.316,05
	7.449.749.157,00	34.078.296.002,69	76.908.277.443,72	9.241.247.413,37	7.359.404.860,52	944.958.500,00	135.981.933.377,29
Jumlah mutasi bersih	16.556.473.385,00	29.286.957.095,60	60.385.979.308,10	175.573.002.083,66	12.268.994.693,55	(581.386.000,00)	293.490.020.565,91

d. Penambahan aset tetap:

- 1) Penambahan aset tetap dari belanja. Penambahan aset tetap dari hasil belanja tahun 2014 meliputi penambahan dari belanja modal maupun belanja non modal yaitu sebesar Rp274.861.191.185,30. Berikut rincian penambahan aset tetap dari belanja berdasarkan SKPD:



Pemerintah Kabupaten Grobogan

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013

SKPD	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jumlah
Dinas Pendidikan	-	6.414.082.470,12	19.958.030.338,18	-	3.622.652.509,41	-	29.994.765.317,71
Dinas Kesehatan	-	2.122.763.698,00	4.445.614.000,00	157.168.900,00	-	-	6.725.546.598,00
RSUD dr.R.Soejati Pwd (BLUD)	-	5.488.978.725,00	3.044.261.000,00	147.105.350,00	-	-	8.680.345.075,00
Dinas Cipta Karya TRK	4.395.181.900,00	1.089.206.700,00	8.728.279.165,18	25.942.645.594,20	-	-	40.155.313.359,37
Dinas Bina Marga	-	531.524.400,00	7.902.677.375,00	112.082.074.384,38	2.003.000,00	-	120.518.279.159,38
Dinas Pengairan	-	447.041.100,00	341.956.625,00	37.702.743.064,00	-	-	38.491.740.789,00
Bappeda	-	113.871.950,00	-	-	-	-	113.871.950,00
Dishubinfom	-	222.350.375,00	1.324.710.925,00	15.475.650,00	-	-	1.562.536.950,00
Badan Lingkungan Hidup	-	452.383.375,00	1.796.627.500,00	-	-	-	2.249.010.875,00
Dispendukcapil	-	173.300.350,00	266.789.000,00	9.192.040,00	-	-	449.281.390,00
BP3AKB	-	915.053.150,00	1.345.559.300,00	7.976.000,00	6.180.000,00	-	2.274.768.450,00
Dinsosnakertrans	89.885.000,00	104.065.000,19	441.094.500,00	-	-	-	635.044.500,19
Dinas Koperasi UMKM	-	34.954.000,00	152.640.000,00	-	-	-	187.594.000,00
Disporabudpar	-	165.982.940,00	243.924.000,00	16.440.200,00	-	-	426.347.140,00
Badan Kesbanglinmas	-	26.650.000,00	-	-	-	-	26.650.000,00
Satpol PP	-	34.376.720,00	-	-	-	-	34.376.720,00
Kepala Daerah dan Wakil DPRD	-	-	-	-	-	-	-
Sekretariat Daerah	-	5.992.409.995,00	259.600.000,00	-	211.196.300,00	-	6.463.206.295,00
Sekretariat DPRD	-	1.016.814.580,50	-	76.545.450,00	-	-	1.093.360.030,50
DPPKAD selaku SKPD	1.557.212,00	1.165.712.352,00	125.000.000,00	-	-	-	1.292.269.564,00
DPPKAD selaku PPKD	-	-	-	-	-	-	-
Inspektorat	-	111.830.000,00	186.735.000,00	-	-	-	298.565.000,00
Kecamatan Kedungjati	-	42.557.000,00	141.242.000,00	-	-	-	183.799.000,00
Kecamatan Karangrayung	-	62.616.310,00	132.977.200,00	-	-	-	195.593.510,00
Kecamatan Penawangan	-	72.654.000,00	-	-	-	-	72.654.000,00
Kecamatan Toroh	-	85.260.000,00	50.000.000,00	-	-	-	135.260.000,00
Kecamatan Geyer	-	43.350.000,00	141.645.000,00	-	-	-	184.995.000,00
Kecamatan Pulokulon	-	52.660.000,00	146.511.000,00	-	-	-	199.171.000,00
Kecamatan Kradenan	-	68.220.000,00	155.280.000,00	-	-	-	223.500.000,00
Kecamatan Gabus	-	67.565.000,00	92.435.000,00	-	-	-	160.000.000,00
Kecamatan Ngarangan	-	71.060.000,00	169.381.000,00	-	-	-	240.441.000,00
Kecamatan Wirosari	-	52.000.000,00	49.767.000,00	-	-	-	101.767.000,00
Kecamatan Tawangharjo	-	108.000.000,00	-	-	-	-	108.000.000,00
Kecamatan Grobogan	-	63.909.750,00	50.000.000,00	1.510.000,00	-	-	115.419.750,00
Kecamatan Purwodadi	-	24.900.000,00	199.788.000,00	-	-	-	224.688.000,00
Kecamatan Brati	-	45.424.000,00	166.465.000,00	-	-	-	211.889.000,00
Kecamatan Klambu	-	32.700.000,00	159.180.000,00	-	-	-	191.880.000,00
Kecamatan Godong	-	102.392.857,14	94.645.000,00	-	-	-	197.037.857,14
Kecamatan Gubug	-	53.475.000,00	164.925.000,00	-	-	-	218.400.000,00
Kecamatan Tegowanu	-	89.049.987,00	49.300.000,00	-	-	-	138.349.987,00
Kecamatan Tanggungharjo	-	106.004.280,00	50.955.000,00	-	-	-	156.959.280,00
Kelurahan Wirosari	-	54.000.000,00	-	-	-	-	54.000.000,00
Kelurahan Kunden	-	37.995.000,00	-	-	-	-	37.995.000,00
Kelurahan Kalongan	-	25.740.000,00	199.812.000,00	-	-	-	225.552.000,00
Kelurahan Grobogan	-	24.720.000,00	-	-	-	-	24.720.000,00
Kelurahan Purwodadi	-	40.350.000,00	121.222.500,00	-	-	-	161.572.500,00
Kelurahan Kuripan	-	22.075.000,00	43.550.000,00	-	-	-	65.625.000,00
Kelurahan Danyang	-	41.015.500,00	79.760.000,00	-	-	-	120.775.500,00
BPPT	-	238.331.850,00	-	-	-	-	238.331.850,00
Badan Kepegawaian Daerah	-	32.300.000,00	89.607.000,00	-	-	-	121.907.000,00
BPPD	-	263.412.500,00	-	9.627.500,00	6.995.000,00	-	280.035.000,00
Badan Ketahanan Pangan	-	146.150.000,00	-	-	-	-	146.150.000,00
Bapermas	-	83.175.000,00	197.960.000,00	-	-	-	281.135.000,00
Kantor Arsip Daerah	-	102.248.700,00	-	-	-	-	102.248.700,00
Kantor Perpustakaan Daerah	-	55.495.000,00	-	39.556.000,00	88.406.000,00	-	183.457.000,00
Distan TPH	-	2.064.528.900,00	2.525.844.000,00	645.325.000,00	154.860.000,00	-	5.390.557.900,00
Disnakan	-	569.225.400,00	748.887.400,00	-	-	-	1.318.112.800,00
Dishutbun	-	262.603.600,00	99.636.500,00	24.480.000,00	-	-	386.720.100,00
Disperindagtaben	-	250.166.440,00	531.851.848,00	7.600.000,00	-	-	789.618.288,00
Jumlah	4.486.624.112,00	32.180.682.954,95	57.216.126.176,36	176.885.465.132,58	4.092.292.809,41	-	274.861.191.185,30

2) Penambahan aset dari hibah/donasi meliputi penambahan aset dari hibah atau donasi tahun 2014 sebesar Rp3.879.451.490,00 terdiri dari:

- hibah berupa Tanah TPA dari desa Godong yang dicatat dan diakui pada Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan sebesar Rp125.000.000,00;
- hibah alat berat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp75.409.500,00;



- hibah berupa sepeda motor roda 3 dari BRI Purwodadi yang dicatat dan diakui pada Dinas Cipta Karya sebesar Rp200.000.000,00;
- hibah berupa bangunan air irigasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang dicatat dan diakui pada Dinas Pengairan sebesar Rp2.179.566.798,00;
- hibah berupa sepeda motor dari Pemerintah Provinsi Jateng yang dicatat dan diakui pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sebesar Rp472.750.000,00;
- hibah dari BPBD Prov Jateng berupa pompa air sebesar Rp9.602.000,00;
- hibah berupa *Water Treatment Portable* sebesar Rp65.807.500,00;
- hibah dari BNPB berupa Motor Trail sebesar Rp53.747.592,00;
- hibah berupa mobil tanki air sebesar Rp323.565.000,00;
- hibah berupa *mobil rescue double cabin 4 WD* sebesar Rp449.412.600,00 yang dicatat dan diakui pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Berikut rincian penambahan aset tetap dari hibah/donasi berdasarkan SKPD:

SKPD	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jumlah
Dinas Cipta Karya TRK	125.000.000,00	200.000.000,00					325.000.000,00
Dinas Pengairan				2.179.566.798,00			2.179.566.798,00
BPBD		902.134.692,00					902.134.692,00
Distan TPH		472.750.000,00					472.750.000,00
Jumlah	125.000.000,00	1.574.884.692,00	-	2.179.566.798,00	-	-	3.879.451.490,00

- 3) Mutasi masuk dari SKPD lain sebesar Rp28.136.411.946,00, merupakan mutasi aset antar SKPD yang tidak menambah nilai aset secara total. Berikut rincian mutasi aset antar SKPD selama tahun 2014:



SKPD	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jumlah
Dinas Pendidikan			49.140.000,00				49.140.000,00
DKK			7.280.000,00				7.280.000,00
Dinas Cipta Karya TRK		62.842.065,00					62.842.065,00
Dinas Bina Marga		70.414.428,00					70.414.428,00
Bappeda		174.228.054,00					174.228.054,00
Dishub infokom			1.820.000,00				1.820.000,00
Dispendukcapil		55.000.000,00					55.000.000,00
Dinsosakertrans		12.644.500,00					12.644.500,00
Dinas Koperasi UMKM		6.150.000,00					6.150.000,00
Disporabudpar	1.650.860.000,00	-	218.640.000,00				1.869.500.000,00
Satpol PP		355.801.997,00			198.667.000,00		554.468.997,00
Sekretariat Daerah		10.318.000,00					10.318.000,00
Sekretariat DPRD		216.686.071,00					216.686.071,00
DPPKAD selaku SKPD	289.000.000,00	-	102.500.000,00				391.500.000,00
Kel. Wirosari			10.920.000,00				10.920.000,00
Kel. Kunden			36.400.000,00				36.400.000,00
Kel. Kalongan			3.640.000,00				3.640.000,00
Kel. Purwodadi			1.820.000,00				1.820.000,00
Badan Kepegawaian Daerah		15.000.000,00					15.000.000,00
Badan Ketahanan Pangan		55.473.140,00					55.473.140,00
Bapemas		14.941.288,00					14.941.288,00
Distan TPH	55.782.742,00						55.782.742,00
Disnakan			5.460.000,00				5.460.000,00
Dishutbun	387.285.714,00		840.779.787,00				1.228.065.501,00
Disperindagamben	62.714.286,00	240.418.647,00	22.986.498.513,00				23.289.631.446,00
Jumlah	2.445.642.742,00	1.289.918.190,00	24.264.898.300,00	-	198.667.000,00	-	28.199.126.232,00

4) Pencatatan atas aset-aset yang sebelumnya tidak tercatat sebesar Rp21.271.200.718,33 terdiri dari:

➤ tanah Rp16.698.366.316,00 pada SKPD sebagai berikut:

SKPD	NILAI
Dinas Pendidikan	8.801.450.000,00
Dinas Kesehatan	2.101.563.000,00
RSUD	1.058.715.000,00
Dinas Cipta Karya	110.700.000,00
Dinas Pengairan	49.532.000,00
Badan Kesbanglinmas	363.200.000,00
Sekretariat Daerah	243.212.000,00
DPPKAD	2.538.870.000,00
Kec. Gabus	119.000.000,00
Kec. Taw angharjo	15.301.000,00
Kec. Grobogan	427.968.000,00
Kel. Grobogan	118.355.316,00
Disnakan	157.440.000,00
Dishutbun	123.300.000,00
Disperindag	469.760.000,00
Jumlah	16.698.366.316,00

- alat berat yang diakui pada Dinas Kesehatan sebesar Rp7.400.000,00
- alat angkutan sebesar Rp332.144.598,00 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp322.089.598,00; alat angkutan yang diakui pada Dinas Cipta Karya Rp202.979.156,00; alat angkutan pada DPPKAD Rp400.500.000,00; alat angkutan pada Kecamatan Tegowanu sebesar Rp10.055.000,00
- alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp295.431.460,00 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp66.138.000,00 Dinas Kesehatan sebesar Rp194.503.460,00 dan Dinas Cipta Karya sebesar Rp34.790.000,00.
- alat studio dan komunikasi yang diakui pada Dinas Kesehatan sebesar Rp20.300.000,00
- alat laboratorium yang diakui pada Dinas Kesehatan sebesar Rp753.645.460,00



- bangunan gedung sebesar Rp2.554.902.395,00 pada SKPD sebagai berikut:

SKPD	NILAI
Dinas Pendidikan	430.300.000,00
Dinas Kesehatan	49.800.000,00
Disporabudpar	177.962.911,00
Badan Kesbanglinmas	202.165.000,00
DPPKAD	850.748.992,00
Kec. Gabus	150.000.000,00
Kel. Wirosari	123.086.004,00
Kel. Kuripan	48.000.000,00
Disperindagtamben	522.839.488,00
Jumlah	2.554.902.395,00

- jaringan yang diakui pada Dinas Pendidikan sebesar Rp5.531.333,33,00

- 5) Reklasifikasi aset sebesar Rp17.855.858.531,11 merupakan reklasifikasi antar akun yang tidak menambah nilai aset secara total. Berikut rincian reklasifikasi aset antar akun berdasarkan SKPD:



Pemerintah Kabupaten Grobogan

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013

SKPD	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jumlah
Dinas Pendidikan		4.750.000,00					4.750.000,00
Dinas Kesehatan		837.637.500,00		99.713.000,00	1.850.000,00		939.200.500,00
RSUD dr. R. Soedjati		1.201.863.072,40			746.358.759,95	363.572.500,00	2.311.794.332,34
Dinas Cipta Karya TRK			1.573.001.500,00	1.208.165.239,66	3.283.353.462,37		6.064.520.202,03
Dinas Pengairan		4.929.715,00		3.851.531.328,00	127.581.500,00		3.984.042.543,00
Bappeda		7.965.000,00			2.220.000,00		10.185.000,00
Dishub Infokom		11.243.750,00					11.243.750,00
Disporabudpar			39.808.000,00				39.808.000,00
Dinsosnakertrans		24.123.000,00					24.123.000,00
Dinas Koperasi UMKM		5.000.000,00					5.000.000,00
Kant. Satpol PP		12.591.740,00					12.591.740,00
Sekretariat Daerah		1.229.812.736,13	1.514.704.598,00	144.387.596,00			2.888.904.930,13
Sekretariat DPRD		371.844.584,25					371.844.584,25
DPPKAD selaku SKPD		10.209.000,00		8.125.000,00			18.334.000,00
Inspektorat			24.950.000,00				24.950.000,00
Kc. Kedungjati		8.000.000,00					8.000.000,00
Kc. Penawangan		4.700.000,00					4.700.000,00
Kecamatan Karangrayung			23.959.800,00				23.959.800,00
Kecamatan Geyer		5.000.000,00					5.000.000,00
Kecamatan Pulokulon			39.600.000,00				39.600.000,00
Kecamatan Kradenan		3.500.000,00					3.500.000,00
Kecamatan Gabus		5.000.000,00					5.000.000,00
Kc. Ngaringan		5.000.000,00					5.000.000,00
Kecamatan Tawangharjo		9.600.000,00	40.000.000,00				49.600.000,00
Kc. Grobogan			134.808.000,00	1.510.000,00			136.318.000,00
Kecamatan Brati					1.000.000,00		1.000.000,00
Kc. Godong		11.177.419,35					11.177.419,35
Kecamatan Gubug		7.000.000,00					7.000.000,00
Kelurahan Wirosari		350.000,00					350.000,00
Kelurahan Kalongan					1.200.000,00		1.200.000,00
Kelurahan Grobogan					500.000,00		500.000,00
Kel. Danyang		1.500.000,00					1.500.000,00
BPPT			14.850.000,00				14.850.000,00
BKD					1.500.000,00		1.500.000,00
Badan Ketahanan Pangan		11.470.000,00					11.470.000,00
Kantor Arsip Daerah		2.000.000,00					2.000.000,00
Kantor Perpustakaan Daerah		26.591.000,00					26.591.000,00
Din. Pertanian		175.513.230,00					175.513.230,00
Disnakan		56.867.950,00					56.867.950,00
Dishutbun		2.475.000,00	445.590.000,00				448.065.000,00
Disperindagtamben		104.303.550,00					104.303.550,00
Jumlah	-	4.162.018.247,13	3.851.271.898,00	5.313.432.163,66	4.165.563.722,32	363.572.500,00	17.855.858.531,11

- 6) Koreksi pembukuan sebesar Rp1.607.111.046,00 merupakan koreksi penambahan nilai aset yang telah dicatat tetapi nilainya dianggap masih kurang catat. Berikut rincian koreksi pembukuan berdasarkan SKPD:



SKPD	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jumlah
Din. PDK			534.000.000				534.000.000,00
Dinas Kesehatan		517.507.700					517.507.700,00
Dinas Cipta Karya TRK				169.416.500,00			169.416.500,00
Dinas Koperasi UMKM		1.048.000,00	209.021.600,00				210.069.600,00
Sekretariat Daerah		5.650.000,00					5.650.000,00
DPPKAD selaku SKPD		38.265.000,00					38.265.000,00
Kelurahan Purwodadi		350.000,00					350.000,00
Badan Ketahanan Pangan		12.500.000,00					12.500.000,00
Disperindag tamben	119.352.246,00						119.352.246,00
Jumlah	119.352.246,00	575.320.700,00	743.021.600,00	169.416.500,00	-	-	1.607.111.046,00

7) Penambahan Aset Tetap dari Dana BOS TA 2014. Penambahan aset yang berasal dari pelaksanaan Dana BOS TA.2014 sebesar Rp10.039.395.079,00 yang dicatat dan diakui pada Dinas Pendidikan.

8) Validasi lainnya sebesar Rp69.332.551.315,47 merupakan validasi internal pada Dinas Pendidikan sehingga nilai aset bertambah menjadi sebagai berikut:

- nilai tanah bertambah sebesar Rp131.237.126,00
- nilai alat berat bertambah sebesar Rp66.270.822,71
- nilai alat angkutan bertambah sebesar Rp511.103.656,33
- nilai alat bengkel dan alat ukur bertambah sebesar Rp20.785.182,49
- nilai alat pertanian bertambah sebesar Rp7.774.000,00
- nilai alat kantor dan rumah tangga bertambah sebesar Rp10.967.876.900,39
- nilai alat studio bertambah sebesar Rp750.583.720,41
- nilai alat kedokteran bertambah sebesar Rp16.880.500,00
- nilai alat laboratorium bertambah sebesar Rp3.496.009.895,09
- nilai alat keamanan bertambah sebesar Rp1.264.963,78
- nilai gedung bertambah sebesar Rp48.661.086.382,47
- nilai bangunan monumen bertambah sebesar Rp2.950.000,00
- nilai bangunan air irigasi bertambah sebesar Rp101.665.369,46
- nilai instalasi bertambah sebesar Rp64.735.500,00
- nilai jaringan bertambah sebesar Rp70.956.400,00
- nilai buku perpustakaan bertambah menjadi sebesar Rp3.023.163.533,25
- nilai barang bercorak kesenian bertambah menjadi sebesar Rp1.438.207.363,09
- nilai aset tak berwujud bertambah menjadi sebesar Rp123.050.989,79.

9) Penambahan aset yang diperoleh dari dana Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang diakui dan dicatat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp2.426.068.346,00 terdiri dari:

- alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp671.535.500,00



- alat studio dan komunikasi sebesar Rp15.750.000,00
- alat kedokteran sebesar Rp1.701.907.846,00
- alat laborat sebesar Rp36.200.000,00
- jaringan sebesar Rp675.000,00.

e. Pengurangan aset tetap

- 1) Pengurangan aset tetap karena penghapusan sebesar Rp8.591.471.934,38. Penghapusan aset tetap dilakukan terhadap aset-aset dalam kondisi rusak berat dan tidak dapat dipergunakan lagi. Selain itu, pengurangan nilai aset tetap karena penghapusan juga berkaitan dengan rehabilitasi aset tetap. Penghapusan aset tetap tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Berikut rincian pengurangan aset tetap karena penghapusan berdasarkan SKPD:

SKPD	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jumlah
Dinas Pendidikan			2.905.774.996,00				2.905.774.996,00
Dinas Kesehatan	874.488.000,00	302.743.333,00	52.800.000,00	1.000.000,00	400.000,00		1.231.431.333,00
RSUD dr. R. Soedjati Pwd (BLUD)		40.000.000,00	697.400.000,00				737.400.000,00
Dinas Cipta Karya TRK		146.002.327,00					146.002.327,00
Dinas Pengairan		49.708.900,00					49.708.900,00
Dinas Bina Marga		857.015.846,38	651.368.000,00				1.508.383.846,38
Bappeda		161.028.500,00					161.028.500,00
Dishubinfokom		2.000.000,00	46.896.000,00				48.896.000,00
Dispendukcapil		63.960.450,00		4.400.000,00			68.360.450,00
Dinas Koperasi UMKM		28.250.000,00	50.000.000,00				78.250.000,00
Sekretariat Daerah		566.184.600,00					566.184.600,00
Sekretariat DPRD		28.500.000,00					28.500.000,00
DPPKAD selaku SKPD		714.542.540,00	25.838.367,00				740.380.907,00
Inspektorat		6.900.000,00					6.900.000,00
Kecamatan Kedungjati		7.700.000,00					7.700.000,00
Kecamatan Penawangan		32.264.500,00					32.264.500,00
Kecamatan Toroh		7.550.000,00					7.550.000,00
Kecamatan Kradenan		11.250.000,00					11.250.000,00
Kecamatan Gabus		3.339.000,00					3.339.000,00
Kecamatan Tanggungharjo		1.000.000,00					1.000.000,00
Kelurahan Kalongan		3.300.000,00					3.300.000,00
Kelurahan Purwodadi		1.450.000,00					1.450.000,00
Badan Kepegawaian Daerah		70.000.000,00					70.000.000,00
Kantor Perpustakaan Daerah		2.000.000,00					2.000.000,00
Disnakan		111.555.305,00					111.555.305,00
Disperindagtamban		62.861.270,00					62.861.270,00
Jumlah	874.488.000,00	3.281.106.571,38	4.430.077.363,00	5.400.000,00	400.000,00	-	8.591.471.934,38

- 2) Pengurangan karena dihibahkan ke masyarakat sebesar Rp4.564.440,08 merupakan aset tetap berupa buku perpustakaan di Dinas Pendidikan yang semula tercatat tetapi sebenarnya aset tersebut telah dihibahkan kepada masyarakat disertai dengan berita acara serah terima hibah.

- 3) Pengurangan aset tetap karena di bawah nilai kapitalisasi sebesar Rp1.070.975.727,00 merupakan pengeluaran aset tetap dengan nilai dibawah satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Berikut rincian aset tetap dibawah satuan minimum kapitalisasi berdasarkan SKPD:



SKPD	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jumlah
Dinas PDK			49.140.000				49.140.000,00
Dinas Kesehatan		6.272.641,00	7.280.000,00				13.552.641,00
Bappeda		2.425.000,00					2.425.000,00
Dishubinfokom			875.696.500,00				875.696.500,00
Disporabudpar			3.640.000,00				3.640.000,00
Sekretariat Daerah		502.000,00					502.000,00
Kecamatan Karangrayung		250.000,00					250.000,00
Kecamatan Wirosari			9.000.000,00				9.000.000,00
Kecamatan Klambu		2.500.000,00					2.500.000,00
Kel. Wirosari			10.920.000,00				10.920.000,00
Kelurahan Kunden		250.000,00	36.400.000,00				36.650.000,00
Kelurahan Kalongan			3.640.000,00				3.640.000,00
Kel. Purwodadi			1.820.000,00				1.820.000,00
BPPT		10.000.000,00					10.000.000,00
Badan Ketahanan Pangan		8.074.586,00					8.074.586,00
Disnakan		4.575.000,00	5.460.000,00				10.035.000,00
Dishutbun			7.280.000,00				7.280.000,00
Disperindagtamban			25.850.000,00				25.850.000,00
Jumlah	-	34.849.227,00	1.036.126.500,00	-	-	-	1.070.975.727,00

- 4) Pengurangan karena mutasi antar SKPD sebesar Rp28.199.126.232,71 merupakan perpindahan aset tetap antar SKPD di wilayah Kabupaten Grobogan. Berikut rincian mutasi aset antar SKPD:

SKPD	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jumlah
Dinas Kesehatan							-
Dinas Ciptakarya TRK			22.249.036.300,00		1.570.962.000,00		23.819.998.300,00
Dishubinfokom							-
Dispendukcapil	100.000.000,00		27.500.000,00				127.500.000,00
Sekretariat Daerah		1.174.605.690,71			198.667.000,00		1.373.272.690,71
Sekretariat DPRD		12.644.500,00					12.644.500,00
DPPKAD selaku SKPD	1.650.860.000,00	175.068.000,00	215.000.000,00				2.040.928.000,00
Kecamatan Tegowanu	189.000.000,00		75.000.000,00				264.000.000,00
Kel. Grobogan	55.782.742,00						55.782.742,00
Kel. Purwodadi	450.000.000,00						450.000.000,00
BKD		55.000.000,00					55.000.000,00
Jumlah	2.445.642.742,00	1.417.318.190,71	22.566.536.300,00	-	1.769.629.000,00	-	28.199.126.232,71

- 5) Pengurangan karena reklasifikasi sebesar Rp18.757.221.388,19 merupakan pembenahan/pemindahan pencatatan antar akun. Berikut rincian reklasifikasi aset berdasarkan SKPD:



SKPD	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jumlah
Dinas Pendidikan		4.750.000					4.750.000,00
Dinas Kesehatan		700.007.460,00	85.870.000,00	36.064.000,00			821.941.460,00
RSUD dr.R.Soejati (BLUD)		1.249.613.482,34	915.075.500,00	147.105.350,00			2.311.794.332,34
Dinas Ciptakarya TRK		36.550.000,00	1.597.678.239,66	3.521.883.462,37		944.958.500,00	6.101.070.202,03
Dinas Pengairan			127.581.500,00	3.856.461.043,00			3.984.042.543,00
Bappeda		10.185.000,00					10.185.000,00
Dishubinfokom		41.743.750,00					41.743.750,00
BP3AKB		11.595.000,00					11.595.000,00
Disporabudpar		-	39.808.000,00				39.808.000,00
Dinsosnakertrans		24.123.000,00					24.123.000,00
Din. Koperasi UMKM		5.000.000,00					5.000.000,00
Badan Kesbanglinmas		32.988.666,00					32.988.666,00
Kant. Satpol PP		12.591.740,00					12.591.740,00
Sekretariat Daerah	671.318.415,00	1.282.398.552,21	479.654.598,00	1.316.722.596,00			3.750.094.161,21
Sekretariat DPRD		324.116.584,25		47.728.000,00			371.844.584,25
DPPKAD selaku SKPD		10.209.000,00		8.125.000,00			18.334.000,00
Inspektorat		24.950.000,00					24.950.000,00
Kc. Kedungjati		8.000.000,00					8.000.000,00
Kecamatan Karangrayung		-	13.280.000,00	10.679.800,00			23.959.800,00
Kc. Penawangan		4.700.000,00					4.700.000,00
Kecamatan Geyer		30.325.000,00					30.325.000,00
Kecamatan Pulokulon		4.800.000,00	39.600.000,00				44.400.000,00
Kecamatan Kradenan		3.500.000,00					3.500.000,00
Kecamatan Gabus		5.000.000,00					5.000.000,00
Kc. Ngaringan		5.000.000,00					5.000.000,00
Kecamatan Tawangharjo		49.600.000,00					49.600.000,00
Kc. Grobogan			134.808.000,00	1.510.000,00			136.318.000,00
Kecamatan Brati		1.000.000,00					1.000.000,00
Kc. Godong		11.177.419,35					11.177.419,35
Kecamatan Gubug		5.000.000,00		2.000.000,00			7.000.000,00
Kecamatan Tanggunharjo		1.900.000,00					1.900.000,00
Kelurahan Wirosari		19.279.000,00					19.279.000,00
Kelurahan Kunden		31.450.000,00			2.307.000,00		33.757.000,00
Kelurahan Kalongan		1.200.000,00					1.200.000,00
Kelurahan Grobogan		500.000,00					500.000,00
Kel. Danyang		1.500.000,00					1.500.000,00
BPPT			14.850.000,00				14.850.000,00
BKD		1.500.000,00					1.500.000,00
BKP		4.970.000,00		6.500.000,00			11.470.000,00
Bapermas		17.105.000,00					17.105.000,00
Kantor Arsip Daerah		53.001.000,00					53.001.000,00
Kantor Perpustakaan Daerah		7.500.000,00					7.500.000,00
Disperintihol		175.513.230,00					175.513.230,00
Disnakan		55.767.950,00		1.100.000,00			56.867.950,00
Dishutbun		36.788.000,00	424.950.000,00				461.738.000,00
Disperindagtamben		1.000.000,00		1.703.550,00			2.703.550,00
Jumlah	671.318.415,00	4.307.898.834,16	3.873.155.837,66	8.957.582.801,37	2.307.000,00	944.958.500,00	18.757.221.388,19

6) Pengurangan karena koreksi pembukuan sebesar Rp3.242.843.338,89 merupakan pembetulan/koreksi atas kelebihan catat aset tetap. Berikut rincian koreksi pembukuan aset tetap berdasarkan SKPD:

SKPD	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jumlah
Dinas Kesehatan		2.384.020.200,00		99.713.000,00			2.483.733.200,00
Dinas Cipta Karya TRK			22.917.500,00	6.612.950,00	55.848.788,00		85.379.238,00
Dinsosnakertrans		4.050.000,00					4.050.000,00
Dinas Koperasi UMKM			209.021.600,00				209.021.600,00
Disporabudpar					104.278.300,00		104.278.300,00
Badan Kesbanglinmas		3.000.000,00					3.000.000,00
Sekretariat Daerah		5.650.000,89					5.650.000,89
DPPKAD selaku SKPD		12.861.000,00					12.861.000,00
Kelurahan Wirosari	321.750.000,00		1.600.000,00				321.750.000,00
Kelurahan Purwodadi		350.000,00					1.950.000,00
Kelurahan Grobogan		670.000,00					670.000,00
Badan Ketahanan Pangan		10.500.000,00					10.500.000,00
Disperindagtamben		-					-
Jumlah	321.750.000,00	2.421.101.200,89	233.539.100,00	106.325.950,00	160.127.088,00	-	3.242.843.338,89

7) Validasi Lainnya sebesar Rp76.115.730.316,05 merupakan validasi internal pada Dinas Pendidikan, Sekretariat DPRD, Dinas Peternakan dan Perikanan dengan rincian sebagai berikut:

a. nilai tanah pada Dinas Pendidikan berkurang sebesar Rp3.136.550.000,00;



-
- b. Nilai peralatan dan Mesin berkurang sebesar Rp22.616.021.978,55 pada Dinas Pendidikan dan Sekretariat DPRD sebagai berikut:
- nilai alat berat Dinas Pendidikan berkurang sebesar Rp93.193.901,14
 - nilai alat angkutan Dinas Pendidikan berkurang sebesar Rp82.822.000,00
 - nilai alat bengkel dan alat ukur Dinas Pendidikan berkurang menjadi sebesar Rp96.770.050,00
 - nilai alat pertanian dan peternakan Dinas Pendidikan berkurang menjadi sebesar Rp93.627.277,78
 - nilai alat kantor dan rumah tangga Dinas Pendidikan berkurang menjadi sebesar Rp8.858.030.171,74
 - nilai alat kantor dan rumah tangga pada Sekretariat DPRD berkurang menjadi sebesar Rp24.412.200,00
 - nilai alat studio dan komunikasi Dinas Pendidikan berkurang menjadi sebesar Rp481.525.345,12
 - nilai alat kedokteran Dinas Pendidikan berkurang menjadi sebesar Rp119.945.000,00
 - nilai alat laboratorium Dinas Pendidikan berkurang menjadi sebesar Rp12.726.243.569,00
 - nilai alat keamanan Dinas Pendidikan berkurang menjadi sebesar Rp39.452.463,78
- c. Nilai Gedung dan Bangunan berkurang sebesar Rp44.768.842.343,06 pada Dinas Pendidikan dengan rincian sebagai berikut:
- nilai bangunan gedung Dinas Pendidikan berkurang sebesar Rp44.711.100.843,06
 - nilai bangunan monumen Dinas Pendidikan berkurang menjadi sebesar Rp57.741.500,00
- d. Nilai Jalan, Jembatan dan Irigasi pada Dinas Pendidikan berkurang sebesar Rp171.938.662,00 dengan rincian sebagai berikut:
- nilai jalan dan jembatan Dinas Pendidikan berkurang menjadi sebesar Rp17.195.000,00
 - nilai bangunan air irigasi Dinas Pendidikan berkurang menjadi sebesar Rp41.893.300,00
 - nilai instalasi Dinas Pendidikan berkurang menjadi sebesar Rp35.467.350,00
 - nilai jaringan Dinas Pendidikan berkurang menjadi sebesar Rp77.383.012,00
- e. Nilai Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pendidikan berkurang sebesar Rp5.422.377.332,44 dengan rincian sebagai berikut:
- nilai buku perpustakaan Dinas Pendidikan berkurang menjadi sebesar Rp4.797.017.204,67
 - nilai barang bercorak kesenian dan kebudayaan Dinas Pendidikan berkurang menjadi sebesar Rp616.663.927,77



- nilai hewan, ternak, dan tumbuhan Dinas Pendidikan berkurang menjadi sebesar Rp8.696.200,00.

Untuk lebih jelasnya pengurangan dari validasi diatas dapat digambarkan dalam tabel berikut:

SKPD	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jumlah
Dinas Pendidikan	3.136.550.000,00	22.591.609.778,55	44.768.842.343,06	171.938.662,00	5.422.377.332,44		76.091.318.116,05
Sekretariat DPRD		24.412.200,00					24.412.200,00
Jumlah	3.136.550.000,00	22.616.021.978,55	44.768.842.343,06	171.938.662,00	5.422.377.332,44	-	76.115.730.316,05

Selain aset tetap sebagaimana dijelaskan di atas, terdapat barang-barang ekstrakomptabel, yakni barang-barang yang memiliki umur ekonomis lebih dari satu tahun, namun nilainya tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi aset tetap. Saldo barang ekstrakomptabel per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp37.763.045.210,52 yang terdiri atas peralatan dan mesin dengan nilai Rp27.428.466.261,52 gedung dan bangunan dengan nilai Rp9.983.233.949,00 dan aset tetap lainnya dengan nilai sebesar Rp351.345.000,00.

- f. Aset Tetap sebesar Rp2.141.304.817.299,93, terdiri dari Tanah sebesar Rp349.212.209.753,67; Peralatan dan Mesin sebesar Rp264.385.678.009,06; Gedung dan Bangunan sebesar Rp624.274.525.777,39; Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp680.390.677.733,11; Aset Tetap Lainnya sebesar Rp222.678.153.526,70; Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp363.572.500,00 Sedangkan rincian aset tetap per Jenis berdasarkan SKPD dapat dilihat dalam tabel berikut:



Pemerintah Kabupaten Grobogan
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013

SKPD	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jumlah
Dinas Pendidikan	19.881.303.126,00	91.005.253.100,41	356.884.175.356,81	601.317.398,79	70.632.620.374,53	-	539.004.669.356,53
Dinas Kesehatan	2.750.563.000,00	29.391.290.047,58	42.184.226.800,00	272.176.000,00	38.621.000,00	-	74.636.876.847,58
RSUD dr.R.Soejati (BLUD)	3.127.889.000,00	25.782.680.346,91	11.651.253.751,68	-	2.155.724.872,37	363.572.500,00	43.081.120.470,97
Dinas Ciptakarya TRK	5.723.990.500,00	8.420.278.661,81	13.441.502.105,51	40.494.550.094,58	40.506.048.131,16	-	108.586.369.493,06
Dinas Bina Marga	86.063.154.284,67	4.844.504.479,62	11.053.437.725,00	546.019.264.095,74	104.144.054.898,74	-	752.124.415.483,76
Dinas Pengairan	324.850.600,00	2.052.474.885,00	313.214.125,00	85.821.484.363,00	2.676.603.575,00	-	91.188.627.548,00
Bappeda	-	2.088.401.629,00	-	-	22.220.000,00	-	2.110.621.629,00
Dishubinfokom	2.312.846.126,00	4.298.387.033,00	7.976.833.025,00	562.136.250,00	-	-	15.150.202.434,00
Badan Lingkungan Hidup	736.020.435,00	2.750.518.198,00	2.960.049.917,00	213.520.600,00	-	-	6.660.109.150,00
Dispendukapil	320.000.000,00	1.842.690.600,00	1.118.751.000,00	58.435.540,00	2.500.000,00	-	3.342.377.140,00
BP3AKB	13.882.000,00	4.749.285.360,00	3.277.770.950,00	11.626.000,00	35.467.000,00	-	8.088.031.310,00
Dinsosnaketrans	1.679.485.000,00	1.624.777.810,19	2.664.747.000,00	101.433.800,00	-	-	6.070.443.610,19
Dinas Koperasi UMKM	400.000.000,00	732.532.157,00	1.015.763.100,00	-	-	-	2.148.295.257,00
Disporabudpar	8.914.750.000,00	1.433.705.846,00	8.730.633.561,00	246.349.700,00	136.358.850,00	-	19.461.797.957,00
Badan Keshanglinmas	363.200.000,00	245.367.834,00	313.565.000,00	-	1.000.000,00	-	923.132.834,00
Satpol PP	-	1.385.764.528,00	-	-	198.667.000,00	-	1.584.431.528,00
DPRD	-	-	-	-	-	-	-
Kepala Daerah dan Wakil	-	-	-	-	-	-	-
Sekretariat Daerah	41.159.970.500,00	23.188.940.215,16	30.203.973.098,39	757.028.596,00	646.752.300,00	-	95.956.664.709,55
Sekretariat DPRD	3.065.000.000,00	10.703.585.663,50	19.716.901.750,00	76.545.450,00	138.285.660,00	-	33.700.318.523,50
DPPKAD selaku SKPD	2.861.017.212,00	7.348.727.633,00	1.120.008.992,00	84.156.000,00	45.375.150,00	-	11.459.284.987,00
Inspektorat	285.000.000,00	1.243.267.093,00	1.530.134.000,00	-	32.683.000,00	-	3.091.084.093,00
Kecamatan Kedungjati	105.000.000,00	573.036.500,00	467.942.000,00	6.500.000,00	-	-	1.152.478.500,00
Kecamatan Karangrayung	72.800.000,00	580.917.510,00	284.752.000,00	8.600.000,00	-	-	947.069.510,00
Kecamatan Penawangan	205.075.000,00	566.379.000,00	443.970.000,00	6.500.000,00	200.000,00	-	1.222.124.000,00
Kecamatan Toroh	441.760.000,00	561.174.850,00	405.772.000,00	6.650.000,00	330.000,00	-	1.415.686.850,00
Kecamatan Geyer	323.325.000,00	558.304.000,00	450.912.000,00	12.000.000,00	-	-	1.344.541.000,00
Kecamatan Pulokulon	-	577.683.000,00	727.927.000,00	6.500.000,00	-	-	1.312.110.000,00
Kecamatan Kradenan	1.367.200.000,00	607.659.000,00	565.513.000,00	6.500.000,00	-	-	2.546.872.000,00
Kecamatan Gabus	229.000.000,00	492.616.000,00	558.905.000,00	6.500.000,00	-	-	1.287.021.000,00
Kecamatan Ngarangan	20.000.000,00	567.800.000,00	455.708.000,00	6.500.000,00	10.000.000,00	-	1.060.008.000,00
Kecamatan Wirosari	190.000.000,00	550.388.400,00	760.116.200,00	6.500.000,00	1.014.000,00	-	1.508.018.600,00
Kecamatan Tawangharjo	215.301.000,00	655.266.500,00	427.420.000,00	6.500.000,00	-	-	1.304.487.500,00
Kecamatan Grobogan	1.265.246.000,00	519.120.500,00	738.961.100,00	15.303.450,00	-	-	2.538.631.050,00
Kecamatan Purwodadi	203.250.000,00	532.803.900,00	964.443.000,00	6.500.000,00	200.000,00	-	1.707.196.900,00
Kecamatan Brati	76.356.000,00	535.395.000,00	385.265.000,00	6.625.000,00	1.275.000,00	-	1.004.916.000,00
Kecamatan Klambu	-	558.459.500,00	630.767.250,00	6.625.000,00	19.023.750,00	-	1.214.875.500,00
Kecamatan Godong	1.130.825.000,00	739.880.857,14	805.664.500,00	6.500.000,00	-	-	2.682.870.357,14
Kecamatan Gubug	427.980.000,00	752.273.500,00	1.046.790.000,00	4.000.000,00	-	-	2.231.043.500,00
Kecamatan Tegowanu	481.500.000,00	689.965.624,00	679.185.000,00	6.500.000,00	-	-	1.857.150.624,00
Kecamatan Tanggungharjo	120.335.000,00	578.284.280,00	832.469.000,00	6.590.000,00	350.000,00	-	1.538.028.280,00
Kelurahan Wirosari	49.298.142.082,00	226.470.750,00	388.483.004,00	18.966.750,00	140.000,00	-	49.932.202.586,00
Kelurahan Kunden	19.712.267.396,00	138.635.000,00	842.978.000,00	21.000.000,00	-	-	20.714.880.396,00
Kelurahan Kalongan	20.027.932.656,00	154.119.000,00	497.031.000,00	-	3.150.000,00	-	20.682.232.656,00
Kelurahan Grobogan	3.600.243.076,00	131.582.400,00	250.984.500,00	3.650.000,00	1.220.000,00	-	3.987.679.976,00
Kelurahan Purwodadi	27.148.025.000,00	186.905.750,00	489.677.500,00	-	200.000,00	-	27.824.808.250,00
Kelurahan Kuripan	10.786.617.572,00	192.681.389,00	512.483.000,00	-	40.000.000,00	-	11.531.781.961,00
Kelurahan Danyang	18.280.000.000,00	187.507.000,00	504.649.000,00	-	1.500.000,00	-	18.973.656.000,00
BPPT	-	1.453.898.602,00	921.284.000,00	-	203.834.500,00	-	2.579.017.102,00
BKD	484.620.000,00	1.446.024.308,24	862.149.500,00	28.082.300,00	30.557.000,00	-	2.851.433.108,24
BPBD	14.275.200,00	6.548.234.576,00	1.011.647.460,00	25.527.500,00	16.995.000,00	-	7.616.679.736,00
BKP	-	1.095.016.144,00	5.198.226.600,00	314.338.000,00	14.362.500,00	-	6.621.943.244,00
Bapermas	349.875.000,00	1.302.792.988,00	979.302.000,00	-	15.182.000,00	-	2.647.151.988,00
Kantor Arsip Daerah	-	853.879.500,00	-	-	-	-	853.879.500,00
Kantor Perpustakaan Daerah	895.000.000,00	644.255.785,10	654.015.000,00	43.056.000,00	733.877.864,90	-	2.970.204.650,00
Distan TPH	2.491.890.742,00	5.511.231.455,00	7.616.026.150,00	729.429.895,00	160.360.000,00	-	16.508.938.242,00
Disnakan	1.447.485.000,00	3.943.884.307,40	4.939.631.070,00	2.653.380.350,00	8.800.000,00	-	12.993.180.727,40
Dishutbun	1.190.585.714,00	1.891.636.275,00	2.122.464.287,00	48.730.000,00	2.600.100,00	-	5.256.016.376,00
Disperindagtamben	6.627.375.532,00	2.147.081.737,00	68.694.070.399,00	1.046.599.600,00	-	-	78.515.127.268,00
Jumlah	349.212.209.753,67	264.385.678.009,06	624.274.525.777,39	680.390.677.733,11	222.678.153.526,70	363.572.500,00	2.141.304.817.299,93

D. Dana Cadangan Rp21.900.426.864,00

Jumlah Dana Cadangan per 31 Desember 2014 sebesar Rp21.900.426.864,00 adalah berupa: Dana cadangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2016. Dana cadangan ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pembiayaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Sedangkan jumlah Dana cadangan yang akan dibentuk dalam 3 tahun pembentukan yaitu: pada tahun 2012 sebesar Rp5.000.000.000,00, pada tahun 2013 sebesar Rp7.500.000.000,00, dan pada tahun 2014 sebesar Rp7.500.000.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2014 Dana Cadangan sebesar



Rp21.900.426.864,00 terbentuk dari pemindah bukuan rekening Kas Daerah melalui Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp20.000.000,00 ke rekening deposito Dana Cadangan dan bunga giro pada rekening dana cadangan di bank per 31 Desember 2014 sebesar Rp1.900.426.864,00.

E. Aset Lainnya Rp10.841.759.327,60

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2014 ini merupakan nilai tagihan penjualan angsuran, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud, dan aset lain-lain, dengan rincian saldo sebagai berikut:

Aset Lainnya:	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	(Rp)	(Rp)
Tagihan Penjualan Angsuran	4.442.873.988,99	6.808.628.625,00
Tuntutan Ganti Rugi	23.603.475,00	26.703.475,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	2.581.000.000,00	2.581.000.000,00
Aset Tidak Berwujud	3.394.811.197,61	3.785.246.736,74
Aset Lain-lain	399.470.666,00	158.150.667.669,77
	10.841.759.327,60	171.352.246.506,51

1. Tagihan Penjualan Angsuran Rp4.442.873.988,99

Saldo tagihan penjualan angsuran per 31 Desember 2014 sebesar Rp4.442.873.988,99 adalah merupakan bagian jangka panjang tagihan penjualan angsuran atas konstruksi kios dan los pada 6 (enam) pasar dengan rincian sebagai berikut:

- a) Pasar Tegowanu sebesar Rp 24.225.000,00
- b) Pasar Gubug sebesar Rp 77.456.250,00
- c) Pasar Nglejok sebesar Rp 419.746.758,06
- d) Pasar Danyang sebesar Rp 36.337.499,24
- e) Pasar Godong sebesar Rp3.885.108.481,70
- Total Rp4.442.873.988,99

2. Tuntutan Ganti Rugi Rp23.603.475,00

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2014 sebesar Rp23.603.475,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Kas di Bendahara Penerimaan Disporabudpar sebesar Rp14.703.475,00, disebabkan yang bersangkutan meninggal dunia sejak tahun 2009;
- b) Mantan Kades Karangpaing, yang bersangkutan menghilangkan Barang Milik Daerah berupa sepeda motor sebesar Rp1.500.000,00;
- c) Kasubbag. Umum Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang bersangkutan menghilangkan Barang Milik Daerah berupa sepeda motor sebesar Rp1.600.000,00;



- d) Ganti kerugian pada personil PNS di Badan Lingkungan Hidup karena menghilangkan Barang Milik Daerah berupa sepeda motor sebesar Rp5.800.000,00.

3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga Rp2.581.000.000,00

Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2014 sebesar Rp2.581.000.000,00 adalah reklasifikasi pada tahun 2011 dari aset tetap tanah pasar umum Purwodadi yang tercatat pada Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi sebesar Rp2.510.000.000,00 dan Nilai Bekas Bangunan Pasar Umum Purwodadi sebesar Rp71.000.000,00 yang dikerjasamakan dengan PT.Karsa Bayu Bangun Perkasa selaku Pihak Kedua, yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Renovasi Pasar Umum Purwodadi Nomor 050/2239/1994 dan Nomor 103/PT.KBBP/PWD/IX/94 Tanggal 23 September 1994. Dalam kerjasama tersebut Pihak Kedua memperoleh Hak Guna Bangunan (HGB) diatas Hak Pengelolaan (HPL) dalam jangka waktu 25 tahun. Semula nilai Aset Tetap Tanah Pasar Purwodadi tercatat sebesar Rp5.663.750.000,00 sesuai Surat Keputusan Bupati Grobogan Nomor 027/386.1/2009 Tanggal 2 Juni 2009 tentang Penetapan Hasil Sensus Barang Daerah. Kemudian diterbitkan Surat Keputusan Bupati Grobogan Nomor 027/938/2011 Tanggal 8 September 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Grobogan Nomor 027/386.1/2009, yang menyatakan bahwa nilai Aset Tanah Pasar Umum Purwodadi menjadi sebesar Rp2.510.000.000,00.

4. Aset Tidak Berwujud Rp3.394.811.197,61

Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2014 sebesar Rp3.394.811.197,61 berupa program aplikasi yang dipergunakan pada 20 SKPD. Berikut rincian penambahan dan pengurangan aset tidak berwujud berdasarkan SKPD:



Pemerintah Kabupaten Grobogan
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013

No	SKPD	Nama Software/Aplikasi	Jumlah
1.	Dinas Pendidikan	- Software Kependidikan	123.050.989,53
2.	RSUD dr.R.Soedjati Purwodadi (BLUD)	- Program Aplikasi Penagihan (Billing)	478.848.000,00
		- Aplikasi Software Relam Medik	72.108.000,00
		- Lisensi Window Server, CAL Window Server, SQL Server, CAL SQL Server	76.238.880,00
		- DED Pembangunan Gedung berkaitan dengan penyakit jantung dan paru	77.724.325,00
3.	Dinas Ciptakarya Tata Ruang dan Kebersihan	- Software Pendataan Bangunan Gedung	36.550.000,00
4.	Bappeda	- Software Pembangunan Program Aplikasi Pelaporan Kinerja	19.800.000,00
5.	Dishubinfokom	- Software Aplikasi SIM PKB	45.395.000,00
		- Aplikasi Simda	30.500.000,00
6.	Badan Lingkungan Hidup	- Software Windows 7 Starter	6.259.000,00
7.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	- Lisensi Pendukung Siak	55.000.000,00
		- OS Server	6.365.051,00
		- OS PC	1.768.070,00
		- Ms Office	1.343.733,00
		- Antivirus	454.646,00
		- Aplikasi Pendaftaran Pelaksanaan Perda 4 Tahun 2014	22.421.700,00
8.	BP3AKB	- Software SIM PKK	18.492.000,00
9.	Dinas Koperasi UMKM	- Software Koperasi	27.750.800,00
10.	Sekretariat Daerah	- Software pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Anggaran Tahunan Seida	58.400.000,00
		- Software pembuatan SPM	44.400.000,00
		- Software SPP	37.650.000,00
		- Software peraturan perundang-undangan	9.900.000,00
		- Software Aplikasi Sistem Informasi Geografis (GIS)	48.870.000,00
		- Software Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan KU	42.750.000,00
		- Software GIS dan SIMBANGDA	34.450.000,00
		- Software Aplikasi SIM Gaji	21.200.000,00
		- Software Aplikasi Website	17.750.000,00
		- Software Aplikasi SIM TU	34.000.000,00
		- Program Aplikasi Berbasis Web	5.000.000,00
		- Program Pengembangan Website	15.000.000,00
		- Program SIM Gaji (Server & 1 Client)	28.880.000,00
		- Program Aplikasi Gaji	24.600.000,00
		- Program Pengembangan Menu Website	20.500.000,00
		- Program Penyempurnaan Aplikasi	21.100.000,00
		- Instalasi Software	15.000.000,00
		- Software SMS Center	15.000.000,00
		- Software Simpeg	20.000.000,00
		- Software Website dan Jaringan LAN	16.000.000,00
		- Software Update Program SIM Gaji	20.900.000,00
		- Software Aplikasi Gaji	37.500.000,00
		- Software Jaringan	4.245.858,00
		- Update Program Aplikasi Gaji	27.835.535,00
		- Pengadaan Program Bukti Pemotongan PPh (Form A2)	28.585.965,00
		- Software SIM Publik	35.207.402,00
		- Pengembangan Aplikasi SIM Gaji	24.850.000,00
		- Perawatan & Pemeliharaan Jaringan Software	59.900.000,00
		- Pengadaan Jaringan Simbangda	72.585.000,00
		- Pengadaan Jaringan Simpat	4.800.000,00
		- Software (SIM Bank Data)	52.585.816,08
11.	Sekretariat DPRD	- Software Sim Gaji	63.573.000,00
12.	DPPKAD selaku SKPD	- Aplikasi SIMPEG	38.740.100,00
		- Sist. Inf. Simda	300.000.000,00
		- Aplikasi pajak air tanah dan monitoring pajak air tanah	24.795.000,00
		- Aplikasi kepegawaian DPPKAD	49.627.500,00
		- Aplikasi Persediaan Barang DPPKAD	49.627.500,00
		- Aplikasi PBB Oracle 11 g Standart edition	64.891.684,00
		- Aplikasi PBB MapInfo Standart	31.106.891,00
		- Program Mapatda	130.000.000,00
		- Oracle Weblogic Suite dan Oracle Internet Developer	196.380.142,00
		- Aplikasi Sistem Pengelolaan Database Simda Online	49.268.500,00
		- SQL Server Std 2012	35.619.937,00
		- Office 2013 Home & Business	5.193.773,00
13.	Inspektoral	- Software Aplikasi LP2P	11.900.000,00
		- Software Program Aplikasi LP2P	4.900.000,00
		- Software Aplikasi Program Pengawasan Fungsional Pemerintah	19.900.000,00
14.	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	- Sistem Informasi Pelayanan Perijinan (SIPP)	42.350.000,00
		- Sistem Informasi Management Retribusi HO	52.374.400,00
		- Sistem Informasi Management Penanaman Modal (SIMPEDAL)	38.087.000,00
15.	Badan Kepegawaian Daerah	- Software pengembangan modul aplikasi jabatan fungsional	19.500.000,00
16.	Kantor Perpustakaan Daerah	- Program Aplikasi Pelayanan	7.030.000,00
17.	Distan TPH	- Software Kearsipan	49.850.000,00
		- Software SPPD	49.500.000,00
		- Software Penghitungan Harga pasar	8.250.000,00
18.	Disperindagtaben	- Sistem Informasi Pasar Daerah	52.830.000,00
Jumlah			3.394.811.197,61

5. Aset Lain-lain Rp399.470.666,00

Aset Lain-lain per 31 Desember 2014 sebesar Rp399.470.666,00 terdiri dari:

- aset tetap peralatan dan mesin yang kondisinya telah rusak berat dan tidak mempunyai nilai ekonomis sebesar Rp11.595.000,00 pada Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang sedang dalam proses penghapusan terdiri dari:
 - Alat kantor dan alat rumah tangga sebesar Rp5.665.000,00
 - Alat studio dan alat komunikasi sebesar Rp5.930.000,00
- aset tetap peralatan dan mesin yang telah rusak berat dan tidak mempunyai nilai ekonomis sebesar Rp815.000,00 pada Dinas



- Koperasi UMKM yang sedang dalam proses penghapusan terdiri dari:
- Alat kantor dan rumah tangga berupa Mesin Hitung sebesar Rp365.000,00
 - Alat kantor dan rumah tangga berupa Zice sebesar Rp450.000,00
- c) aset tetap peralatan dan mesin yang kondisinya telah rusak berat dan tidak mempunyai nilai ekonomis sebesar Rp32.988.666,00 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat yang sedang dalam proses penghapusan terdiri dari:
- Alat angkutan darat bermotor sepeda motor sebesar Rp5.300.000,00
 - Alat kantor dan alat rumah tangga sebesar Rp26.888.666,00
 - Alat studio dan alat komunikasi sebesar Rp800.000,00
- d) aset tetap peralatan dan mesin yang kondisinya telah rusak berat dan tidak mempunyai nilai ekonomis sebesar Rp2.850.000,00 pada Sekretariat Daerah yang sedang dalam proses penghapusan berupa:
- Alat kantor dan alat rumah tangga sebesar Rp2.850.000,00
- e) aset tetap peralatan dan mesin yang kondisinya telah rusak berat dan tidak mempunyai nilai ekonomis sebesar Rp37.500.000,00 pada Sekretariat DPRD yang sedang dalam proses penghapusan terdiri dari:
- Alat angkutan darat bermotor berupa sepeda motor Honda Kharisma NF 125 D tahun 2004 sebesar Rp12.500.000,00
 - Alat angkutan darat bermotor berupa sepeda motor Honda Kharisma NF 125 D tahun 2004 sebesar Rp12.500.000,00
 - Alat angkutan darat bermotor berupa sepeda motor Honda Kharisma NF 125 D tahun 2004 sebesar Rp12.500.000,00
- f) aset tetap peralatan dan mesin yang kondisinya telah rusak berat dan tidak mempunyai nilai ekonomis sebesar Rp25.325.000,00 pada Kecamatan Geyer yang sedang dalam proses penghapusan berupa:
- Alat kantor dan alat rumah tangga sebesar Rp25.325.000,00
- g) aset tetap peralatan dan mesin yang kondisinya telah rusak berat dan tidak mempunyai nilai ekonomis sebesar Rp9.110.000,00 pada Kecamatan Gabus yang sedang dalam proses penghapusan berupa:
- Alat kantor dan alat rumah tangga sebesar Rp9.110.000,00
- h) aset tetap peralatan dan mesin yang kondisinya telah rusak berat dan tidak mempunyai nilai ekonomis sebesar Rp1.900.000,00 pada Kecamatan Tanggunharjo yang sedang dalam proses penghapusan terdiri dari:
- Alat angkutan darat bermotor sepeda motor Honda Win tahun 1994 sebesar Rp1.000.000,00
 - Alat kantor dan alat rumah tangga sebesar Rp900.000,00
- i) aset tetap peralatan dan mesin yang kondisinya telah rusak berat dan tidak mempunyai nilai ekonomis sebesar Rp18.929.000,00 pada



- Kelurahan Wirosari yang sedang dalam proses penghapusan terdiri dari:
- Alat kantor dan alat rumah tangga sebesar Rp17.179.000,00
 - Alat studio dan alat komunikasi sebesar Rp1.750.000,00
- j) aset tetap peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya yang kondisinya telah rusak berat dan tidak mempunyai nilai ekonomis sebesar Rp33.757.000,00 pada Kelurahan Kunden yang sedang dalam proses penghapusan terdiri dari:
- Alat angkutan darat bermotor sepeda motor Honda tahun 2003 sebesar Rp11.500.000,00
 - Alat kantor dan alat rumah tangga sebesar Rp19.950.000,00
 - Buku dan perpustakaan sebesar Rp2.307.000,00
- k) aset tetap peralatan dan mesin yang kondisinya telah rusak berat dan tidak mempunyai nilai ekonomis sebesar Rp17.105.000,00 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan sedang dalam proses penghapusan berupa:
- Alat angkutan darat bermotor sepeda motor sebesar Rp10.500.000,00
 - Alat studio dan alat komunikasi berupa handycam sebesar Rp6.605.000,00
- l) aset tetap yang kondisinya telah rusak berat dan tidak mempunyai nilai ekonomis sebesar Rp173.073.000,00 pada Kantor Arsip Daerah yang sedang dalam proses penghapusan terdiri dari:
- Alat angkutan darat bermotor roda empat (mini bus) sebesar Rp27.000.000,00
 - Alat kantor dan alat rumah tangga sebesar Rp56.501.000,00
 - Aset tak berwujud berupa software/aplikasi/program sebesar Rp89.572.000,00
- m) barang yang tidak ditemukan sebesar Rp13.673.000,00 pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang masih dalam proses TGR berupa:
- Alat angkutan darat bermotor sepeda motor sebesar Rp13.673.000,00
- n) sisa Gaduhan Ternak yang dikelola Dinas Peternakan sebesar Rp20.850.000,00 tetapi dicatat dan diakui pada DPPKAD.

F. Kewajiban Rp4.420.406.734,22

Jumlah Kewajiban menunjukkan kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran kas keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Grobogan per 31 Desember 2014 terdiri atas Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang, dengan rincian sebagai berikut:



Kewajiban:	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
1 Kewajiban Jangka Pendek	4,371,169,485.82	16,065,565,044.27
2 Kewajiban Jangka Panjang	49,237,248.40	155,989,130.22
	<u>4,420,406,734.22</u>	<u>16,221,554,174.49</u>

1. Kewajiban Jangka Pendek Rp4.371.169.485,82

Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun sejak tanggal 31 Desember 2014, yang meliputi Utang Perhitungan Pihak Ketiga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya sebagai berikut:

Kewajiban Jangka Pendek:	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
a Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1,146,241,553.00	10,989,995,001.00
b Bagian Lancar Utang Dalam Negeri	106,751,881.82	117,818,715.27
c Utang Jangka Pendek Lainnya	<u>3,118,176,051.00</u>	<u>4,957,751,328.00</u>
	<u>4,371,169,485.82</u>	<u>16,065,565,044.27</u>

Saldo-saldo akun Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga Rp1.146.204.053,00

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2014 merupakan bagian dari Kas yang menjadi hak (klaim) pihak ketiga. Utang PFK berasal dari kewajiban pemotongan dan penyetoran pajak, penerimaan Kas Daerah yang bersifat non anggaran, serta penerimaan lain yang menjadi hak pihak lain. Utang PFK terdiri atas utang PFK pada Bendahara Umum Daerah, dan utang PFK pada bendahara pengeluaran SKPD, rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam tabel berikut:



Uraian	Saldo Awal	Penerimaan 2014	Pengeluaran 2014	Saldo Akhir
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
PFK di BUD				
Utang IWP	-	44.170.122.173,00	44.170.122.173,00	-
Taspen	-	-	-	-
Utang Askes	-	15.309.615.010,00	15.309.615.010,00	-
Utang PPh Pasal 21	51.231.200,00	11.659.863.287,00	11.711.094.487,00	-
Utang PPh Pasal 22	162.394.943,00	1.485.059,00	163.880.002,00	-
Utang PPh Pasal 23	23.494.328,00	-	23.494.328,00	-
Utang PPh Pasal 4 Ayat 2	844.801.481,00	10.205.894,00	855.007.375,00	-
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	4.890.714.687,00	-	4.890.714.687,00	-
Taperum	-	945.199.000,00	945.199.000,00	-
Uang Jaminan	159.756.950,00	-	-	159.756.950,00
Retensi Pemeliharaan	4.228.700.562,00	(205.209.725,00)	3.104.581.385,00	918.909.452,00
Titipan Dana Jamkesmas	-	399.164.100,00	399.164.100,00	-
Titipan Dana Jampersal	433.160.000,00	342.160.000,00	775.320.000,00	-
Askes PNS Raw at Jalan	145.980.500,00	(112.007.500,00)	33.973.000,00	-
Askes PNS Raw at Inap	16.305.000,00	17.025.000,00	33.330.000,00	-
Penerimaan/Pengeluaran Lain Yang Sejenis	-	1.200.000,00	-	1.200.000,00
Pajak Daerah	-	4.500.000,00	4.500.000,00	-
Jumlah PFK di BUD	10.956.539.651,00	72.543.322.298,00	82.419.995.547,00	1.079.866.402,00
PFK di Bendahara SKPD				
Bendahara FKTP				60.244.312,00
Bendahara Disperindagtanben				689.980,00
BLUD				5.403.359,00
Jumlah PFK di Bendahara SKPD	-	-	-	66.337.651,00
Total	10.956.539.651,00	72.543.322.298,00	82.419.995.547,00	1.146.204.053,00

b. Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Rp106.751.881,82

Jumlah Bagian Lancar Utang Dalam Negeri per 31 Desember 2014 sebesar Rp106.751.881,82 merupakan utang kepada ADB LOAN dengan rincian:

- 1) Pokok sebesarRp92.895.599,94
- 2) Bunga sebesarRp13.561.467,37
- 3) Jasa sebesarRp294.814,51

c. Utang Jangka Pendek Lainnya Rp3.118.176.051,00

Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2014 terdiri atas kewajiban RSUD dr. R. Soedjati Purwodadi dengan rincian:

- 1) Unit donor darah PMI sebesarRp151.755.000,00
- 2) Makan minum harian pasienRp25.531.000,00
- 3) Alat Orthopedi sebesarRp83.039.188,00
- 4) Utang jasa pelayanan sebesarRp2.857.850.863,00

2. Kewajiban Jangka Panjang. Rp49.237.248,40

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban lainnya yang bukan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek, adapun saldo kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2014 tersebut merupakan bagian jangka



panjang utang kepada ADB LOAN yang akan lunas pada tahun 2016 sebesar Rp49.237.248,40 dengan rincian:

- 1) Pokok sebesarRp46.447.799,97
- 2) Bunga sebesarRp2.730.098,46
- 3) Jasa sebesarRp59.349,97

G. Ekuitas Dana Rp2.540.972.560.953,84

Akun Ekuitas dana menyajikan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Grobogan, yang menunjukkan hak Pemerintah Kabupaten terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Hak pihak ketiga ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten, meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya. Ekuitas Dana Pemerintah Kabupaten Grobogan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 dijelaskan sebagai berikut:

<i>Ekuitas Dana:</i>	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
1 Ekuitas Dana Lancar	251,732,136,358.27	219,999,454,041.73
2 Ekuitas Dana Investasi	2,267,339,997,731.58	2,104,702,189,783.23
3 Ekuitas Dana Cadangan	21,900,426,864.00	13,194,881,504.00
Jumlah Ekuitas Dana	2,540,972,560,953.84	2,337,896,525,328.96

Masing-masing akun Ekuitas Dana dijelaskan sebagai berikut:

1. Ekuitas Dana Lancar Rp251.732.136.358,27

Akun Ekuitas Dana Lancar menggambarkan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Grobogan per 31 Desember 2014 yang berasal dari pengelolaan aset lancar. Ekuitas Dana Lancar terdiri atas:

<i>Ekuitas Dana Lancar:</i>	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	209,605,742,431.00	164,329,258,658.00
Pendapatan yang Ditangguhkan	92,089,590.00	69,115,639.00
Cadangan untuk Piutang	19,686,279,873.09	18,154,834,831.00
Cadangan untuk Persediaan	25,572,952,397.00	42,521,814,957.00
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	(3,224,927,932.82)	(5,075,570,043.27)
Jumlah Ekuitas Dana Lancar	251,732,136,358.27	219,999,454,041.73

Penjelasan atas masing-masing pos ekuitas dana lancar diuraikan sebagai berikut:

- a) Ekuitas Dana Lancar-SILPA per 31 Desember 2014 sebesar Rp209.605.742.431,00 merupakan kekayaan bersih yang terdiri atas:



1 Saldo Kas Daerah sebesar	179,279,259,668.00
2 Saldo Kas di Bendahara FKTP sebesar	13,227,201,319.00
3 Saldo Kas di BLUD sebesar	12,099,281,444.00
4 Investasi Jangka Pendek (BLUD)	5,000,000,000.00
Jumlah	209,605,742,431.00

- b) Pendapatan yang ditangguhkan per 31 Desember 2014 Rp92.089.590,00 merupakan penerimaan pendapatan di Bendahara Penerimaan Dishubinfokom sebesar Rp1.098.500,00, Bendahara penerimaan DPPKAD sebesar Rp845.000,00 dan Jasa Giro yang masih berada di Bendahara FKTP sebesar Rp90.146.090,00 yang belum disetor ke Kas Daerah. Berdasarkan basis kas yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, penerimaan akan diakui sebagai pendapatan pada saat uang diterima Kas Daerah.
- c) Cadangan untuk piutang per 31 Desember 2014 sebesar Rp19.686.279.873,00 merupakan kekayaan bersih dalam bentuk piutang.
- d) Cadangan untuk persediaan per 31 Desember 2014 sebesar Rp25.572.952.397,00 merupakan ekuitas dalam bentuk barang persediaan.
- e) Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2014 merupakan bagian dari ekuitas yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek lainnya sebesar (Rp3.224.927.932,82).

2. **Ekuitas Dana Investasi Rp2.267.342.897.731,58**

Akun Ekuitas Dana Investasi menggambarkan kekayaan Pemerintah Kabupaten Grobogan per 31 Desember 2014 yang berasal dari pengelolaan aktiva jangka panjang, yang terdiri atas:

<i>Ekuitas Dana Investasi:</i>	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang	115,249,198,352.44	85,691,135,672.92
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	2,141,301,177,299.93	1,847,814,796,734.02
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya (tidak Termasuk Dana Cadangan)	10,841,759,327.60	171,352,246,506.51
Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	(49,237,248.40)	(155,989,130.22)
Jumlah Ekuitas Dana Investasi	2,267,342,897,731.58	2,104,702,189,783.23

Masing-masing pos ekuitas dana investasi tersebut di atas dijelaskan sebagai berikut:

- a. Ekuitas Dana yang Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Grobogan yang berupa investasi permanen. Kenaikan nilai ekuitas dana di investasikan dalam investasi jangka panjang berasal dari penambahan penyertaan modal, dan laba perusahaan.



- b. Ekuitas Dana dalam Aset Tetap merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Grobogan yang berupa aset tetap. Kenaikan ekuitas dana diinvestasikan dalam aset tetap berasal dari kenaikan nilai aset tetap karena adanya penambahan aset dari belanja modal, penambahan aset dari donasi/hibah, serta penurunan karena penghapusan.
- c. Ekuitas Dana yang Diinvestasikan dalam Aset Lainnya merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Grobogan yang berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset lain-lain.
- d. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang adalah pengalokasian dana untuk pembayaran utang kepada ADB-LOAN.

3. Ekuitas Dana Cadangan Rp21.900.426.864,00

Akun Ekuitas Dana Cadangan menggambarkan kekayaan Pemerintah Kabupaten Grobogan per 31 Desember 2014 dalam bentuk dana cadangan.

5.3 PENJELASAN ATAS POS-POS ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi aliran penerimaan dan pengeluaran kas selama tahun 2014 dan 2013, meliputi Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi Non Keuangan, Aktivitas Pembiayaan, dan Aktivitas Non Anggaran.

Penyajian Laporan Arus Kas didasarkan pada transaksi Kas Daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) selaku pejabat pengelola keuangan daerah. Transaksi pada kas DPPKAD menggunakan dokumen sumber surat tanda setoran (STS) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Transaksi kas pada Bendahara penerimaan menggunakan dokumen sumber Surat Tanda Setoran (STS) untuk transaksi penerimaan, bendahara penerimaan melakukan rekapitulasi penerimaan harian selanjutnya disetorkan ke rekening penerimaan. Transaksi pengeluaran kas melalui bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran mencairkan kas di Bank BPD setelah diverifikasi besarnya. Transaksi pembayaran kepada pihak ketiga, setelah bukti transaksi lengkap dan sah maka bendahara pengeluaran melakukan transfer antar bank ke rekening pihak ketiga.

Ringkasan Laporan Arus Kas tahun 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:



	2014 (Rp)	2013 (Rp)
A Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	329,417,848,310.00	393,330,338,351.00
B Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	(290,784,879,716.00)	(347,608,369,244.00)
C Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	(19,885,137,420.00)	(16,565,826,876.00)
D Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	(9,863,718,739.00)	928,054,628.00
Kenaikan/Penurunan Kas	8,884,112,435.00	30,084,196,859.00
Saldo Awal Kas Daerah	171,475,013,635.00	141,390,816,776.00
Saldo Akhir Kas Daerah	180,359,126,070.00	171,475,013,635.00
Saldo pada Bendahara Penerimaan	1,943,500.00	1,082,000.00
Saldo pada Bendahara Pengeluaran	727,480.00	14,040,010.00
Saldo Kas di Bendahara BLUD	12,104,684,803.00	3,898,233,653.00
Saldo Kas di Bendahara FKTP	13,377,591,721.00	-
	205,844,073,574.00	175,388,369,298.00

A. Arus Kas dari Aktivitas Operasi Rp329.417.848.310,00

Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus kas dari aktivitas operasi terdiri atas arus masuk dan arus keluar kas, dengan perincian sebagai berikut:

	2014 (Rp)	2013 (Rp)
1 Arus Masuk Kas	1,586,715,468,250.00	1,493,353,283,370.00
2 Arus Keluar Kas	1,257,297,619,940.00	1,100,022,945,019.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	329,417,848,310.00	393,330,338,351.00

1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Rp1.586.715.468.250,00

Arus masuk kas dari aktivitas operasi berasal dari penerimaan pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah dengan rincian sebagai berikut:

	2014 (Rp)	2013 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	45,528,787,888.00	42,622,520,501.00
Pendapatan Retribusi Daerah	28,028,552,159.00	13,579,062,514.00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10,886,504,006.00	11,471,523,229.00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	26,600,525,084.00	19,557,437,576.00
Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	67,231,012,336.00	63,924,773,793.00
Dana Alokasi Umum	977,675,512,000.00	906,666,365,000.00
Dana Alokasi Khusus	85,838,690,000.00	104,304,440,000.00
Pendapatan Hibah	-	1,099,143,300.00
Dana Penyesuaian	221,326,331,000.00	217,919,024,000.00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	80,379,135,995.00	74,627,151,592.00
Bantuan Keuangan Provinsi	43,220,417,782	37,581,841,865.00
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	1,586,715,468,250.00	1,493,353,283,370.00

2. Arus Keluar Kas Rp1.257.297.619.940,00

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi dipergunakan untuk pengeluaran belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan bantuan keuangan, serta belanja tidak terduga, dengan rincian sebagai berikut:



	2014 (Rp)	2013 (Rp)
Belanja Pegawai	875.535.422.197,00	814.252.715.577,00
Belanja Barang dan Jasa	192.834.008.329,00	215.175.952.939,00
Belanja Bunga	24.948.302,00	35.959.948,00
Belanja Subsidi	428.500.000,00	428.500.000,00
Belanja Hibah	101.634.714.677,00	20.611.994.000,00
Belanja Bantuan Sosial	7.813.425.000,00	12.807.409.550,00
Belanja Bagi Hasil	-	2.440.420.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	79.026.601.435,00	33.911.412.590,00
Belanja Tidak Terduga	-	358.580.415,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	1.257.297.619.940,00	1.100.022.945.019,00

B. Arus Kas dari Aktivitas Investasi**Non Keuangan(Rp290.784.879.716,00)**

Arus kas dari aktivitas investasi non keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus kas dari aktivitas investasi non keuangan terdiri atas arus masuk dan arus kas keluar, dengan rincian sebagai berikut:

	2014 (Rp)	2013 (Rp)
Arus Masuk Kas	2.181.606.000,00	2.011.764.600,00
Arus Keluar Kas	292.966.485.716,00	349.620.133.844,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	(290.784.879.716,00)	(347.608.369.244,00)

1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi**Non Keuangan Rp2.181.606.000,00**

Arus kas masuk berasal dari penerimaan yang bersumber pelepasan hak atas tanah, penjualan peralatan dan mesin, penjualan atas gedung dan bangunan, serta penjualan aset tetap lainnya dengan rincian sebagai berikut:

	2014 (Rp)	2013 (Rp)
Penjualan atas tanah	1.891.559.000,00	1.688.458.600,00
Penjualan atas peralatan dan mesin:	50.260.000,00	27.600.000,00
Penjualan atas gedung dan bangunan	69.717.000,00	206.290.000,00
Penjualan atas jalan, irigasi dan jaringan	-	-
Penjualan aset tetap lainnya	170.070.000,00	89.416.000,00
Penjualan aset lainnya:	-	-
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	2.181.606.000,00	2.011.764.600,00

**2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi****Non Keuangan Rp292.966.485.716,00**

Arus keluar kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan merupakan pengeluaran kas untuk perolehan aset tetap yang terdiri atas:

	2014 (Rp)	2013 (Rp)
Belanja Tanah	4.996.522.913,00	1.485.866.150,00
Belanja Peralatan dan Mesin	30.299.388.084,00	30.196.908.433,00
Belanja Bangunan dan Gedung	52.768.169.270,00	135.055.328.766,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	197.008.940.279,00	174.739.672.535,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	7.893.465.170,00	8.142.357.960,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	292.966.485.716,00	349.620.133.844,00

Perincian lebih lanjut arus keluar kas dari aktivitas investasi non keuangan disajikan pada halaman berikut.

	2014 (Rp)	2013 (Rp)
Belanja Pengadaan Tanah	4.996.522.913,00	1.485.866.150,00
Belanja Pengadaan Alat-alat Berat	1.283.592.950,00	484.677.600,00
Belanja Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	6.293.304.750,00	6.676.957.875,00
Belanja Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	472.555.590,00	368.659.250,00
Belanja Pengadaan Alat-alat Bengkel	12.970.000,00	49.562.000,00
Belanja Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	483.510.750,00	252.043.000,00
Belanja Pengadaan Peralatan Kantor	609.642.225,00	261.858.350,00
Belanja Pengadaan Perlengkapan Kantor	3.152.755.346,00	2.451.428.144,00
Belanja Pengadaan Komputer	4.913.905.591,00	3.706.161.410,00
Belanja Pengadaan mebeulair	3.423.504.385,00	1.245.961.576,00
Belanja Pengadaan Peralatan Dapur	174.500.300,00	134.451.500,00
Belanja Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	17.719.000,00	9.648.000,00
Belanja Pengadaan Alat-alat Studio	843.364.510,00	1.002.764.300,00
Belanja Pengadaan Alat-alat Komunikasi	249.008.500,00	581.171.778,00
Belanja Pengadaan Alat-alat Ukur	100.890.900,00	220.886.150,00
Belanja Pengadaan Alat-alat Kedokteran	697.536.600,00	1.319.577.600,00
Belanja Pengadaan Alat-alat Laboratorium	7.567.844.687,00	11.431.099.900,00
Belanja Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	2.782.000,00	-
Belanja Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	52.768.169.270,00	135.055.328.766,00
Belanja Pengadaan Konstruksi Jalan	126.528.010.964,00	126.374.395.551,00
Belanja Pengadaan Konstruksi Jembatan	3.593.201.475,00	3.692.425.290,00
Belanja Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	63.287.696.100,00	43.428.094.294,00
Belanja Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	2.363.879.250,00	896.219.900,00
Belanja Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	1.236.152.490,00	348.537.500,00
Belanja Pengadaan Buku/Kepustakaan	3.543.823.145,00	926.862.460,00
Belanja Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	213.352.000,00	19.840.000,00
Belanja Pengadaan Hew an/Ternak dan Tanaman	325.415.000,00	1.620.927.000,00
Belanja Modal Aset Tetap BLUD	3.805.902.025,00	5.574.728.500,00
Belanja harga perolehan barang modal	4.973.000,00	-
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	292.966.485.716,00	349.620.133.844,00

**C. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan(Rp19.885.137.420,00)**

Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran. Arus kas dari aktivitas pembiayaan terdiri atas:

	2014 (Rp)	2013 (Rp)
1 Arus Masuk Kas	1.797.758.180,00	1.987.899.724,00
2 Arus Keluar Kas	21.682.895.600,00	18.553.726.600,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	(19.885.137.420,00)	(16.565.826.876,00)

Rincian arus masuk kas dan arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan dijelaskan sebagai berikut:

1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pembiayaan Rp1.797.758.180,00

Arus masuk kas dari Aktivitas Pembiayaan pada TA 2014 terdiri atas:

	2014 (Rp)	2013 (Rp)
Pencairan Dana Cadangan	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-
Penerimaan Piutang Daerah	1.797.758.180,00	1.987.899.724,00
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pembiayaan	1.797.758.180,00	1.987.899.724,00

2. Arus Keluar Kas**dari Aktivitas Pembiayaan Rp21.682.895.600,00**

Arus keluar kas dari Aktivitas Pembiayaan terdiri atas rincian sebagai berikut:

	2014 (Rp)	2013 (Rp)
Pembentukan Dana Cadangan	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	12.500.000.000,00	9.356.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang	92.895.600,00	132.726.600,00
Pemberian Pinjaman Daerah	1.590.000.000,00	1.565.000.000,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pembiayaan	21.682.895.600,00	18.553.726.600,00

D. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran(Rp9.863.718.739,00)

Arus kas dari aktivitas nonanggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas non anggaran berasal dari kewajiban pemotongan/pemungutan pajak atas pembayaran gaji dan tunjangan, pembayaran kepada pihak ketiga melalui pembayaran langsung, serta transaksi non anggaran lainnya. Arus kas dari aktivitas non anggaran yang disajikan dalam laporan arus kas merupakan arus kas pada kas daerah yang dikelola oleh DPPKAD selaku PPKD dan bagian kas daerah yang dikelola oleh BLUD.



	2014 (Rp)	2013 (Rp)
1 Arus Masuk Kas	72.556.276.808,00	85.463.294.927,00
2 Arus Keluar Kas	82.419.995.547,00	84.535.240.299,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	(9.863.718.739,00)	928.054.628,00

1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Non Anggaran Rp72.556.276.808,00

Rincian arus masuk kas dari aktivitas non anggaran adalah sebagai berikut:

<i>Arus Masuk Kas Aktivitas Non Anggaran</i>	2014 (Rp)	2013 (Rp)
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	72.543.322.298,00	85.430.055.263,00
Penerimaan Sisa UP Tahun Lalu	12.954.510,00	33.239.664,00
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Non Anggaran	72.556.276.808,00	85.463.294.927,00

Berikut penjelasan atas penerimaan non anggaran tahun 2014:

1. Penerimaan PFK melalui Kas Daerah DPPKAD terdiri atas penerimaan PFK atas pembayaran gaji dan tunjangan (penerimaan potongan Askes dan IWP, PPh Pasal 21 dan Taperum) dan penerimaan atas pembayaran kepada pihak ketiga (Penerimaan potongan PPH Pasal 4, PPH Pasal 22, PPh Pasal 23). Mekanisme penerimaan dilakukan melalui pemotongan atas pencairan dana pada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Untuk pembayaran gaji dan tunjangan, dana penerimaan PFK disimpan sementara pada rekening penampungan di Bank Jateng Cabang Purwodadi. Sedangkan untuk pembayaran kepada pihak ketiga (rekanan), dana pemotongan/pemungutan pajak langsung disetor bersamaan dengan dilakukannya transfer pembayaran kepada pihak ketiga (rekanan) oleh Bank Jateng Cabang Purwodadi. Dalam hal ini, Bank Jateng Cabang Purwodadi bertindak sebagai rekening Kas Daerah sekaligus sebagai bank persepsi.
2. Penerimaan kembali sisa uang persediaan tahun lalu sebesar Rp12.954.510,00 merupakan pengembalian dari bendahara pengeluaran SKPD dari sisa uang persediaan tahun 2013.

2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Non Anggaran..... Rp82.419.995.547,00

Arus keluar kas aktivitas non anggaran terdiri atas rincian sebagai berikut:



<i>Arus Keluar Kas Aktivitas Non</i>	2014 (Rp)	2013 (Rp)
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	82.419.995.547,00	84.522.285.789,00
Pengeluaran Sisa UP Tahun ini	-	12.954.510,00
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Non Anggaran	82.419.995.547,00	84.535.240.299,00

Berikut penjelasan atas pengeluaran non anggaran tahun 2014:

Pengeluaran PFK melalui Kas Daerah DPPKAD terdiri atas pengeluaran PFK atas pemungutan/pemotongan gaji dan tunjangan serta pengeluaran PFK atas pembayaran kepada rekanan. Pengeluaran PFK atas pembayaran gaji dan tunjangan dilakukan setiap bulan melalui penerbitan Surat Setoran Pajak (SSP). SSP tersebut memerintahkan Bank Jateng Cabang Purwodadi untuk melakukan penyetoran pajak atas pemotongan/pemungutan pajak pembayaran gaji dan tunjangan. Dana yang digunakan untuk penyetoran adalah dana penerimaan pemotongan/pemungutan pajak yang ditampung pada rekening khusus Bank Jateng Cabang Purwodadi setelah lebih dulu dilakukan rekonsiliasi. Pengeluaran PFK atas pembayaran kepada rekanan dilakukan secara bersamaan dengan pencairan dana pada SP2D yang dikirim kepada rekanan melalui mekanisme transfer rekening. Dalam hal ini Bank Jateng bertindak sekaligus sebagai bank persepsi.

E. Saldo Akhir Kas..... Rp205.844.036.574,00

Perhitungan saldo akhir Kas adalah sebagai berikut:

	2014 (Rp)	2013 (Rp)
Saldo Awal Kas Daerah	171.475.013.635,00	141.390.816.776,00
Kenaikan/(Penurunan) Kas	8.884.112.435,00	30.084.196.859,00
Saldo Akhir Kas Daerah	180.359.126.070,00	171.475.013.635,00
Kas di Bendahara Penerimaan	1.944.000,00	1.082.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	689.980,00	14.040.010,00
Kas di Bendahara BLUD	12.104.684.803,00	3.898.233.653,00
Kas di Bendahara FKTP	13.377.591.721,00	-
Saldo Akhir Kas	205.844.036.574,00	175.388.369.298,00

Berikut rekonsiliasi pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas (LAK) dan Neraca untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014:

1. Saldo SILPA pada Neraca per 31 Desember 2013 sebesar Rp164.329.258.658,00. Saldo tersebut diakui sebagai penerimaan Penggunaan SILPA pada LRA tahun 2014.
2. Tidak terdapat selisih antara saldo SILPA pada Neraca per 31 Desember 2014 dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran pada LRA per 31 Desember 2014.



3. Saldo akhir kas di LAK dan di Neraca per 31 Desember 2014 sebesar Rp205.844.036.574,00 sedangkan SILPA di Neraca per 31 Desember 2014 sebesar Rp209.605.742.431,00. Selisih antara saldo kas dengan saldo SILPA sebesar Rp3.761.668.857,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Uraian akun	Jumlah Kas	Silpa
Kasda	180.359.126.070,00	179.279.259.668,00
Kas FKTP	13.377.591.721,00	13.227.201.319,00
Kas BLUD	12.104.684.803,00	12.098.903.424,00
Jasa Giro di rekening Bendh. Penerimaan BLUD		378.020,00
Kas Bendh. Penerimaan	1.944.000,00	-
Kas Bendh. Pengl.	689.980,00	-
Inv. Jgk. Pendek RSUD		5.000.000.000,00
Total	205.844.036.574,00	209.605.742.431,00